



Dewan Riset Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Laporan Kegiatan

DRD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2020

Dewan Riset Daerah DKI Jakarta
drdjakarta.id

Ged. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1
Jakarta Pusat 10150 Indonesia

Laporan Kegiatan

DRD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2020

Disusun Oleh:
Tim Publikasi DRD DKI Jakarta

Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta
drdjakarta.id
Ged. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1
Jakarta Pusat 10150 Indonesia

**Laporan Kegiatan
DRD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2020**

© Tim Publikasi, 2021

Tata sampul: Riswan
Tata isi: Vira

Penerbit: Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta
Kantor DRD Prov. DKI Jakarta, Ged. Dinas Perumahan Lt. 8, Jl. Taman Jatibaru No. 1, Jakarta.

ix + 145 hlm.; 21 cm x 29,7 cm

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1 Angka 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum wr. wb. Salam Sejahtera bagi kita semua,

Mengucapkan puji syukur atas karunia-Nya, sehingga tahun 2020 dapat dilalui walaupun dalam suasana prihatin akibat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Pimpinan DRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu anggota DRD Jakarta yang telah berpartisipasi dan bersama-sama mewujudkan kegiatan-kegiatan DRD. Tahun 2020 DRD Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan anggaran untuk program kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena APBD DKI Jakarta dialihkan dan difokuskan untuk mitigasi Covid-19, terutama penanganan kesehatan. Anggaran Pemda DKI Jakarta mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh pada perekonomian daerah dan menyebabkan dilakukannya revisi (perubahan) RPJMD tahun 2017 – 2022. Selain hal-hal di atas, kami juga mencatat bahwa usulan kenaikan Uang Kehormatan bagi anggota DRD (yang saat ini setara dengan UMR) juga belum sepenuhnya mendapat persetujuan dari Pemda, hal ini menjadi indikasi masih kurangnya apresiasi terhadap kepakaran dan keahlian anggota DRD yang terhormat ini. Namun demikian kita perlu terus menumbuhkan rasa optimis dan semangat kebersamaan untuk bisa melalui kondisi yang kurang menguntungkan saat ini agar program dan pembangunan di Jakarta tetap dapat berlangsung.

DRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan DRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu terutama:

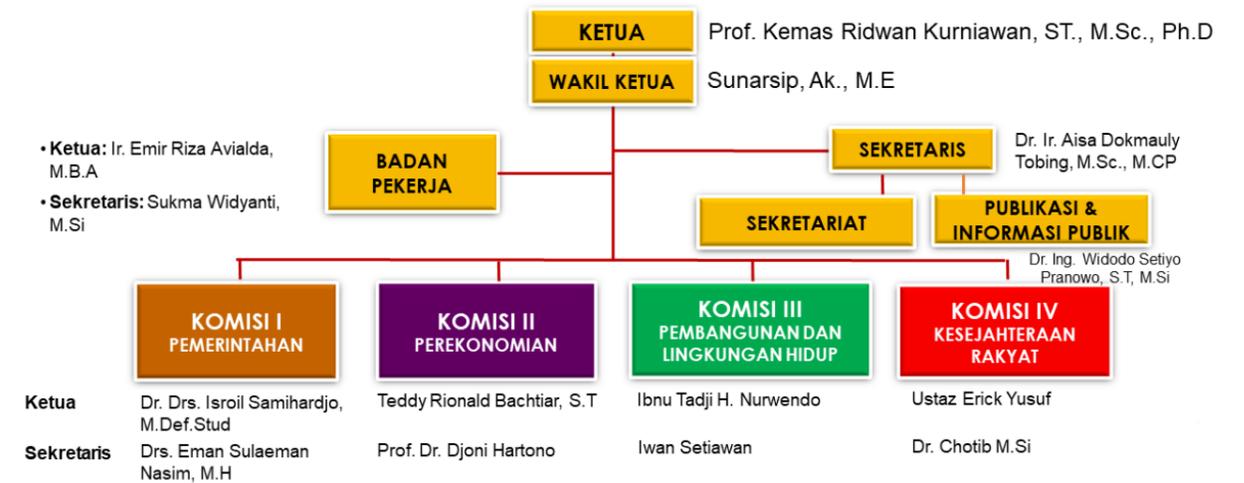
- Gubernur KDH Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Para Deputi Gubernur
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Para Asisten dan Kepala Biro
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- TGUPP Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kerjasama Daerah, ORB,
- SKPD lainnya yang terkait Kegiatan
- Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset
- Organisasi Kemasyarakatan

Menghaturkan maaf atas kekurangan yang terjadi, menjadi introspeksi untuk berusaha lebih baik lagi. Karena itu, masukan dan usulan bagi perbaikan di masa yang akan datang tentu sangat diharapkan. Harapannya, Laporan Kegiatan DRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan bagi pembangunan di DKI Jakarta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungan kepada kita semua. Aamiin YRA.

Wassalamu'alaikum wr.wb.,

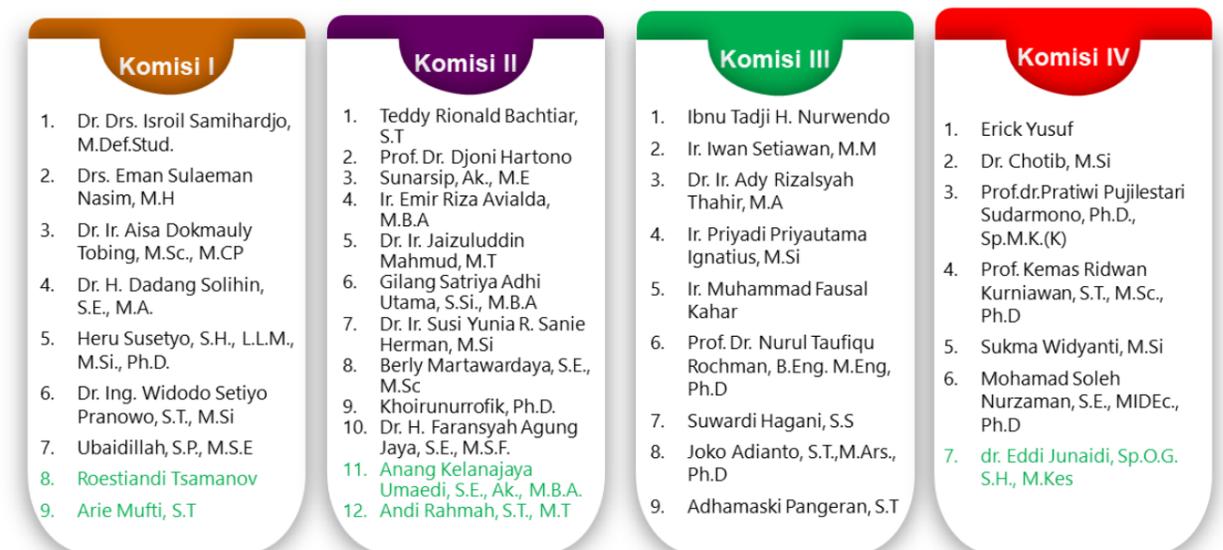
Ketua DRD Provinsi DKI Jakarta
Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.

Struktur Organisasi DRD DKI Jakarta



Anggota DRD DKI Jakarta periode 2018- 2022

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2019
tentang
Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018-2022



Sinopsis

Bersyukur bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini, DRD Jakarta masih tetap dapat melakukan kegiatan dan berkontribusi memberikan masukan, usulan terkait penanganan pembangunan di DKI Jakarta. Salah satu kuncinya adalah melalui semangat kolaborasi dan inovasi. Beberapa contoh riset kolaborasi dalam kaitannya dengan mitigasi Covid-19 yang telah dilakukan seperti Kajian Perancangan Grha Sehat Mandiri melalui Kerjasama antar Pemerintah, Akademisi, Pihak Swasta, dan komunitas yang prototypenya diterapkan di GOR Pademangan Jakarta Utara (<http://drdjakarta.id/index.php/198-gubernur-anies-baswedan-menyambut-grha-sehat-mandiri-karya-drd-dki-jakarta-untuk-mitigasi-penyebaran-covid-19>).

Selain itu Kajian Mesin Penyaring udara dengan teknologi nano bubble ‘Airborne nano-Trapping Technology for Anti COVID Treatment (ATTACT), kerjasama Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI, PT Nanobubble Karya Indonesia dan Dewan Riset Daerah Jakarta (DRD Jakarta) (<http://drdjakarta.id/index.php/199-drd-dki-jakarta-merekomendasikan-attact-sebagai-salah-satu-teknologi-mencegah-penyebaran-bakteri-di-udara>). Alat ini sudah lulus layak uji dari SUCOFINDO.

Sesuai Tata Tertib Kelembagaan DRD, bahwa selama tahun 2020 ini, DRD Provinsi DKI Jakarta sudah 11 kali mengadakan Rapat pleno dan 6 kali Rapat Badan Pekerja yang sejak PSBB diberlakukan di Jakarta diselenggarakan secara virtual. Adapun kegiatan DRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ini (dapat juga diakses melalui website DRD Provinsi DKI Jakarta <http://drdjakarta.id/>) adalah sebagai berikut:

Pertama, Seminar Online yang diselenggarakan melalui Kolaborasi antara Komisi-Komisi yang ada di DRD dengan berbagai pihak, yaitu: Komisi 1 (Ketua Dr (C) Isroil Samiharjo, Msc; Sekretaris : Dr (C) Eman Sulaeman Nasim. S.Sos. MH.MIPR; Anggota : Dr Heru Susetyo SH LLM, Dr Aisah Dokmali Tobing, Dr Dadang Solihin (non Aktif), Widodo Pranowo Ph.D, Ubaidillah SP.MM, Arie Mufti ST, Tsamanov) menyelenggarakan Seminar online ‘Kolaborasi Dewan Riset Daerah Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu – Jakarta’ Kerjasama DRD Prov DKI Jakarta dan Asosiasi Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia tanggal 23 Desember 2020; juga Komisi 2 (Ketua : Teddy Rionald Bachtar, S.T; Sekretaris : Dr. Djoni Hartono; Anggota : Sunarsip, Ak., M.E, Ir. Emir Riza Avialda, M.B.A, Dr. Ir. Jaizuluddin Mahmud, M.T, Khoirunurrofik, Ph.D., Anang Kelanajaya Umaedi, S.E., Ak., M.B.A., Dr. Ir. Susi Yunia R. Sanie Herman, M.Si, Berly Martawardaya, S.E., M.Sc, H. Faransyah Agung Jaya, S.E., M.S.F. Gilang Satriya Adhi Utama, S.Si., M.B.A, Andi Rahmah, S.T., M.T) menyelenggarakan Live Webinar dan Workshop ‘Masalah, Solusi, dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Jakarta #Jakarta Tangguh’ kerjasama DRD Prov. DKI Jakarta dan Jakarta Public Policy Center, tanggal 1 dan 2 Juli 2020; kemudian Komisi 3 (Ketua : Ibnu Tadjji H. Nurwendo; Sekretaris : Iwan Setiawan; Anggota : Prof. Dr. Nurul Taufiq Rochman, B.Eng. M.Eng, Ph.D, Dr. Ir. Ady Rizalsyah Thahir, M.A; Ir. Priyadi Priyautama Ignatius, M.Si., Ir. Muhammad Fausal Kahar, Suwardi Hagani, S.S, Joko Adianto, S.T.,M.Ars., Ph.D, Adhamaski Pangeran, S.T) menyelenggarakan Webinar ‘Strategi Peningkatan Kualitas Udara di Lingkungan Kerja.

Dalam Upaya Minimalisir Penyebaran Covid 19’, Kerjasama LIPI dan DRD Prov DKI Jakarta, tanggal 23 September 2020; lalu Komisi 4 (Ketua : Erick Yusuf; Sekretaris : Dr. Chotib, M.Si; Anggota : Prof. dr. Pratiwi Pujilestari Sudarmono, Ph.D., Sp.M.K.(K), Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph.D, Sukma Widyanti, M.Si, Mohamad Soleh Nurzaman, S.E., MIDEc., Ph.D, dr. Eddi Junaidi, Sp.O.G. S.H., M.Kes.) menyelenggarakan Webinar ‘Mewujudkan Lansia Yang Sehat di Perkotaan pada Era Kenormalan Baru’, kerjasama DRD Prov. DKI Jakarta dan KPP SKSG UI, tanggal 9 September 2020, dan Seminar Online dalam Rangka Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ‘Perempuan Bicara Tentang Perempuan: Peran Perempuan dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Selama Masa Pandemi Covid – 19’, kerjasama DRD Prov. DKI Jakarta dan KPP SKSG UI, tanggal 25 November 2020

Kedua, Kegiatan Kerjasama International dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Luar Negeri, yaitu The 5th International Joint Studio and Seminar on ‘Green Urbanism for Sustainable Environment’ kerjasama antara DRD Provinsi Jakarta, Universitas Indonesia, University of Florida, Cardiff University, AMINEF-Fullbright, SDG’s Hub UI, tanggal 14 & 15 Januari 2020. Selain itu, DRD Prov DKI Jakarta juga bekerjasama dengan CityNet menyelenggarakan Virtual Workshop: Kegiatan Dampingan Kerjasama Luar Negeri ‘CityNet Climate Leadership Program Untuk Kegiatan Climate Leadership Programme (CLP 3) ‘For a Better, Greener and Smarter City Toward Resilient and Sustainable City’ dan Building Community into Low Carbon Society Green Zone Daan Mogot, Jakarta (CLP Jakarta Project Prototype)’ – tanggal 16, 23, 25 September 2020.

Ketiga, penulisan Policy Paper yang dilakukan oleh masing-masing komisi yaitu: Draft Policy Brief: Pemulihan Ekonomi Jakarta Pasca Covid 19 (Komisi 2); Policy Brief: Bang Godot, sang Jawara! (Komisi 3); Ikhtisar Kebijakan: Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dalam Upaya Pencegahan Infeksi Covid 19 (Komisi 3); Action Research: Penyediaan Air Minum Bersumber dari Ekstraksi Air dari Udara Bagi Warga Jakarta Belum Terakses PIPANISASI (Komisi 3); Draft Policy Brief: Usulan Perijinan Pemanfaatan Ruang Jakarta yang Partisipatif dan Transparan (Komisi 3); Draft Policy Brief: Kajian Pengembangan & Pengelolaan Kawasan Muara Angke (Komisi 3); dan Draft Ikhtisar: Kajian Partisipasi Komunitas dalam Pelestarian Cagar Budaya (Komisi 4).

Keempat, Partisipatory dan Nara Sumber anggota DRD dalam berbagai Kegiatan, yaitu: Partisipasi Memberikan Masukan pada Musrenbang DKI Jakarta (Januari 2020); Review dan Masukan Terhadap Revisi RPJMD Prov. DKI Jakarta tahun 2017-2022 melalui Bappeda (per 31 Juli 2020); Narasumber pada Musrenbang Perubahan RPJMD Prov DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 (22 Desember 2020) yaitu Sunarsip ME.Ak,CA dan Prof. dr. Pratiwi P. Sudarmono, Ph.D., SpMK(K); Anggota DRD secara aktif menjadi narasumber di berbagai kegiatan Seminar, FGD dan Workshop di DKI Jakarta (FGD Dewan Transportasi Kota, Webinar IPMI, Webinar INDEF, Workshop UMKM, dll); Ketua DRD menjadi Penasehat dan narasumber Revitalisasi Kota Tua Jakarta yang dilaksanakan oleh Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Prov. DKI Jakarta.

Kelima, Audiensi dan Rapat Dengar Pendapat, yaitu: Audiensi secara Online dengan Gubernur DKI Jakarta (11 Mei 2020); Audiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta (11 Mei 2020); Audiensi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta (Februari 2020, 8 Juli 2020); dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Prov DKI Jakarta (Februari 2020, 8 Juni 2020, 5 November 2020).

Keenam, pembentukan Tim Mitigasi Covid 19 (13 April 2020 dengan Ketua Erick Yusuf dan Sekretaris Sukma Widyati, M.Si), dengan kegiatan yaitu: Kajian Rancangan dan Pembuatan Model Grha Sehat Mandiri di GOR Pademangan Jakarta Utara; pembuatan Prototype Mesin Penyaring udara dengan teknologi nano bubble ATTACT kerjasama LIPI dan Kampanye Mari Pakai Masker.

Ketujuh, Publikasi yang meliputi website DRD Jakarta : <http://drdjakarta.id/> dan twitter; dan Jurnal Online Riset Jakarta: <http://www.jurnal.drdjakarta.id/index.php/jurnalDRD> (vol. 13 No. 1/2020 dan vol. 13 No. 2/2020), Buku Grha Sehat Mandiri Covid 19 tahun 2020 (ber-ISBN).

Kedelapan, Kegiatan Kesekretariatan yang meliputi: Launching Kartu Tanda Pengenal DRD (10 Maret 2020), Kampanye Anti Polusi Udara, Surat Masuk dan Surat Keluar dan pembuatan Laporan Keuangan.

Kesembilan, terdapat tiga Perjanjian Kerjasama, yaitu: Perjanjian Kerjasama dengan PERGUBI (Maret 2020 – Maret 2021); Perjanjian Kerjasama dengan LIPI dan Nano Bubble (Juli 2020 – Juli 2022), serta Perjanjian Kerjasama dengan ADPI (Desember 2020 – Desember 2021).

Dan terakhir, Kesepuluh, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), yaitu: Pokja Pengkajian Kelembagaan DRD (Desember 2020 – Januari 2021) dan Pokja Penyusunan Agenda Riset Daerah (Desember 2020 – Januari 2021). Kelompok Kerja yang mengkaji Kelembagaan DRD mengkaji posisi dan status DRD dengan dibubarkannya DRN, bahwa secara kelembagaan DRD tidak menginduk kepada DRN. DRD dibentuk berdasarkan kebutuhan Riset dan Tupoksi Struktur Organisasi di DKI Jakarta yang berbeda dengan daerah lain. Sementara Kelompok Kerja yang menyusun kembali Agenda Riset Daerah membuat kajian agar sinergi dengan Perubahan RPJMD 2017 – 2022. Hasil Kajian kedua Pokja ini akan disampaikan sebagai masukan kebijakan kepada Gubernur KDH Provinsi DKI Jakarta.



#SemuaPakaiMasker

DRD Provinsi DKI Jakarta ada membuat kajian tentang masker non medis, dasar pemilihan jenis bahan dan jumlah lapis yang disarankan. Materi kajian dapat diunduh di: <https://www.drdjakarta.id/index.php/141-seruan-drd-dki-jakarta-semua-harus-pakai-masker>

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Sinopsis | iii |
| Mitigasi COVID-19 | |
| - Grha Sehat Mandiri Pademangan Jakarta Utara | 2 |
| - Airborne nano-Trapping Technology for Anti COVID-19 Treatment | 18 |
| Webinar | |
| - Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dalam Upaya Pencegahan Infeksi COVID-19 | 30 |
| - Climate Leadership Program | 42 |
| - Pemulihan Ekonomi Jakarta | 50 |
| - Mewujudkan Lansia Yang Sehat di Perkotaan pada Era Kenormalan Baru | 62 |
| - Peran Perempuan dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Selama Masa Pandemi COVID-19 | 66 |
| - Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu – Jakarta | 74 |
| Policy Brief | |
| - Kajian Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Muara Angke | 80 |
| - Bang Godot, Sang Jawara! | 84 |
| - Jurus Jitu Sang Jawara | 88 |
| - Penyediaan Air Minum Melalui Ekstraksi Air dari Udara bagi Warga Jakarta yang Belum Terakses Air Perpipaan | 92 |
| - Usulan Perijinan Pemanfaatan Ruang Jakarta yang Partisipatif dan Transparan | 96 |
| - Kajian Partisipasi Komunitas dalam Pelestarian Cagar Budaya | 100 |
| Publikasi | |
| - DRD News | 109 |
| - Aktifitas di Media Sosial | 110 |
| - Jurnal Riset Jakarta | 112 |
| - Penerbitan Buku | 116 |
| - Diseminasi Ilmiah | 116 |
| Masukan | |
| - Masukan terhadap Revisi RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022 | 120 |
| - Masukan terhadap Raperda RDTR & PZ | 138 |
| - Outline Agenda Riset Daerah 2021 - 2024 | 142 |





Mitigasi COVID-19

Grha Sehat Mandiri Pademangan Jakarta Utara 01

Airborne nano-Trapping Technology

for Anti COVID-19 Treatment 02

01

Kegiatan Kajian Grha Sehat Mandiri dan Implementasi

Oleh:

Tim Task Force Mitigasi COVID-19 DRD DKI Jakarta

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan berdasarkan hasil Rapat Pleno 31 Maret 2020, dalam rangka mendukung langkah-langkah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus memberikan solusi penanganan wabah Covid 19, dikukuhkan dengan Surat Tugas Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, No : SK/20/DRD- DKI/IV/20 tentang Tim Task Force Mitigasi Covid 19 Dewan Riset Daerah Provinsi DKI JAKARTA. Tim terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Bendahara, serta Anggota Dewan Riset Daerah perwakilan dari Komisi 1, 2 dan 3 dan seluruh anggota Komisi 4. Biaya Pelaksanaan Kegiatan Task Force ini dibebankan kepada Anggaran DRD Tahun 2020 serta sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan

Pada tanggal 13 April 2020 diterbitkan Surat Keputusan Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor: SK/20/DRD- DKI/IV/20 tentang **Tim Task Force Mitigasi COVID-19 Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Tim Pengarah

Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D
Sunarsip, Ak, M.E
Dr. Ir. Aisa Dokmauly Tobing, M.Sc, MCP

Tim Pelaksana

Ketua : Erick Yusuf
Sekretaris : Sukma Widyanti, M.Si

Anggota:

1. Prof.dr.Pratiwi P.Sudamono, Ph.D, Sp, M.K(K)
2. Ir.Emir Riza Avialda, M.B.A
3. Drs.Isroil Samihardjo, M.Def.Stud
4. Ubaidillah, S.P., M.S.E
5. Arie Mufti, S.T
6. Heru Susetyo, S.H, L.L.M, M.Si, Ph.D
7. Dr.-Ing.Widodo Setiyo Pranowo, S.T, M.Si
8. Teddy Rionald Bachtiar, S.T
9. Dr.Djoni Hartono
10. Dr. Ir. Susy Yunia R Sanie Herman, M.Si
11. Anang Kelana Jaya Umaedi, S.E, Ak, M.B.A
12. Dr.H.Faransyah Agung Jaya, S.E, M.S.F
13. Andi Rahmah, S.T, M.T
14. Gilang Satriya Adhi Utama, S.Si, M.B.A
15. Khoirunurrofik, Ph.D
16. Ir. Iwan Setiawan, M.M.
17. Suwardi Hagani, S.S
18. Dr.Chotib, M.Si
19. Mohamad Soleh Nurzaman, S.E, MDEc, Ph.D

B. Latar Belakang

Tingkat penyebaran yang tinggi dari wabah Covid-19 di DKI Jakarta dihadapkan pada kondisi terbatasnya ruang perawatan pasien isolasi mandiri di permukiman padat penduduk khususnya area yang didiami oleh warga dari kalangan ekonomi lemah. Oleh karena itu perlu diadakan solusi alternatif untuk mengantisipasi kurangnya ruang perawatan dan isolasi mandiri tersebut. Salah satu usulan alternatif yang bisa ditawarkan adalah melalui pembangunan Grha Sehat bagi masyarakat hunian padat yang mesti melakukan isolasi mandiri utk RT/RW di setiap Kelurahan atau Kecamatan yang sifatnya adaptasi non-permanen dengan memanfaatkan lapangan atau gedung publik seperti GOR, Balai Rakyat, maupun Gelanggang Remaja. Model Grha Sehat Mandiri yang dikembangkan tentunya mesti mengikuti standar dan persyaratan mengenai ruang perawatan penyakit menular yang berlaku.

Berdasarkan data resmi Pemda DKI Jakarta per tanggal 15 April 2020, sebanyak 2.447 kasus positif Covid-19, 1.424 (58%) masih menjalani perawatan, sedang 164 (7%) dinyatakan sembuh, 246 (10%) meninggal, 613 (25%) melakukan isolasi mandiri. Jumlah ODP 2.991, dan PDP 2.457, juga turut diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Mereka yang saat ini diidentifikasi sebagai Positif, dan PDP berat, sebagian masih di-

rawat di 8 dari 132 rumah sakit rujukan Covid-19 (KMK RI no. HK.01.07/MENKES/169/2020), juga di rumah sakit daerah maupun swasta non rujukan. Mereka yang diidentifikasi merupakan ODP dan PDP ringan, melakukan isolasi mandiri sambil terus dipantau perkembangan kesehatannya. Bagi ODP dan PDP ringan yang tinggal di permukiman padat dan miskin, dalam melakukan isolasi mandiri, mengalami kendala karena sulitnya menjaga jarak sosial.

Untuk mengantisipasi adanya lonjakan warga yang membutuhkan perawatan medis akibat terpapar virus Covid-19, serta memperhatikan kapasitas ruang perawatan di rumah sakit yang jumlahnya terbatas dan memperhatikan kerentanan penularan di permukiman padat, Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta (DRD DKI Jakarta), atas dasar studi ilmiah yang telah dilakukan, telah membuat 3 rancangan model Grha Sehat Mandiri Covid-19. Rancangan tersebut mengikuti standar higienis ruang perawatan, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, Pedoman Teknis Ruang Isolasi Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Tahun 2015, Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia.

Mengingat tingginya kebutuhan akan ruang isolasi mandiri Covid-19 dibandingkan dengan daya tampung yang tersedia di berbagai Puskesmas/ rumah sakit yang ada, kajian perancangan Grha Sehat Mandiri Covid-19 ini dapat menjadi panduan untuk diterapkan dari tingkat RT/RW hingga Kecamatan/Kota. Sebagai contoh, Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Gelanggang Olahraga yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta yang berada terpisah dari wilayah permukiman dan berada di pinggir jalan besar dan relatif dekat dengan RSUD, ini layak untuk dikonversikan sementara menjadi Grha Sehat Mandiri Covid-19.

Penampungan ini menggunakan model kolaborasi antara birokrasi, lembaga filantropi dan warga masyarakat (relawan kemanusiaan). Pemerintah daerah melalui perangkat dinas teknis diantaranya Dinas Kesehatan, Dispora, Dinas PPAPP, Dinas LH, Walikota-Camat- Lurah, memberikan kontribusi fasilitas publik yang dibutuhkan. Melalui skema pendanaan crowdfunding, lembaga filantropi, sektor bisnis dapat berkontribusi dalam penyediaan dana maupun inkind. Partisipasi masyarakat di lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan relawan (tagana, karang taruna, PKK, dan lainnya) yang memiliki pengetahuan cukup

dalam menangani bencana dan kesehatan. Karena berbasis masyarakat, maka menjadi penting peran serta masyarakat yang memiliki kesadaran penuh untuk turut serta secara aktif membantu menangani dan menyelesaikan pandemi ini. Kesadaran utama yang harus dipegang adalah bahwa menjadi pasien Covid-19 bukanlah aib dan bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, pasien tidak boleh dikucilkan dan diterlantarkan. Karenanya, keberadaan Grha Sehat Mandiri semacam ini perlu melibatkan seluruh unsur masyarakat yang didasari semangat gotong royong untuk merencanakan ruang agar Covid-19 ini bisa ditanggulangi penyebarannya.

C. Aturan Legal Formal

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07-MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07-MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)
- 4) Kepgub Nomor 563 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan aktivitas PSBB pada masa Transisi
- 5) Surat Tugas Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, No : SK/20/DRD-DKI/IV/20 tentang Tim Task Force Mitigasi Covid 19 Dewan Riset Daerah Provinsi DKI JAKARTA
- 6) Insekda no.66 tahun 2020 tentang Graha Sehat Mandiri Pasien Covid-19
- 7) Keputusan Camat no.75 tahun 2020 tentang Petugas operasional Grha Sehat Mandiri GOR Pademangan Camat Kecamatan Pademangan

D. Tujuan Kegiatan

Dalam rangka mendukung langkah-langkah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus memberikan solusi penanganan wabah Covid 19, kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) menjadi role model bagi penyediaan fasilitas isolasi mandiri untuk kawasan padat penduduk yang tingkat penyebaran wabah covid 19 nya masih tinggi.
- 2) menyediakan fasilitas isolasi mandiri dengan konsep Rumah Singgah yang memenuhi prota covid 19 untuk melayani warga tingkat RT/RW di Kecamatan yang padat penduduk dan warga menengah ke bawah,
- 3) memanfaatkan gedung-gedung milik Pemda yang tidak berfungsi akibat covid 19 ini menjadi Grha Sehat Mandiri dengan konsep Adaptasi Non-Permanen yang Reversible.

E. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian meliputi:

- 1) Pengembangan Konsep: Kajian Literatur, Peraturan dan Preseden, Penerapan Konsep Adaptasi Non Permanen, Konsep Rumah Singgah Sehat, Pengelolaan dan Pengoperasian, Inovasi Formulasi
- 2) Kriteria Perancangan: Subyek dan Kebutuhan Ruang, Detail Peralatan Setiap Ruang Yang Harus Dipenuhi, Ketentuan Penempatan Tempat Tidur, Opsi Material, Fasilitas Penanganan Limbah Medis

dan Non Medis, Penggunaan Disinfection Device Untuk Membasmi Virus, Kegiatan Yang Dapat Dilakukan Selama di Grha Sehat.

- 3) Studi Kasus GOR Pademangan (Kategori I) : Lingkungan Sekitar GOR Pademangan, Guideline dan Alur Penempatan Grha Sehat, Layout Grha Sehat, Pemisahan Toilet Nakes dan Pasien, Sistem Re-kayasa Udara, Dokumentasi Hasil Perancangan, Tata Kelola Grha Sehat Mandiri, Koordinator & Petugas Operasional di Grha Sehat Mandiri, Alur Penanganan Kasus Covid 19 di Grha Sehat Mandiri, Pademangan, Jakarta Utara

F. Metode Kajian

Metode Kajian dilakukan melalui Riset Tindakan (Action Research) yang diawali dengan Studi Literatur, Studi Peraturan dan Studi Preseden. Sesudah tahap analisis dibuatlah sebuah Model Perancangan Graha Sehat Mandiri di GOR Pademangan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Penerapan konsep Adaptasi Non-Permanen yang Bersifat Reversible pada Bangunan

Adaptasi Non-Permanen yang bersifat Reversible pada bangunan bisa diartikan sebagai upaya memodifikasi (Merekayasa) sebuah tempat yang sudah ada sebelumnya untuk bisa difungsikan sebagai tempat dengan fungsi baru untuk tujuan tertentu dan jangka waktu tertentu (sementara), dan jika sudah selesai digunakan bisa dikembalikan ke bentuk dan fungsi lama sebelumnya. Dalam konteks mitigasi pandemi, penerapan Adaptasi Non-Permanen yang bersifat Reversible adalah strategi alternatif dalam penyediaan bilik sehat berbasis masyarakat yang bersifat temporer.

Kajian-kajian mengenai manfaat Adaptasi Non-Permanen yang bersifat Reversible dinilai mampu memberikan tiga manfaat yaitu: aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi. Diharapkan dengan keberadaan Grha Sehat Mandiri ditempat tersebut juga dapat menggerakkan UMKM sekitarnya dalam pemenuhan kebutuhan operasional bilik sehat seperti catering, laundry, dan lainnya.

Pemilihan gedung olahraga sebagai lokasi kajian didasari oleh beberapa pertimbangan seperti, tingginya jumlah bangunan yang tak terpakai akibat pandemi, lokasi dan infrastruktur yang strategis dalam mengakomodasi warga yang membutuhkan perawatan. Beberapa kecamatan di Jakarta mempunyai GOR yang memenuhi kriteria untuk dikonversi segera menjadi Grha Sehat Mandiri tanpa merubah kondisi eksisting bangunan.

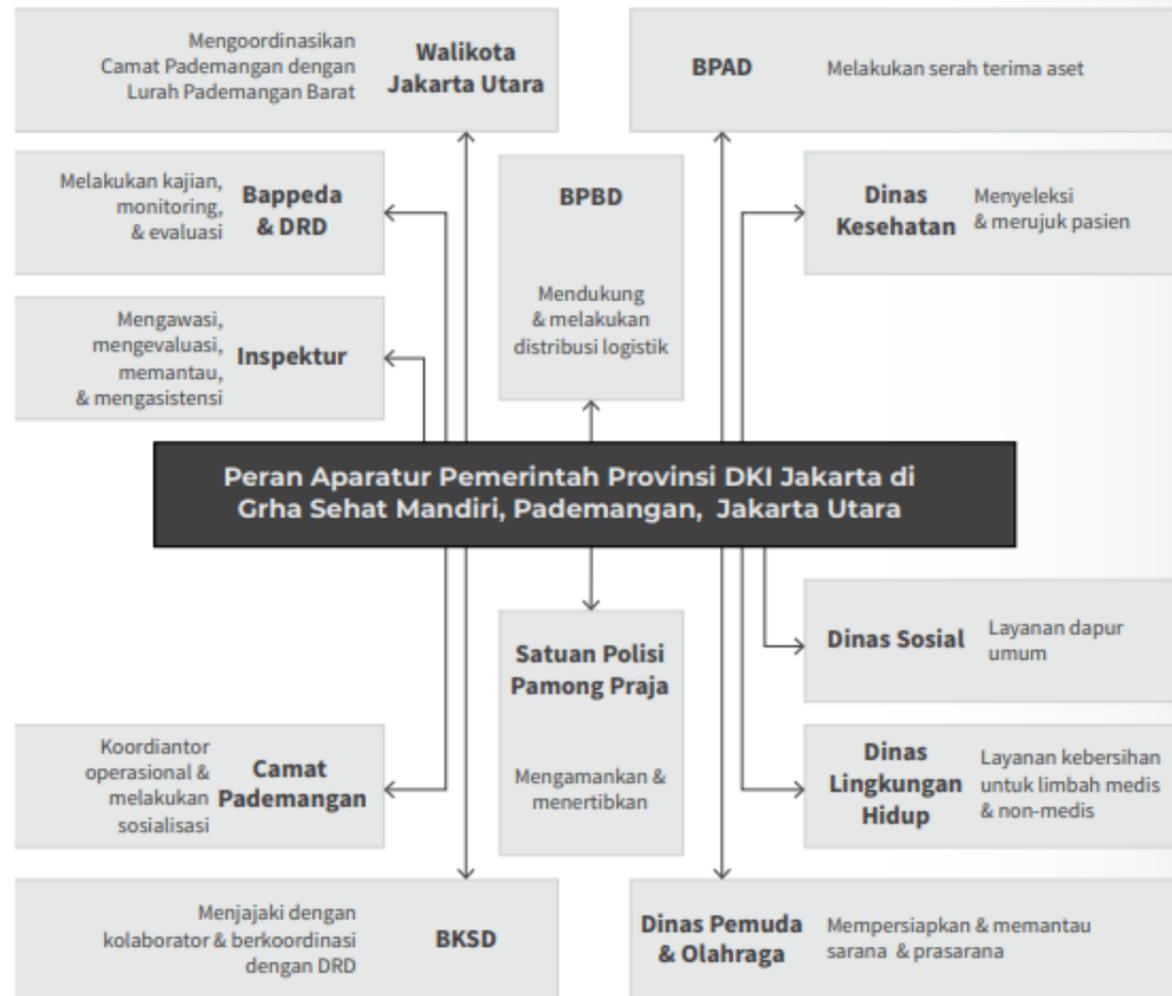
- 2) Penerapan Konsep Rumah Singgah Sehat

Grha Sehat Mandiri ini juga menerapkan konsep Rumah Singgah Sehat yang mempunyai arti seperti tempat isolasi mandiri sementara yang menghadirkan suasana seperti di rumah (kost) yang memungkinkan pasien merasa dekat dengan keluarga karena lokasinya di RT/RW pada kecamatan tempat pasien berhuni. Rumah singgah sehat ini dihadirkan pada daerah hunian padat yang mana penduduknya kesulitan melakukan isolasi mandiri karena minimnya ruang-ruang isolasi dalam rumah. Oleh karena itu, suasana di dalam Grha Sehat Mandiri ini juga mesti menghadirkan 'healing environment' yang dapat membantu penyembuhan pasien.

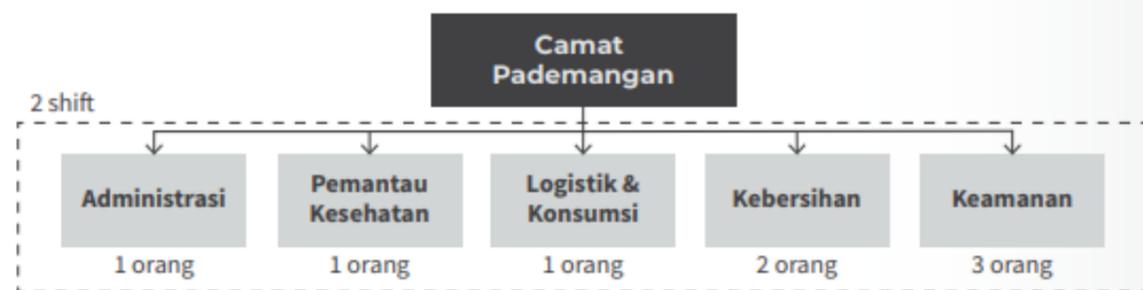
3) Pengelolaan dan Pengoperasian

Karena lokasinya di tingkat kecamatan, maka Camat berperan sebagai Bapak Rumah Singgah (Bapak Kost yang mengoperasikan, dan mensosialisasikan ke warga). Dan sebagai Bapak Asuhnya (yang mengelola) adalah Walikota. Pengelolaan dan Pengoperasian ini melibatkan berbagai ASN.

Tata Kelola Grha Sehat Mandiri, Pademangan, Jakarta Utara



Koordinator & Petugas Operasional di Grha Sehat Mandiri, Pademangan, Jakarta Utara



4) Luaran dalam Bentuk Inovasi

- Pembuatan Bilik Transisi sebagai pemisah dan filter secara ruang antara zona bersih dan zona terkontaminasi
- Rekayasa sirkulasi udara di dalam Grha Sehat Mandiri melalui system ATT ACT (Airborne Trapping nano-Technology for Anti Covid-19 Treatment)
- Pembuatan Bilik Isolasi Mandiri yang mudah, murah dan bisa dibongkar pasang dari bahan-bahan yang tersedia di lokasi sekitar dan dapat dikerjakan melalui Kerjasama UMKM.

5) Pokok Permasalahan

Adapun permasalahan yang ditemukan selama Riset antara lain adalah :

- Situasi darurat/bencana yang butuh aksi tanggap cepat belum sinkron dengan kecepatan koordinasi lintas instansi, disamping itu beragamnya informasi dan data yang ada selama pandemi memerlukan kehati-hatian dalam menganalisis situasi yang ada selama pandemi,
- Faktor Psikologis masyarakat yang menganggap Covid 19 sebagai aib dan mesti dijauhi. Pendekatan sosial menjadi penting, dan hal ini telah dilakukan dengan baik pada Kecamatan Pademangan,
- Larangan dari Pemerintah Pusat menggunakan GOR di DKI sebagai tempat Isolasi Mandiri (Desember 2020)

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jadwal Pembahasan Internal, Eksternal

Diawali dengan rapat internal Dewan Riset Daerah DKI Jakarta berupa Rapat Pleno tanggal 31 Maret 2020, diputuskan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus memberikan solusi penanganan wabah Covid 19. Desain rencana ideal tempat isolasi mandiri meliputi penanganan terhadap tiga hal yaitu: 1) udara, 2) orang, dan 3) barang. Berdasar telaah yang dilakukan oleh DRD DKI Jakarta, penularan Covid-19 bukan hanya melalui droplet saja tetapi dapat ditransmisikan lewat udara, oleh karena itu perlu ada upaya bagaimana membersihkan, mensterilkan udara di lingkungan tempat isolasi mandiri utamanya di bilik perawatan. Selanjutnya, mengatur koneksi antara orang yang dirawat dengan perawat (tenaga kesehatan, relawan) dengan cara membuat layout, pembagian zona, jalur-jalur. Lalu penanganan terhadap barang-barang, baik yang masuk maupun keluar dari tempat isolasi mandiri, sterilisasi terhadap barang-barang yang dipakai berulang, penanganan terhadap barang-barang sekali pakai (limbah). Lainnya, pemilihan material dan kelengkapan fasilitas di tempat isolasi mandiri dimaksudkan untuk lebih menciptakan healing environment. Diharapkan desain tempat isolasi mandiri dapat menjadi rujukan untuk pembuatan tempat serupa di wilayah lainnya.

Berdasarkan hasil kajian Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta pada rapat dengan para pimpinan Pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 30 April 2020, maka atas arahan Wakil Gubernur maka diputuskan untuk merealisasikan rencana tempat isolasi mandiri, lokasi yang dipilih adalah yang berada di wilayah pemukiman padat penduduk dan miskin di wilayah Kota Jakarta Utara yang terpapar Covid-19 parah.

Grha Sehat Mandiri yang dibuat DRD DKI Jakarta, memiliki tiga model rancangan.

Model 1, kapasitas 5-10 tempat tidur. Tata letak disesuaikan dengan keadaan ruang terbatas yang tersedia, desain mengambil contoh berupa lapangan bulutangkis. Dapat menggunakan bangunan tertutup yang ada ataupun lapangan terbuka. Panduan berupa tata letak tempat tidur, sirkulasi udara, opsi material partisi, pilihan jenis tenda, kelengkapan lainnya yang diperlukan, serta rencana anggaran.

Model 2, kapasitas 20-30 tempat tidur. Grha model ini didesain dengan ukuran yang lebih luas seukuran lapangan basket atau lebih, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai untuk melayani jumlah pasien yang banyak.

Model ke 3, kapasitas 80-100 tempat tidur. Bilik direncanakan seukuran lapangan sepak bola, fasilitas pendukung yang lengkap, mampu untuk menangani pasien dalam jumlah besar.

Berdasarkan kondisi di lapangan, sebagian besar GOR di tingkat Kecamatan di Jakarta, rata-rata bisa menampung 20 – 30 bilik sederhana atau kelipatannya, sehingga ini sesuai dengan Model 2.



Dukungan multi pihak



Ruang isolasi pasien



Wakil Gubernur DKI Jakarta sedang meninjau ruang isolasi pasien



Bilik Isolasi Pasien

Pada bulan Juni 2020 telah selesai dilaksanakan pembangunan 20 unit bilik dengan diberi nama Grha Sehat Mandiri, Pademangan. Dewan Riset Daerah DKI Jakarta melanjutkan hasil inovasi daerah berupa kajian perencanaan bilik sehat untuk isolasi mandiri dan perawatan darurat untuk pasien Covid-19 di GOR Pademangan, Jakarta Utara, sebagai wilayah yang jumlah kasusnya masuk dalam 10 kelurahan tertinggi di DKI Jakarta, diperuntukan bagi warga yang masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan untuk melakukan isolasi mandiri.

Kegiatan pembangunan Grha Sehat Mandiri ini telah dikoordinasikan melalui Wakil Gubernur, Asisten Pembangunan, Bappeda, Biro Kerja Sama Daerah, Walikota Jakarta Utara, Camat Pademangan dan seluruh perangkatnya, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, serta Dinas Lingkungan Hidup. Peninjauan kesiapan telah dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak A. Riza Patria pada tanggal 3 Juli 2020. Saat ini sedang diproses pembuatan Instruksi Sekretaris Daerah dengan dimotori oleh Biro KSD, untuk jadi pedoman dan dasar pelaksanaan operasional Grha Sehat Mandiri ini. Saat ini, telah tersedia 30 unit bilik beserta tempat tidur dan perlengkapan kebutuhan pribadi seperti lemari, meja dan kursi. Ruangan dengan standard kesehatan udara telah dipenuhi dalam bentuk pemasangan ATTACT, pembersih udara dengan teknologi nanobubble.

Penambahan jumlah pasien yang terus meningkat hingga kini, membuat pemerintah membuat kebijakan penambahan kapasitas wisma atlet untuk isolasi mereka yang telah diidentifikasi positif dan melarang warga melakukan isolasi di rumah sendiri atau rumah isolasi di lingkungan. Namun ternyata peningkatan jumlah hingga ribuan per hari tidak dapat ditampung sepenuhnya, dan isolasi di rumah kembali diperbolehkan. Sebagai alternative lain pemerintah pusat menyediakan fasilitas lain untuk pasien tidak bergejala berupa hotel berbintang 3 berkapasitas hingga 4100 kamar. Sementara itu pada September 2020 Pemerintah Daerah (DKI Jakarta) juga menyediakan 3 lokasi isolasi dengan total mencapai 166 kamar yaitu di Graha Wisata TMII 48 kamar, Jakarta Islamic Center (JIC) 52 kamar, dan Graha Wisata Ragunan berjumlah 66 kamar. Gelanggang Olah Raga, termasuk dimana Grha Sehat Mandiri Pademangan, menjadi pilihan terakhir setelah alternative lain sudah penuh dan tidak mampu lagi menampung pasien OTG.

B. Institusi/Lembaga terkait dalam Pembahasan

Lembaga yang terlibat dalam studi maupun pembangunan Grha Sehat Mandiri ini terdiri atas berbagai pihak baik Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Filantropi dan Media Massa. Dalam rangka melibatkan unsur masyarakat dan memberdayakan UMKM, maka Tim Gugus Tugas Mitigasi Covid 19 Dewan Riset Daerah DKI Jakarta juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan Yayasan Al Fatah Pademangan, sebagai unsur masyarakat, untuk menjalankan pembangunan dan pengadaan barang kebutuhan Grha Sehat Mandiri Pademangan. DRD DKI Jakarta bertindak sebagai pengawas untuk memastikan standard dan kualitasnya.

Pemerintah:

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta BPBD Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Suku Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
- Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
- Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
- Puskesmas Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
- Gelanggang Olahraga Jakarta Utara
- PD Sarana Jaya

Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset:

- Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Nano Center Indonesia

Swasta:

- PT. Emerson Asia Pacific
- Yayasan Tiara
- CSR Forum
- Kitabisa.com
- Human Initiative
- Wahana Visi
- Yayasan Al Falah

Media Massa:

- Berita Jakarta
- Jakarta Post
- Detik
- Republika
- Kumparan
- Voice of Islam
- JakTV
- KompasTV

Jakarta Research Council to set up COVID-19 isolation shelter in North Jakarta

Wed, April 29, 2020

The Jakarta Research Council (DRD) will set up an isolation center for people with COVID-19 symptoms in Pademangan, North Jakarta, to ease the burden on overcrowded reference hospitals in the capital city. The project, the first of its kind in the capital, would be fully funded and sustained by NGOs, non-profit organizations and the community. DRD head Kemas Ridwan Kurniawan said the shelter, to be set up soon, would be designated for people who were categorized as patients under surveillance (PDP) and persons under monitoring (ODP). "ODP and PDP typically have mild symptoms. People who tested positive for COVID-19 or those who have severe symptoms would be transferred to the hospitals," Kemas said in a virtual press conference on Wednesday.

He explained that the council has prepared three shelter prototypes for the project that could accommodate up to 100 people. The shelter could be built on public spaces such as mosques, child-friendly public spaces (RPTRA), sports halls or badminton fields. "All prototypes were designed based on isolation shelters in Wuhan, China, and in the United Kingdom. The facilities will be equipped with disinfection chambers, transition rooms, nurse stations and waste management centers to make sure they do not become new sources of virus transmissions for the community," he said, adding that the shelters would be non-permanent so the equipment could be reused after the isolation process was over. Kemas expressed hope that the pilot project in Pademangan would inspire community members and NGOs to create similar facilities. "To operate the shelter, each community can cooperate with local community health centers and health agencies to provide healthcare personnel and with non-profit organizations for funding and volunteers," he said.

Sukma Widyanti of the same organization said the shelter was needed in Pademangan considering residents in the area had been struggling to self-isolate and maintain social distancing, even though the area had been categorized as a red zone due to a high COVID-19 infection rate. "It's a difficult situation. More than 50 residents in Pademangan have tested positive for COVID-19, but they can't practice social distancing because a lot of them live in densely populated neighborhoods," she said. "Besides many COVID-19 reference hospitals are overcrowded. Meanwhile, a lot of residents are unable to stay at home because they live in densely populated areas and slums. This community-based isolation shelter could be a solution to that problem."

Kolaborasi DRD, Pemprov DKI Sediakan Bilik Isolasi Mandiri Berpenyaring Udara Anti-COVID 19

Jumat, 03 Juli 2020

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta dan sejumlah pihak menyiapkan bilik isolasi mandiri bagi warga yang terinfeksi Coronavirus Disease atau COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) berkesempatan meninjau langsung penyediaan bilik isolasi mandiri yang antara lain berada di GOR Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (3/7/2020). Turut membersamai Walikota Administrasi Jakarta Utara, Pengurus DRD DKI Jakarta, Kadispora DKI Jakarta, Tim PT. Nanobubble Karya Indonesia, Camat dan Lurah setempat.

"Pagi ini saya melanjutkan kunjungan untuk meninjau kesiapan beberapa unit kegiatan. Di antaranya tadi mengecek GOR Pademangan yang sedang dipersiapkan Graha Sehat untuk ruang isolasi mandiri bagi warga di Pademangan dan sekitarnya. Dikerjakan oleh DRD (DKI Jakarta) bekerja sama dengan semua pihak; dibantu oleh Walikota, Camat, Lurah dan masyarakat juga pihak swasta bekerja sama (dan) berkolaborasi sosial," ujar Ariza di Kantor Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Di dalam GOR Pademangan tengah dipersiapkan sebanyak 20 bilik isolasi mandiri beserta kelengkapannya. Bilik ini nantinya diperuntukan bagi warga Pademangan dan sekitarnya yang terinfeksi Coronavirus Disease dan melakukan isolasi/karantina mandiri. Di sisi barat GOR diperuntukan bagi pasien laki-laki dan sisi timur untuk pasien perempuan.

Tersedia pula Mesin Purifikasi Udara Anti COVID-19 Nano Teknologi hasil karya inovasi DRD DKI Jakarta bekerja sama dengan PT. Nanobubble Karya Indonesia. Mesin penyaring udara tersebut bernama Nanobubble-ATTACT. Selain itu, fasilitas-fasilitas seperti toilet khusus pasien dan petugas (terpisah), wastafel/tempat cuci tangan di beberapa sudut, serta fasilitas penunjang lainnya tengah dipersiapkan juga dengan baik.

"Sudah disiapkan ada 20 (bilik) nanti secara bertahap agar bertambah. Dan nanti GOR-GOR lain di seluruh Jakarta juga akan dipersiapkan seperti itu. Tadi ada alat nanobubble/purifier (mesin purifikasi udara anti-COVID-19 nano teknologi) yang sangat baik sehingga bisa menyedot/mematikan virus dan mengembalikan udara dalam kondisi yang sehat," terangnya.

Penyediaan fasilitas bilik isolasi mandiri COVID-19 beserta fasilitas penunjang tersebut dapat terbentuk atau kolaborasi dengan berbagai pihak baik masyarakat umum, pihak swasta, maupun komunitas atau lembaga sosial masyarakat. Meski demikian, Ariza tetap berpesan agar segenap lapisan masyarakat di Ibu Kota Jakarta tetap melakukan tindakan pencegahan (preventif) agar warga Jakarta terhindar dari wabah COVID-19, sehingga tidak perlu menetap di bilik isolasi.

"Jadi jangan sampai kita merasa bahwa suasana ini sudah normal. Ini belum normal. Makanya Pak Gubernur kemarin dalam rapat memutuskan kita melanjutkan PSBB Transisi di Fase Pertama ini (diperpanjang). Artinya pelonggaran tetap ada, namun tetap 50 persen. Dan kita minta warga terus berjaga, berhati-hati, patuh, dan disiplin," tegasnya. Ariza turut mengapresiasi berbagai persiapan yang dilakukan dalam penyediaan bilik isolasi mandiri COVID-19 di GOR Pademangan.

"Alhamdulillah tadi persiapannya cukup baik. Dalam waktu dekat nanti Pak Gubernur akan meresmikan sehingga dapat digunakan. Semua produknya adalah produk dalam negeri, partisipasi semua pihak. Dibuat sedemikian profesional, sehat. InsyaAllah warga (yang diisolasi mandiri) nyaman, bahkan mungkin betah berada di GOR Pademangan," tandasnya.

C. Anggaran Kegiatan

Biaya Pelaksanaan Kegiatan Task Force ini dibebankan kepada Anggaran DRD Tahun 2020 serta sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Anggaran pembangunan Grha Sehat Mandiri Pademangan ini tidak berasal dari anggaran Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, melainkan berasal dari dana masyarakat yang dikumpulkan secara mandiri. Kolaborasi telah diwujudkan dalam bentuk bantuan berupa sumbangan uang dari Bazis DKI Jakarta (Rp. 100.000.000,-) dan Yayasan Rumah Zakat (Rp. 25.000.000,-), PT. Emerson Asia Pacific (Rp. 10.000.000) serta sumbangan berupa barang dari berbagai pihak.

Berikut ini adalah laporan keuangan penerimaan dan penggunaan dana masyarakat :

| No. | Deskripsi | Jumlah |
|----------|--|-----------------------|
| A | Penerimaan | |
| 1 | Sumbangan dari Yayasan Rumah Zakat Indonesia | Rp 25.000.000 |
| 2 | Sumbangan dari Baznaz Bazis | Rp 100.000.000 |
| 3 | Sumbangan dari Emerson Asia Pasific | Rp 10.000.000 |
| | | |
| | Total Penerimaan | Rp 135.000.000 |
| B | Pengeluaran | |
| 1 | Persiapan/Koordinasi | Rp 1.000.000 |
| 2 | Pengadaan Mesin ATTACT + transportasi | Rp 41.250.000 |
| 3 | Pengadaan Partisi R8 + pemasangan | Rp 33.000.000 |
| 4 | Biaya Pembuatan Mock UP BS | Rp 1.500.000 |
| 5 | Biaya 20 Bilik Sehat | Rp 28.755.000 |
| 6 | Pengadaan Perlengkapan BS | Rp 11.405.000 |
| 7 | Biaya pengadaan 10 bilik | Rp 10.000.000 |
| | Biaya lain-lain (transfer) | Rp 58.500 |
| | Total Pengeluaran | Rp 126.968.500 |
| | SALDO | Rp 8.031.500 |

| No | Tipe Barang | Jumlah Unit | Sumber |
|----|-------------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | Ac split | 2 unit | GOR |
| 2 | Ac standing | 2 unit | Walikota Jakut |
| 3 | Bilik tenda | 30 unit | Sarana Jaya |
| 4 | Bed | 30 unit | Sarana Jaya |
| 5 | Hand washer | 3 unit | Human Initiative |
| | | 2 unit | Wahana Visi |
| | | 1 unit | Walikota Jakut |
| 6 | Hazmat | 40 set | Yayasan Tiara |
| 7 | Disinfectan chamber | 1 unit | CSR Forum |
| 8 | APD (hazmat, masker, boots, google) | | Biro KSD |
| 9 | APD (hazmat, masker, boots, google) | | Kitabisa.com |
| 10 | ATTACT air purifier Nano Bubble | 4 unit | DRD Jakarta |
| 11 | Bilik pasien | 20 unit | DRD Jakarta |
| 12 | Bilik transisi pasien | 1 unit | DRD Jakarta |
| 13 | Lemari Plastik 2 susun | 20 unit | DRD Jakarta |
| 14 | Ember Bertutup | 20 unit | DRD Jakarta |
| 15 | Sprei putih | 20 unit | DRD Jakarta |
| 16 | Sarung bantal | 20 unit | DRD Jakarta |
| 17 | Bantal | 20 unit | DRD Jakarta |
| 18 | Gayung | 20 unit | DRD Jakarta |
| 19 | Kursi Plastik | 20 unit | DRD Jakarta |
| 20 | Keranjang pakaian kotor | 20 unit | DRD Jakarta |
| 21 | Tempat sampah bertutup | 20 unit | DRD Jakarta |
| 22 | Sendok | 2 lusin | DRD Jakarta |
| 23 | Garpu | 2 lusin | DRD Jakarta |



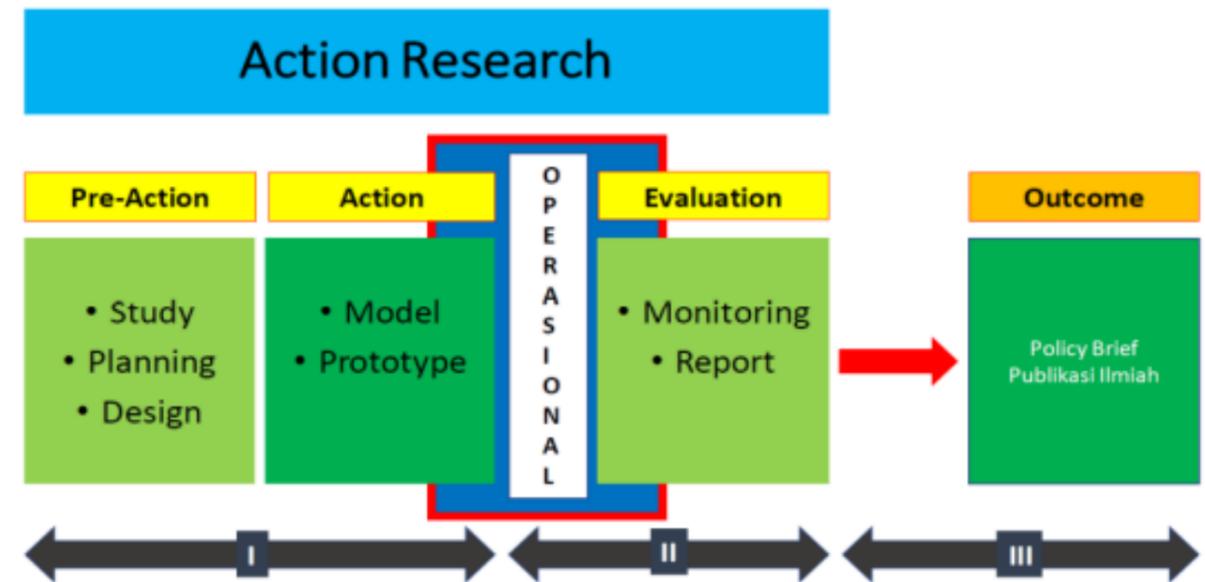
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kajian Perancangan Grha Sehat Mandiri telah dimulai sejak bulan Maret 2020. Pembuatan Prototipe Grha Sehat Mandiri yang terletak di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dilaksanakan pada Mei – Juli 2020.

E. Pelaksanaan Kegiatan Kajian

Adapun Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Riset Tindakan dibagi menjadi tiga tahap yang meliputi:

- Tahap I: Pra-Aksi (Persiapan) dan Aksi
- Tahap II: Operasional dan Evaluasi
- Tahap III: Outcome dalam bentuk Policy Brief dan Publikasi Ilmiah



III. REKOMENDASI

Atas dasar kebutuhan untuk segera mengoperasikan Grha Sehat Mandiri Pademangan ini, maka dibutuhkan beberapa langkah ke depan :

- A. Pemerintah Daerah melengkapi kebutuhan berupa penyediaan SDM (nakes, petugas keamanan, petugas kebersihan) dan kebutuhan pangan bagi pasien
- B. Menyusun SOP kesehatan untuk isolasi pasien, penggunaan dan perawatan kebersihan agar warga yang tinggal disana dapat melakukan isolasi mandiri secara baik.
- C. Melakukan peresmian oleh Gubernur DKI Jakarta
- D. GSM Pademangan juga dapat dimanfaatkan bagi penanganan bencana lainnya seperti kebakaran dan banjir

IV. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat, agar dapat digunakan sebaik-baiknya dan pembangunan pilot project ini (action research) dapat digunakan sebagai percontohan (prototype) ditempat lain yang membutuhkan di Jakarta khususnya dan wilayah lain di Indonesia. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

02

Airborne nano-Trapping Technology for Anti COVID-19 Treatment

Kolaborasi DRD DKI Jakarta dengan LIPI

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah kasus penularan COVID-19 yang kian meningkat di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Perkembangan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia termasuk sangat signifikan sejak kasus positif pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang hanya sebanyak 2 kasus hingga kasus positif yang diumumkan pada tanggal 9 September 2020 sebanyak 203.342 kasus, dimana DKI Jakarta menyumbang kasus positif sebanyak 27.153 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang berkelanjutan, WHO menginformasikan bahwa virus COVID-19 bisa menyebar melalui udara (airborne) setelah droplet dan aerosol. Media penyebaran udara (airborne) ini memunculkan klaster baru penyebaran seperti klaster lingkungan kerja, khususnya lingkungan kerja dalam ruangan tertutup. Tercatat per 28 Juli 2020, kasus positif COVID-19

dari lingkungan kerja perkantoran di Jakarta dinyatakan mencapai angka sebanyak 459 orang, dimana ada penambahan kasus sebanyak 416 orang sejak 4 Juni 2020 yang hanya tercatat sebanyak 43 orang (Aditya Eka Prawira, 2020). Penambahan kasus positif di lingkungan kerja ini masih bisa terus bertambah ke depannya. Oleh karena itu, perlu juga dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat penyebaran dan penularan infeksi COVID-19 seperti kualitas udara dan sirkulasi udara.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.5/2018 tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (K3L) serta Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 216/2020 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam upaya preventif guna meningkatkan kualitas lingkungan kerja.

Namun itu dirasa belum cukup, untuk mengoptimalkan langkah pencegahan penularan yang sudah ada, diperlukan Pedoman Standar Kesehatan Lingkungan Kerja yang memuat tentang Protokol Pencegahan Infeksi COVID-19 berdasarkan kajian dan pedoman yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, WHO dan ILO dan dimuat dalam peraturan kepala daerah agar memiliki legalitas yang jelas. Selain itu, diperlukan juga kajian mengenai penguatan infrastruktur teknologi dalam upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19 di lingkungan kerja. Berbagai teknologi buatan dalam negeri pun telah banyak dikembangkan, salah satunya ialah Airborne Trapping nano-Technology for Anti COVID-19 Treatment (ATTACT) yang merupakan produk hasil kerja sama pengembangan dari peneliti Pusat Penelitian Metalurgi dan Material - LIPI, Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta serta PT. Nanobubble Karya Indonesia.

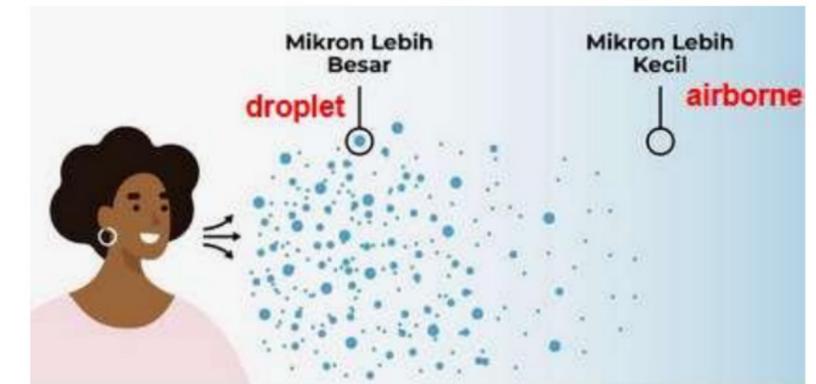
II. PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Virus ini ditransmisikan dari hewan ke manusia (zoonosis) yang hingga sekarang belum diketahui hewan apa yang menjadi sumber penularan COVID-19. Gejala umum infeksi COVID-19 adalah gangguan pernapasan akut seperti sesak nafas, batuk dan demam dengan masa inkubasi rerata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang hingga 14 hari. Gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam hingga kesulitan bernafas yang ditandai dengan adanya infiltrate pneumonia yang luas di kedua paru-paru pada hasil rontgen. Kasus COVID-19 dengan gejala berat dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, dan sindrom pernafasan akut yang kemudian menyebabkan kematian (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Rute penularan COVID-19 yang terjadi di lingkungan sekitar adalah dari droplet dan aerosol yang membawa virus ke udara dari hidung atau mulut orang yang terjangkit. Droplet dapat

masuk ke tubuh orang lain melalui mata, hidung atau mulut saat orang yang terjangkit batuk atau bersin. Droplet yang berisi virus ini pun mampu menempel pada permukaan benda dan dapat bertahan hidup di permukaan benda selama beberapa jam hingga beberapa hari. Apabila ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontami-

na dapat bertahan lama pada tisu selama 3 jam, pada kayu & kain selama 2 hari, pada kaca & uang kertas selama 4 hari, serta pada stainless steel & plastik selama 7 hari. Bahkan pada lapisan luar masker bedah, virus corona mampu bertahan sampai hari ke-7. Penelitian ini melanjutkan dari penelitian sebelumnya, yang diterbitkan 17



nasi droplet tersebut kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut, maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

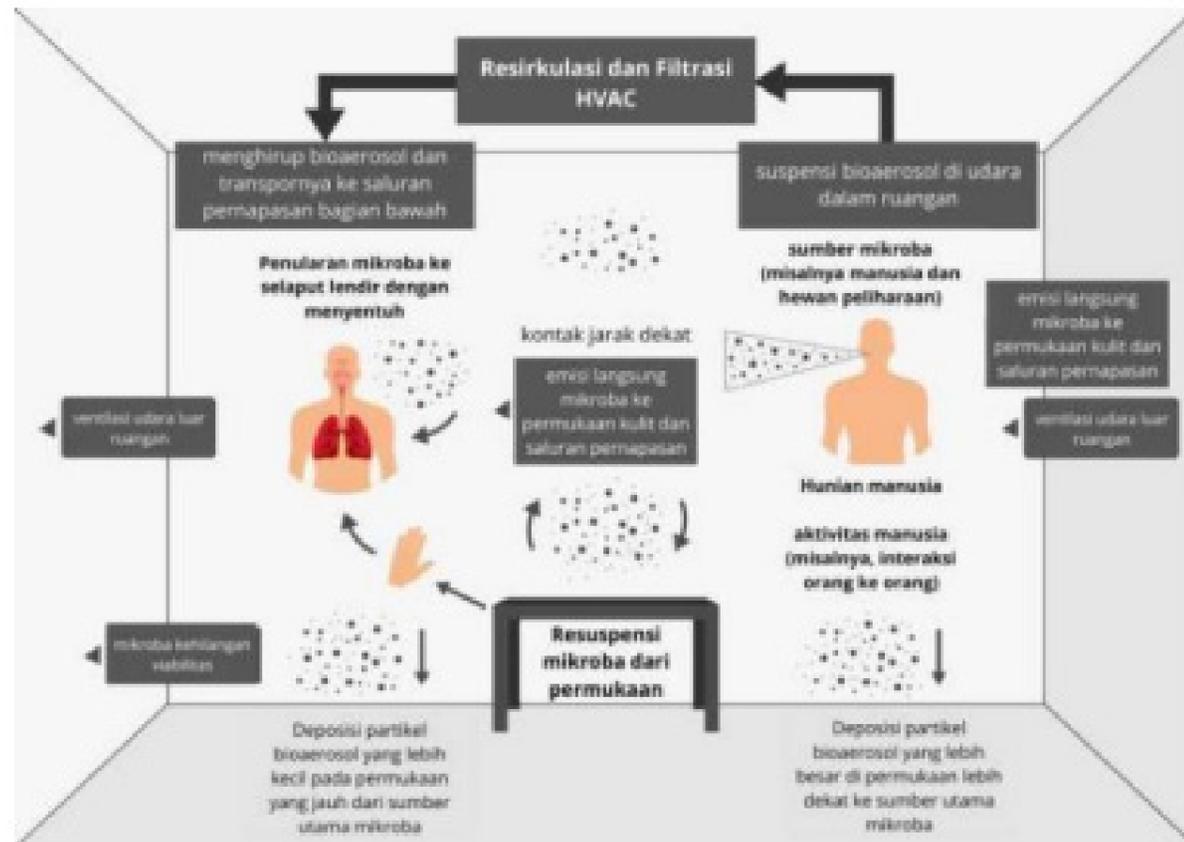
Melansir dari Business Insider, para peneliti telah menguji rentang hidup virus COVID-19 di ruangan dengan suhu mencapai 71 derajat Fahrenheit dengan kelembaban relatif 65%. Didapatkan hasil bahwa virus coro-

Maret di New England Journal of Medicine, menyebutkan virus dapat hidup hingga empat jam pada tembaga, satu hari di kardus, dan hingga tiga hari pada plastik dan stainless steel. Itu diujicobakan pada ruangan 70 derajat Fahrenheit dengan kelembaban relatif 40% (Arif Budiansyah, 2020).

Seiring dengan penelitian lanjut tentang COVID-19, WHO menginformasikan bahwa virus ini juga bisa menyebar melalui udara (airborne), dimana penularan melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran agen yang disebabkan oleh aerosol. Partikel aerosol yang berukuran kurang dari 5 mikron mampu menyebar di udara dalam wak-

Di Jakarta sendiri, berdasarkan data AirVisual per tanggal 30 Juli 2020, kualitas udaranya menunjukkan nilai air quality index (AQI) sebesar 189, dan kualitas udara ibukota dinyatakan tidak sehat. Sumber utama pemicu polusi udara ini berasal dari kendaraan bermotor, sektor industri, dan aktivitas masyarakat (A. Kristianto, 2020).

(CNN Indonesia, 2020). Kondisi perkembangan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia termasuk signifikan sejak kasus positif pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, yakni 2 kasus positif. Dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020), Indonesia mencatat penambahan kasus baru COVID-19 dengan



tu 3-8 jam sehingga dapat terhirup oleh orang lain. Dengan demikian, orang yang rentan dapat menghirup aerosol dan dapat terinfeksi jika aerosol itu mengandung virus dalam jumlah cukup untuk menyebabkan infeksi ke orang lain (WHO, 2020). Faktor ini dapat diperparah dengan kualitas udara pada area tersebut.

Pada pertengahan bulan Juli, Gugus Tugas COVID-19 menyatakan bahwa penambahan kasus baru COVID-19 banyak berasal dari lingkungan kerja, terlebih pada lingkungan kerja yang memiliki sirkulasi udara yang buruk serta masih kurang disiplin dalam menjaga jarak dan menggunakan masker

jumlah kasus di kisaran 1000-an per hari pada tanggal 9 Juni 2020, yakni sebanyak 1042 kasus. Dan hingga pada tanggal 12 Agustus 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak 130.718 kasus dengan sebaran kasus sejumlah 27.153 (20,8%) di DKI Jakarta.

Mengenai standar kualitas lingkungan kerja, Pemerintah Republik Indonesia telah mengaturnya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (K3L). Selain itu, pemerintah juga telah menyusun protokol terkait pencegahan penularan infeksi Covid-19 di tempat kerja melalui Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 216 Tahun 2020, dimana salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja adalah dengan meningkatkan sirkulasi udara pada ruang kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan ventilasi udara, sinar matahari yang masuk ke ruangan kerja, serta pembersihan filter AC.

Namun, hal itu dirasa belum cukup karena masih kurangnya edukasi dan kesadaran pekerja akan pentingnya kesehatan lingkungan kerja. Sehingga diperlukan kajian untuk menyusun standar kesehatan lingkungan kerja yang juga memuat protokol pencegahan infeksi di lingkungan kerja secara lebih mendalam serta merekomendasikan teknologi yang komprehensif dan termutakhirkan untuk meningkatkan standar kualitas lingkungan kerja dalam upaya pencegahan infeksi COVID-19.

III. METODOLOGI

Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui dua teknik yaitu kajian literatur dan lapangan. Kajian literatur dilakukan dengan membaca buku, jurnal dan lainnya mengenai upaya meningkatkan standar kualitas lingkungan kerja sedangkan studi lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap akademisi dan ahli mengenai teknologi mutakhir terkait upaya pencegahan infeksi Covid-19. Literatur yang dikaji meliputi:

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (K3L)
- Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 216 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja
- Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Transmisi SARS-CoV-2 – implikasi untuk kewaspadaan pencegahan infeksi: Pernyataan keilmuan dari World Health Organization (WHO)
- Daftar Pencegahan dan Mitigasi COVID-19 di Tempat Kerja yang diterbitkan oleh International Labour Organization (ILO).

IV. TELAHAH LITERATUR & TEMUAN

- Per 28 Juli 2020, data kasus positif COVID-19 dari lingkungan kerja perkantoran di Jakarta dinyatakan mencapai angka sebanyak 459 orang, dimana ada penambahan kasus sebanyak 416 orang sejak 4 Juni 2020 yang hanya tercatat sebanyak 43 orang. Rincian sebaran kasusnya adalah 139 kasus di klaster Kementerian, 25 kasus di klaster Badan/lembaga, 141 kasus di klaster lingkungan Pemda DKI Jakarta, 4 kasus di klaster Kepolisian, 35 kasus di klaster BUMN, dan 92 kasus di klaster swasta (Aditya Eka Prawira, 2020).

- Jumlah kasus positif dari lingkungan kerja perkantoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni hampir sepuluh kali lipat dari jumlah kasus positif yang pertama kali tercatat di lingkungan kerja perkantoran. Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di lingkungan kerja perkantoran masih bisa terjadi, sehingga perlu diperhatikan lebih pada prosedur kesehatan kerja agar bisa mencegah penularan infeksi virus COVID-19 di lingkungan kerja, dimana protokol kesehatan perlu diberlakukan lebih ketat dan disiplin.

B. Menurut data AirVisual, kualitas udara di Jakarta mengalami tren buruk selama beberapa minggu terakhir, dimana nilai air quality index cenderung di angka 150 ke atas yang mana termasuk dalam kualitas udara yang tidak sehat. Tren buruk ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas produktif di lingkungan kerja.

- Sejak WHO menyatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 bisa melalui udara (airborne), maka kualitas udara suatu area/wilayah perlu diperhatikan. Ruangan tertutup yang memiliki sirkulasi udara yang buruk dapat mempercepat penyebaran virus COVID-19 dan meningkatkan risiko infeksi antarindividu yang berada dalam satu ruangan yang sama. Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan infeksi COVID-19 di lingkungan kerja, diperlukan juga pemanfaatan alternatif teknologi yang bisa meningkatkan kualitas udara di lingkungan kerja itu sendiri.

C. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) telah mengkaji bahwa COVID-19 ditularkan melalui kontak dekat dan droplet, bukan melalui transmisi udara. Orang-orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunci penerapan di pelayanan kesehatan dan masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat meliputi:

- 1) Melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor;
- 2) Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut;
- 3) Penerapan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah;
- 4) Pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
- 5) Menjaga jarak (minimal 1 m) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.

D. International Labour Organization (ILO) telah menerbitkan Daftar Pencegahan dan Mitigasi COVID-19 di Tempat Kerja sebagai upaya menyediakan tindakan praktis yang dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 di tempat kerja. Daftar ini menyediakan langkah yang berbeda-beda dalam menangani masalah-masalah berikut:

- 1) Jarak fisik. Misalnya: Menilai risiko interaksi antara pekerja, kontraktor, pelanggan dan pengunjung dan langkah-langkah penerapan untuk mengurangi risiko ini; pengorganisasian kerja dengan cara yang memungkinkan jarak fisik antara orang-orang; ketika memungkinkan harus menggunakan panggilan telepon, surat elektronik atau rapat virtual dibandingkan dengan pertemuan tatap muka; memperkenalkan jadwal kerja untuk menghindari konsentrasi besar pekerja di tempat kerja pada satu waktu tertentu.

- 2) Higienitas. Sebagai contoh: Menyediakan disinfektan untuk tangan termasuk penyaniitasi tangan dan tempat-tempat yang mudah diakses untuk mencuci tangan dengan sabun dan air; mempromosikan budaya mencuci tangan; mempromosikan higienitas pernapasan yang baik di tempat kerja (misalnya menutup mulut dan hidung dengan siku yang menekuk atau dengan tisu saat batuk atau bersin).

- 3) Kebersihan. Misalnya: Mempromosikan budaya untuk membersihkan permukaan meja dan tempat kerja secara teratur, gagang pintu, telepon, papan tombol dan benda kerja dengan disinfektan dan harus secara rutin memberikan disinfektan untuk area umum seperti kamar kecil.

- 4) Pelatihan dan Komunikasi. Misalnya: Melatih manajemen, pekerja dan perwakilan mereka tentang langkah-langkah yang dapat diadopsi untuk mencegah risiko paparan terhadap virus dan tentang bagaimana bertindak dalam kasus infeksi COVID-19; pelatihan tentang penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan alat pelindung diri yang benar; memelihara komunikasi yang teratur dengan pekerja untuk memberikan informasi terkini terkait situasi di tempat kerja, wilayah atau negara; menginformasikan pekerja tentang hak mereka untuk menyingkir dari situasi kerja yang menimbulkan bahaya serius bagi kehidupan atau kesehatan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan segera memberitahu atasan langsung terkait situasi tersebut.

E. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, Presiden memberikan instruksi kepada para Gubernur untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur yang memuat ketentuan tentang detail protokol kesehatan yang meliputi perlindungan kesehatan individu dan masyarakat, serta tempat dan fasilitas umum yang didalamnya termasuk lingkungan kerja perkantoran, usaha & Industri.

- Dengan adanya instruksi ini, diharapkan Gubernur bisa mengambil langkah untuk menyusun Pedoman Standar Kesehatan Lingkungan Kerja yang memuat tentang Protokol Pencegahan Infeksi di Lingkungan Kerja lebih terperinci dan dituangkan dalam peraturan gubernur.

V. ANALISIS

Di tengah situasi dan kondisi penyebaran virus COVID-19 saat ini, berbagai teknologi telah dikembangkan terkait dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19 serta meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Beberapa teknologi yang telah digunakan untuk mengatasi pencegahan COVID-19, antara lain:

- A. Hand Protector yang berbentuk seperti tongkat kecil yang berfungsi untuk memencet tombol lift, membuka pintu, memencet tombol dispenser, dan lain sebagainya;
- B. Coating/pelapis spray disinfektan yang dapat digunakan dengan cara menyemprotkan permukaan seperti meja, gagang pintu, dan lain-lain;
- C. Cat dengan formulasi anti microbial yang merupakan inovasi terkini terkait pelapisan permukaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap droplet. Inovasi ini mampu diaplikasikan pada tembok-tembok rumah;
- D. Teknologi sterilisasi dengan metode pencahayaan seperti Lampu UV-C skala ruangan yang digunakan untuk sterilisasi ruang kerja, keluarga bahkan ruangan umum. Namun biasanya panjang gelombang cahaya yang digunakan pada rentang UV-C yang sayangnya bersifat karsinogenik terhadap tubuh manusia;

- E. Aerosol desinfektan yang digunakan untuk sterilisasi ruangan mampu mengatasi penyebaran virus dan/atau bakteri melalui udara (airborne). Namun biasanya menggunakan bahan kimia yang bersifat toksik bagi tubuh manusia. Teknologi tersebut banyak digunakan oleh masyarakat umum karena mudah dan cukup simpel. Sehingga teknologi tersebut hanya bisa digunakan ketika ruangan kosong dan tidak boleh ada aktivitas didalamnya;
- F. Teknologi purifikasi udara. Beberapa teknologi ini sudah umum digunakan oleh masyarakat khususnya purifikasi udara dengan menggunakan filter HEPA (High- Efficiency Particulate Air). Filter ini mampu untuk menyaring polutan udara seperti debu, asap rokok dan polutan lainnya. Tidak hanya itu, beberapa juga memiliki fungsi untuk menahan virus dan bakteri. Dengan kelebihan yang sangat unggul, purifikasi udara yang menggunakan filter ini sangat perlu dilakukan penggantian yang konsisten minimal 1 bulan sekali. Sehingga teknologi ini relatif mahal dan belum tersedia produk lokal dan sangat susah untuk konsistensi penggantian.

Berdasarkan keenam teknologi pencegahan COVID-19 yang telah disebutkan, inovasi – inovasi tersebut merupakan bentuk upaya disinfeksi permukaan (droplet) maupun diudara (airborne). Akan tetapi hal tersebut masih memiliki kekurangan. Beberapa teknologi tidaklah sederhana dalam penggunaannya dan membutuhkan pihak profesional dalam menggunakannya seperti spray disinfeksi, cat anti mikrobial dan lain sebagainya. Selain itu, dalam penggunaannya memerlukan penghentian aktivitas pada tiap individu, sehingga kurang praktis. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang praktis dan sederhana dalam penggunaannya serta dapat diaplikasikan saat aktivitas berlangsung sehingga bisa tetap menjaga kualitas udara dan meminimalisir penyebaran virus dan bakteri. Salah satu teknologi lain yang dapat memberikan harapan dalam penanganan penyebaran COVID-19 melalui udara (airborne) adalah “ATTACT” (Airborne Trapping nano-Technology for Anti COVID-19 Treatment).

Teknologi ATTACT tersebut merupakan hasil kerja sama pengembangan oleh tim Pusat Penelitian Metalurgi dan Material - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta serta PT. Nanobubble Karya Indonesia. ATTACT merupakan produk inovasi teknologi menggunakan metode nano- trapping yang mampu menangkap bakteri/virus dan UVGI (Ultra Violet Germicidal Inactivation) untuk menonaktifkan virus.

Kelebihan dari teknologi “ATTACT” (Airborne Trapping nano-Technology for Anti COVID-19 Treatment) adalah:

- A. Efektif dalam mengeliminasi bakteri dan virus termasuk jenis enveloped virus (COVID-19);
- B. Dapat digunakan pada ruang tertutup, ruang ber-AC dan tidak menyebarkan virus ke udara;
- C. Dapat diaplikasikan saat aktivitas berlangsung, sehingga memungkinkan aktivitas terus dilakukan dengan meminimalisir pencegahan virus dan/atau bakteri seperti COVID-19;
- D. Aman karena relatif tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya pada manusia;
- E. Praktis dan mudah dioperasikan serta mudah dalam perawatan.

VI. REKOMENDASI

- A. Penyusunan Pedoman Standar Kesehatan Lingkungan Kerja yang memuat tentang Protokol Pencegahan Infeksi COVID-19 berdasarkan kajian dan pedoman yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, WHO dan ILO.
- B. Merekomendasikan teknologi buatan dalam negeri salah satunya mesin ATTACT untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruang kerja untuk pencegahan infeksi COVID-19 di lingkungan kerja, sehingga tidak hanya bergantung pada kedisiplinan dan kepatuhan individu

VII. REFERENSI

Budiansyah, Arif. 2020. Berapa Lama Virus Corona Covid-19 Bertahan Hidup?. 12 Agustus 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200415181559-37-152219/berapa-lama-virus-corona-covid-19-bertahan-hidup>

CNN Indonesia. 2020. Penularan COVID-19 Banyak Terjadi di Lingkungan Kerja. 8 Agustus 2020. <https://www.cnnindonesia.com/naso/20200716170909-20525558/penularan-covid-19-banyak-terjadi-di-lingkungan-kerja> International

Labour Organization (ILO). 2020. Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan dan di Tempat Kerja 5 Agustus 2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19). 5 Agustus 2020. https://covid19.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19_27_Maret2020_TTD1.pdf

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 216 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Coronavirus Disease (COVID-19) di tempat kerja 8 Agustus 2020. https://covid19.kemkes.go.id/download/SE_protokol_pencegahan_Covid-19_di_tempat_kerja.pdf Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2018.

Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja lingkungan Kerja (K3L) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (K3L). 5 Agustus 2020. https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permen_5_2018.pdf

Kristianto, Andrian. 2020. Bahaya Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia. 8 Agustus 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190729185234-7-88384/bahaya-kualitas-udara-jakarta-terburuk-di-dunia>

Pemerintah Indonesia. 2020. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. 8 Agustus 2020. <https://covid19.go.id/p/regulasi/instruksi-presiden-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2020>

Prawira, AE. 2020. Rincian 90 Perkantoran yang Jadi Klaster COVID-19 di DKI Jakarta. 8 Agustus 2020. <https://www.liputan6.com/health/read/4317628/rincian-90-perkantoran-yang-jadi-klaster-covid-19-di-dki-jakarta>

Putri, GS. 2020. Pernyataan Resmi WHO, Virus Corona Menyebar di Udara dan Menular. 5 Agustus 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/10/091406523/pernyataan-resmi-who-virus-corona-menyebar-di-udara-dan-menular?page=all#page2>.

World Health Organization (WHO). 2020. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. 5 Agustus 2020. <https://www.who.int/publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-COVID-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>



**DEWAN RISET DAERAH (DRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sekretariat : Gd. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
Jl.Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Telp:021-22038313 email: drd_jakarta@yahoo.co.id

Nomor : 006/DRD-DKI/II/21 Jakarta, 15 Februari 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyerahan ATTACT kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Kepada Yth :
Bapak. Budi Awaluddin
Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat
Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Di
Tempat

Menindak lanjuti Rapat Koordinasi dengan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya serta dengan Instansi terkait dalam rangka penyampaian laporan Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 29 Januari 2021, kami diarahkan untuk menyumbangkan salah satu prototype hasil kajian DRD Provinsi DKI Jakarta yang *berkolaborasi* dengan LIPI, yaitu Teknologi ATTACT, Alat Pembersih Udara sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Udara di Lingkungan Kerja dan Rumah Sakit dalam upaya pencegahan penyebaran COVID 19

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan mengadakan Rapat persiapan penyerahan alat tersebut kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus memaparkan kajian teknis dan penggunaan Teknologi ATTACT dimaksud (detail terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Kepala Biro Umum Provinsi DKI Jakarta diucapkan terima kasih

DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua,

Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

ATTACT: ALAT PEMBERSIH UDARA
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS UDARA DI LINGKUNGAN KERJA & RUMAH SAKIT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19

Prof. Dr. Nurul Taufiq Rochman, M.Eng., PhD (LIPI)
Bekerja sama dengan:
Dewan Riset Daerah DKI Jakarta

ALTERNATIF

HASIL KERJASAMA PENGEMBANGAN :
LIPI, nanobubble, nano center Indonesia RESEARCH INSTITUTE

"ATTACT" (AIRBORNE NANO-TRAPPING TECHNOLOGY FOR ANTI COVID-19 TREATMENT) INI DIKOMERSIALKAN OLEH PT NANOBUBBLE KARYA INDONESIA

FUNGSI ATTACT: STERILISASI UDARA DARI VIRUS DAN MIKROORGANISME LAIN

KELEBIHAN

- ❖ Efektif dalam **mengeliminasi** bakteri dan virus.
- ❖ Dapat digunakan pada **ruang tertutup**, ruang ber-AC dan sehingga mengurangi penyebaran virus di udara.
- ❖ Dapat diaplikasikan saat **aktivitas berlangsung**.
- ❖ **Aman** karena relatif tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya pada manusia (menggunakan sabun mandi, sabun cuci sbg disinfektan)
- ❖ **Praktis dan mudah** dioperasikan serta mudah dalam perawatan.
- ❖ Harganya relatif terjangkau

dilakukan **disinfeksi**



Webinar

Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja
dalam Upaya Pencegahan Infeksi COVID-19 03

Climate Leadership Program 04

Pemulihan Ekonomi Jakarta 05

Mewujudkan Lansia yang Sehat di Perkotaan
pada Era Kenormalan Baru 06

Peran Perempuan dalam Ketahanan Ekonomi
Rumah Tangga di Perkotaan Selama Masa Pandemi 07

Pembangunan Wilayah & Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu Jakarta 08

03

Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dalam Upaya Pencegahan Infeksi COVID-19

Kolaborasi DRD DKI Jakarta dengan LIPI

I. Pembukaan acara webinar oleh MC

II. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

III. Pengantar Webinar oleh Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Agus Haryono, M.Sc

Assalamu'alaikum wr. wb

Pertama-tama Saya laporkan bahwa kegiatan yang dirancang hari ini adalah sebagai upaya menanggulangi atau membuat strategi terhadap permasalahan yang ada saat ini. Dapat diketahui bahwa, saat ini positivity rate dari pasien covid-19 selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pada bulan Mei, masih sekitar 5%, bulan Juli-Agustus meningkat 10%, dan sekarang sudah di atas 20%. Bahkan hari ini, pasien covid-19 yang terkonfirmasi positif sudah mencapai 4.465 pasien per hari, hal ini berarti dari waktu ke waktu semakin meningkat. Di beberapa lokasi kerja sudah ada tempat-tempat yang di-lockdown sementara, baik di lingkungan kerja industri atau pabrik maupun di kantor-kantor pemerintahan. Oleh karena itu, pertemuan hari ini dimaksudkan untuk menyinergikan upaya-upaya yang mungkin sudah dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mengurangi risiko paparan virus SARS-CoV-2, terutama di lingkungan kerja.

Pada sesi diskusi diharapkan ada keluaran saran atau rekomendasi yang bisa diambil bersama, terutama wilayah yang berdampak untuk dapat mengatasi penyebaran ini. Sejauh ini, LIPI bidang IPT sudah melakukan beberapa kegiatan yang berpotensi untuk bisa membantu menangani permasalahan-permasalahan, seperti sterilisasi ruangan kerja, baik itu melalui lampu UV-C, disinfeksi, ozonisasi, maupun melalui mesin pencuci ruangan yang nanti akan dijelaskan lebih oleh Pak Nurul. Pertemuan pada hari ini, selain dihadiri oleh para pembicara unsur akademisi, praktisi pengambil kebijakan serta mitra industri, diharapkan nanti dari peserta bisa memberikan masukan. Peserta yang tercatat saat ini berjumlah 113 orang peserta, dan biasanya akan naik dari waktu ke waktu. Pertemuan ini juga akan disiarkan pada channel youtube LIPI selain zoom meeting ini. Diharapkan informasi-informasi ini bisa bermanfaat bagi semua, untuk meringankan kondisi penyebaran pandemi covid-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Kami persilahkan kepada Kepala LIPI, Bapak Dr. Laksana Tri Handoko untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan bagi dimulainya kegiatan webinar hari ini.

Demikian, wassalamu'alaikum wr.wb

IV. Sambutan Kepala LIPI, Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc, sekaligus membuka acara webinar

Assalamu'alaikum wr. wb

Selamat siang menjelang sore, Salam sejahtera, Salam sehat untuk kita semua..

Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Haryono, kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini, pihak peneliti di berbagai lembaga riset seperti FK-UI, LIPI dan lembaga riset lainnya seperti dikejar waktu, dikejar target untuk memberikan informasi apapun sebagai salah satu solusi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Meskipun hal ini tidak mudah, mengingat covid-19 merupakan hal baru bagi peneliti di Indonesia bahkan di seluruh dunia, namun bisa membuka cakrawala, wacana baru, dan pengetahuan baru bagi kita semua. Terkait dengan topik webinar hari ini tentang strategi peningkatan kualitas udara, tentunya hal ini menjadi sangat krusial dan penting karena transmisi dari virus SARS-CoV-2 diyakini salah satunya melalui airborne/aliran udara, meskipun masih dapat diperdebatkan pada kemampuan virus bertahan di udara (berapa lama), kemampuan droplet menempel di meja kaca, gagang pintu besi, dinding, dst (berapa lama). Tetapi setidaknya kini sudah cukup tahu dan paham dibandingkan dengan keadaan awal, bahwa itu berpotensi menjadi media transmisi baik udara maupun benda-benda di sekitar. Dan sekarang lebih penting pada upaya preventifnya. Sehingga setidaknya saat ini para peneliti dan para periset khususnya di Indonesia sudah bisa memberikan guidance-guidance yang bisa dilakukan secara mandiri untuk mencegah transmisi ini.

Di lain sisi, harus juga ada upaya dari sisi manajemen perusahaan untuk dapat membantu para personel di lingkungan kerja dalam upaya preventif penularan, selain dari 3M. Perlu ada bantuan dari pihak manajemen seperti pengelola kantor, pasar, rumah sakit, supermarket, dsb untuk dapat menciptakan kualitas udara yang lebih bersih atau setidaknya dapat mengurangi kuantitas virus aktif yang berada di udara. Di sinilah pentingnya webinar hari ini, bagaimana bisa membuat strategi semacam itu baik dari sisi teknologi maupun dari sisi manajemen lingkungan, misalnya; bagaimana menciptakan aliran udara di dalam ruangan dapat tersirkulasi dengan baik. Kemudian, ada juga solusi teknologi yang mungkin bisa membantu, seperti alat yang dikembangkan oleh timnya Pak Nurul, yakni alat pembersih udara, timnya Dr. Anto dengan ozone nano bubble water-nya, serta timnya Dr. Budi Prawara dengan menyinari UV-C (sinar ultraviolet tipe C). Jadi memang ada banyak hal yang bisa dipakai dan harus terus dikembangkan.

Kalau ada yang memiliki ide lain bisa disampaikan, karena memang bagaimanapun juga pendekatan yang telah disebutkan baik dari aspek manajemen tata ruang, tata kelola udara maupun pendekatan sisi pemakaian teknologi harus dilakukan berbasis science bukan asumsi atau praduga, apalagi kepercayaan. Kita perlu membantu dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terbawa oleh informasi yang kurang tepat bahkan informasi yang berdampak kontraproduktif. Kami dari LIPI dan dibantu oleh FK-UI berusaha keras untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya; alat yang dikembangkan oleh timnya Pak Nurul yang diklaim bisa mencuci udara menjadi lebih bersih, juga akan diuji.

Komitmen LIPI melalui fasilitas BSL-3 yang ada di Cibinong akan melakukan berbagai pengujian. Contoh lainnya, ada teman dari Serpong yang mengembangkan produk masker yang dicampur dengan tembaga dan diklaim mampu membunuh virus aktif yang menempel dengan cepat. Begitu pun dengan produk masker yang dicampur dengan logam perak yang memiliki potensi untuk membunuh mikroba baik bakteri maupun virus. Semua itu akan diuji coba. Apapun alternatif solusi dan teknologi termasuk tata ruang & kelola, dsb yang telah disebutkan sebisa mungkin harus memberikan bukan sekedar potensi tetapi juga terbukti secara ilmiah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa pemakaian alat dengan tata cara dan dosis yang benar bisa membantu.

Webinar ini sangat penting untuk menjadi wahana/wadah edukasi bagi masyarakat baik umum maupun praktisi dan peneliti terkait sehingga bisa menjadi ajang diskusi dan mungkin bisa mendatangkan inspirasi baru bagaimana cara membantu masyarakat untuk menghadapi covid-19. Karena memang tidak ada garansi bahwa pandemi akan mereda di awal tahun, meskipun sudah ada 166 vaksin yang dikembangkan dan terdata di WHO. Tentu kita tidak boleh pesimis, tetapi kita membangun optimisme berbasis pada rasionalisme, sehingga harus siap dengan berbagai protokol, tata cara & tata kelola untuk menghadapi apa yang ada. Tidak hanya bergantung pada vaksin, namun perlu ada penargetan pada semua sisi agar siap dalam kondisi apapun.

Dalam kesempatan kali ini, Saya mengajak para peserta untuk aktif menyimak dan dapat memberikan ide baru terkait topik peningkatan kualitas udara. Melalui webinar ini, Saya berharap bisa menjadi trigger untuk kolaborasi dan kerja sama misalnya, baik antara Pemprov DKI dengan LIPI, FK-UI, dst. Dalam menghadapi pandemik covid-19 ini harus berbasis science sehingga dapat dilakukan measures, mitigasi, dan pengambilan kebijakan yang tidak terlalu loose ataupun over tapi pas. Kami dari kalangan peneliti & akademisi (universitas) siap menjadi bumper pengambil kebijakan untuk memberikan rekomendasi- rekomendasi yang memiliki bobot scientific, rasional dan cukup memadai. Sehingga masyarakat bisa tetap menjalani aktivitas kehidupan dalam keterbatasan tapi tetap produktif dan efisien. Terima kasih untuk para pembicara, Pemprov DKI, dan DRD. Kami dari LIPI siap membantu. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini dapat memberi manfaat dan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Semoga webinar hari ini berjalan lancar.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Saya membuka acara webinar ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum wr.wb

V. Sambutan Wagub DKI Jakarta, Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A, sebagai keynote speaker

Assalamu'alaikum wr. wb

Selamat sore dan Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelumnya, izinkan Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas digelar webinar yang mengangkat tema "Strategi Peningkatan Kualitas Udara di Lingkungan Kerja dalam Upaya Meminimalisir Penyebaran Covid-19". Kegiatan ilmiah ini layak diikuti oleh para pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat umum karena sejalan dengan kondisi di masa pandemi ini, terutama dalam pengaturan kualitas udara di lingkungan kerja. Kami berharap webinar ini juga dapat memberikan persepsi yang seragam serta informasi yang memadai tentang perlunya meminimalisir penyebaran covid-19, terutama di lingkungan perkantoran.

Pengaruh kualitas udara di lingkungan kerja perlu diperhatikan, terutama di masa pandemi ini. Berdasarkan penelitian, kualitas udara dalam satu ruangan dapat menjadi salah satu faktor paparan covid-19. Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Prof. Pandu Riono pernah menjelaskan penyebaran virus corona covid-19 justru lebih tinggi risikonya di ruangan tertutup yang memiliki sirkulasi yang buruk. Di ruangan tertutup, media penularan covid-19 seperti droplets bisa lebih besar menularkan jika berada dalam ruangan yang sirkulasi atau ventilasinya buruk. Dalam hal ini, pengelola kantor dan masyarakat, terutama mereka yang sehari-hari bekerja di perkantoran harus lebih waspada karena ruangan tertutup memiliki potensi lebih tinggi dalam penyebaran virus corona dibandingkan ruangan terbuka.

Para hadirin yang Kami hormati, lebih tingginya tingkat risiko penularan covid-19 di ruangan tertutup, sayangnya belum disadari oleh para pengelola perkantoran. Maka tidak mengherankan jika

belakangan ini terjadi penambahan kasus baru infeksi virus corona yang berasal dari aktivitas perkantoran, bahkan kasus penularan covid-19 di DKI Jakarta terbanyak berasal dari kluster perkantoran, baik kantor pemerintahan maupun swasta. Data per 18 September 2020 menyebutkan bahwa kantor kementerian menyumbang 1223 kasus covid-19, disusul kantor swasta 639, badan/lembaga negara 625, pemerintah DKI Jakarta 601 kasus dan pasar 324 kasus. Dalam menyikapi makin tingginya tingkat penularan covid-19, terutama dari kluster perkantoran Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan terus bertindak secara ilmiah dengan mengutamakan faktor kesehatan warga. Oleh karena itu, Kami menerapkan kembali PSBB demi mengurangi tingkat penularan covid-19 yang semakin tinggi dan PSBB yang diterapkan sejak 14 September itu difokuskan pada pembatasan area perkantoran sebagai kluster penyumbang terbesar angka positif covid-19.

Dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di udara, Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan LIPI untuk mencari solusi teknologi dan alhamdulillah telah berhasil dikembangkan mesin ATTACT untuk membersihkan udara yang telah dipasang di GSM dan dapat digunakan untuk lingkungan kerja yang menjadi kluster baru penyebarannya. Alat ini mampu menyedot udara di sekitar kita dalam kapasitas yang cukup besar dan menyemprotkan air sabun melalui 18 noozles untuk membersihkan partikel-partikel termasuk mikroba dan virus, sehingga aman bagi kesehatan karena itu tidak menggunakan bahan yang berbahaya.

Bapak Ibu yang Kami hormati, selama masa PSBB, Kami melakukan pembatasan kegiatan perkantoran yang berlaku baik perkantoran pemerintahan maupun swasta. Untuk lingkungan pemerintahan, Kami mengizinkan hanya 25% dari pegawai yang bisa masuk bekerja di kantor sesuai dengan peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, begitu juga perkantoran swasta non-esensial yang masih bisa beroperasi maksimal 25%. Namun apabila ditemukan kasus positif covid-19 di lokasi kegiatan perkantoran baik swasta maupun pemerintah, maka seluruh lokasi gedung akan Kami tutup paling sedikit 3 hari masa operasional.

Bapak Ibu yang Kami muliakan, pembatasan dan pengurangan kegiatan di lingkungan perkantoran selama PSBB ini tidak lepas dari pemahaman Kami bahwa kegiatan dalam ruangan tertutup apabila dengan sirkulasi udara yang kurang baik berpotensi meningkatkan risiko penyebaran covid-19. Organisasi kesehatan dunia, WHO, telah mengingatkan kita bahwa virus corona dapat menyebar melalui udara, terutama di ruangan tertutup. Meningkatnya kluster perkantoran bukan hanya di DKI Jakarta, tapi di seluruh kota besar di Indonesia dan telah dilaporkan banyaknya kasus berasal dari perkantoran. Oleh karena itu, pengelola perkantoran dan para karyawan yang mulai beraktivitas di kantor harus terus waspada dan menerapkan protokol kesehatan & protokol 3M selama bekerja di kantor, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer.

Beberapa hal penting harus terus dilakukan demi keselamatan kita bersama dari pandemi covid-19. Pertama, memperhatikan sirkulasi udara, salah satu hal yang harus diperhatikan pada aktivitas dalam ruangan tertutup adalah sirkulasi udara. Kedua, kapasitas ruangan dan waktu dengan membatasi jumlah orang dalam satu ruangan dan waktu tertentu. Ketiga, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di kantor. Dan keempat, senantiasa melaksanakan 3M di lingkungan masing-masing kantor.

Semoga dengan ikhtiar kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat tersebut bisa menghindari dari terpapar covid-19. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga kegiatan perkantoran kita bisa berjalan kembali normal.

Demikian dan terima kasih, wassalamu'alaikum wr.wb

VI. Presentasi Ketua DRD DKI Jakarta, Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D:

Peran DRD Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan COVID-19 di Lingkungan Masyarakat

Assalamu'alaikum wr. wb

Salam sejahtera untuk kita semua..

Dewan Riset Daerah DKI Jakarta sangat menyambut baik kegiatan kolaborasi webinar seperti ini, dan Kami membuka dengan senang hati kesempatan untuk bisa berkolaborasi lebih jauh dan Kami sangat apresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Kepala LIPI terkait dengan peran serta lembaga ilmiah di dalam melakukan mitigasi covid-19 ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, bagaimana DKI Jakarta dengan gencarnya berupaya menurunkan tingkat penyebaran dari covid-19 ini.

Bahwasanya Dewan Riset Daerah mempunyai tugas pokok memberdayakan kegiatan riset ilmu pengetahuan dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah dan produknya adalah dalam bentuk policy brief. Kami ada 37 anggota yang saat ini terbagi menjadi empat komisi, yaitu Komisi Pemerintahan, Komisi Ekonomi, Komisi Infrastruktur dan Lingkungan Hidup serta Komisi Kesejahteraan Rakyat. Di dalam kegiatan sehari-hari, Kami berkoordinasi dengan pihak Bappeda.

Bapak Ibu sekalian, pada topik sore hari ini Saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan DRD tahun 2020 ini yang memang sebagian besar atau hampir semuanya berfokus pada kegiatan riset mitigasi covid-19 di lingkungan masyarakat. Bahwa PSBB yang dilakukan saat ini, baik PSBB pertama maupun PSBB kedua ternyata membawa hikmah yang seperti kita saksikan bagaimana birunya langit Jakarta dan terlihatnya Gunung Gede di bagian selatan Jakarta. Hal ini menandakan bahwa di saat ini, Bumi mendapat kesempatan untuk bisa beristirahat dan memberikan alam kesempatan untuk pulih kembali. Namun demikian, untuk pelaksanaan kehidupan warga dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, tetap diperlukan adanya rekayasa dan penyesuaian agar kehidupan tetap bisa berlanjut di tengah kondisi covid-19 semacam ini.

Salah satunya adalah Kami berkoordinasi dengan Bappeda, yaitu melakukan review dan penyesuaian terhadap rencana RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Perekonomian DKI Jakarta mengalami kontraksi yang luar biasa, dan seluruh aktivitas program Pemda diarahkan untuk mitigasi covid-19 ini. Jadi ada penyesuaian terhadap program pembangunan manusia, kegiatan ekonomi & infrastruktur, program pengembangan aparatur, pembangunan kota lestari, dsb.

DRD Action Research:

Tahun ini, DRD memfokuskan pada mitigasi covid-19 dan sesuai dengan apa yang telah Kami lakukan, bekerja sama dengan pihak LIPI -> mengambil tempat di Gelanggang Olahraga Pademangan yaitu Riset Tindakan mengembangkan suatu desain atau rekayasa spasial untuk isolasi mandiri bagi pasien covid-19. Di sini sudah dibentuk tim khusus mitigasi covid-19 yang diketuai oleh Ust. Erick Yusuf. Grha Sehat Mandiri ini merupakan aksi kolaborasi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk melakukan mitigasi covid-19 ini semua pihak harus terlibat dan berkolaborasi. Kegiatan kolaborasi menjadi salah satu program penting bagi kita untuk bisa bekerja sama dalam mengatasi covid-19, termasuk di dalam pengembangan Grha Sehat Mandiri (GSM).

Hal ini sejalan dengan Pemda, khususnya Dinas Kesehatan dan BNPD yang saat ini telah mengalokasikan kurang lebih 110 Gedung Olahraga dan Sekolah di wilayah DKI Jakarta yang tersebar sampai tingkat kecamatan untuk fasilitas isolasi mandiri bagi warga yang berada di daerah kumuh atau da-

erah hunian padat. Kami mencoba untuk mengambil peran membuat sebuah model atau prototipe tempat isolasi mandiri di daerah padat penduduk yang masyarakatnya kesulitan melakukan isolasi mandiri karena tempatnya yang tidak memungkinkan. Kami memanfaatkan gedung fasilitas olahraga dengan konsep adaptasi non-permanen.

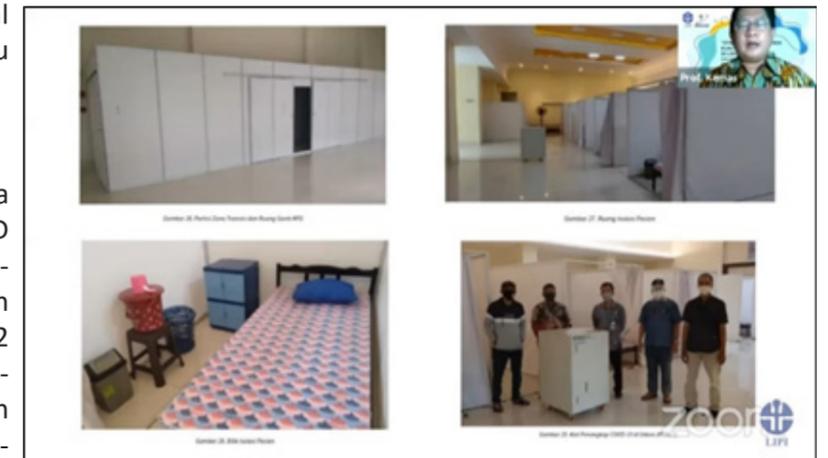
Adapun inovasi yang ada di bilik ini adalah adanya bilik transisi untuk memfilter virus/bakteri secara spasial, semacam counter bilik transisi yang juga nanti ada di alat ATTACT, tapi ini secara spasial. Di bilik transisi ini ada disinfektant chamber yang memisahkan antara zona bersih dan zona terkontaminasi. Kemudian bekerja sama dengan pihak LIPI & nanobubble, yakni melakukan penelitian tentang rekayasa sirkulasi udara, pertama di dalam GOR (karena penting dilakukan di ruangan tertutup, mengingat akan dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri). Selanjutnya ada bilik isolasi mandiri yang mudah dibuat, murah harganya, bisa dibongkar pasang dan dapat dikerjakan melalui kerja sama melibatkan UMKM setempat.

Berikut ini ada contoh prototipe yang dikembangkan di GOR Pademangan, Jakarta Utara yang di dalamnya ada alat ATTACT hasil kerja sama dengan pihak LIPI & nanobubble.

Ini merupakan rekayasa spasial yang diharapkan bisa membantu menanggulangi covid-19.

DRD Studies

Selain Riset Tindakan, DRD juga melakukan kajian-kajian. DRD terbagi menjadi 4 (empat) komisi, yaitu Komisi 1 terkait dengan bidang Pemerintahan, Komisi 2 terkait dengan bidang Perekonomian, Komisi 3 terkait dengan bidang Infrastruktur & Lingkungan Hidup, dan Komisi 4 terkait dengan bidang Kesejahteraan Rakyat.



DRD Webinar

Kegiatan webinar yang sudah dilaksanakan:

- 1) Masalah, Solusi, dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Jakarta #Jakarta tangguh;
- 2) Mewujudkan Lansia yang Sehat di Perkotaan pada Era kenormalan Baru;
- 3) Climate Leadership Program Towards Low Carbon Cities; dan
- 4) Strategi Peningkatan Kualitas Udara di Lingkungan Kerja.



Semoga ke depannya DRD bisa berkolaborasi lebih lanjut dengan pihak LIPI dan juga lembaga/institusi yang lain.

DRD Public Outreach

Penyampaian hasil-hasil riset DRD kepada publik, yakni dengan memanfaatkan media sosial. Tahun lalu sebelum pandemi, biasanya diadakan kegiatan talkshow bekerja sama dengan diskominfo terkait isu bagaimana penyelesaian masalah kota Jakarta, salah satunya adalah terkait dengan Smart City dan aspek lingkungan.



DRD merupakan kelompok pakar, ilmuwan dan juga peneliti, dimana kapasitas anggota sering menyampaikan masukan di berbagai forum ilmiah. Silahkan berkunjung ke website DRD untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang DRD. Sejak tahun lalu Kami sudah membuka e-journal untuk memberi kesempatan kepada para penulis, khususnya PNS di lingkungan Pemda DKI Jakarta untuk dapat menyampaikan pemikiran ilmiahnya terkait dengan Kota Jakarta, yang mana dinamakan dengan Jurnal Riset Jakarta.

Dan tentunya produk DRD berbentuk Policy Brief. Selain itu, DRD juga memiliki akun twitter, bisa dicek tweetnya. Pada akhirnya Kami juga melakukan tindakan kampanye, salah satunya adalah Kampanye: Menghindari Sampah Plastik, Say No to Plastic!



DRD sangat berterima kasih dan membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi kerja sama & kolaborasi riset dengan berbagai pihak. Terima kasih, dan wassalamu'alaikum wr.wb

VII. Dialog Interaktif

A. Pengantar Diskusi, Paparan Prof. Dr. Nurul Taufiq Rochman, M.Eng:

Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dalam Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19

Assalamu'alaikum wr. wb

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua..

Untuk membuka diskusi, Saya akan memaparkan materi tentang bagaimana kira-kira Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dalam Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19 (bahan terlampir), dalam konteks pandangan para pakar.

- 1) Adanya peningkatan kasus positif covid-19 yang signifikan di DKI Jakarta, khususnya kawasan tempat kerja (kurang lebih ada 50 tempat kerja yang ditutup).
- 2) Meskipun protokol kesehatan sudah diberlakukan namun masih ditemukan kasus positif di ling-

- 3) Ditemukan partikel droplet yang ukurannya di bawah 5 mikron bisa mengambang di udara, bertahan lama dan bisa menyebar (apalagi kalau kualitas udaranya tidak baik).
- 4) Standar Kualitas Lingkungan Kerja sudah ada dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.5 tahun 2018 tentang K3, dan harus disinkronisasi dengan peraturan protokol yang baru, dan tentunya ada teknologi baru yang digunakan.

B. Pengantar Prof. Dr. Pratiwi Pujilestari Sudarmono, Ph.D., SpMK(K):

Pentingnya untuk Memotong Transmisi Penularan

Assalamu'alaikum wr. wb

Salam sejahtera bagi kita semua.

- 1) Tanpa kerja sama yang erat antara banyak pihak, maka mengatasi infeksi ini sangat sulit.
- 2) 8 bulan lalu saat pertama kali diketahui adanya virus yang aneh, sebagai orang biasa atau ahli kedokteran berpikir bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus pasti udara yang jelek. Atau hanya renjatan dari virus-virus yang sudah ada dan virus yang paling banyak adalah virus influenza.
- 3) Dalam perkembangannya, virus corona yang muncul bukanlah virus corona yang menyebabkan 30% penyakit influenza, namun merupakan virus corona baru. Dan masih perlu untuk pencarian informasi yang lebih mendalam tentang seluk-beluk virus baru ini.
- 4) Pertama-tama diketahui, virus ini menyerang saluran pernapasan. Kemudian, semua jenis pengobatan dicoba dari yang cara realistis sampai cara yang tidak realistis sekalipun. Dari segi obat-obatan, dicoba jenis obat dari berbagai peruntukan seperti obat untuk virus flu burung, HIV, AIDS, Malaria, bahkan antibiotik namun ternyata tidak sepenuhnya menolong. Seperti yang diketahui bahwa angka kematian sangat tinggi dan kita tidak berdaya.
- 5) Satu-satunya usaha manusia ialah dengan mengandalkan teknologi, yakni teknologi untuk mencari obat baru, mencari vaksin, memahami perjalanan penyakit. Tentunya Saya juga sangat menghargai teknologi yang dikembangkan oleh LIPI saat ini, antara lain adalah teknologi ATTACT yang menggunakan nanotechnology untuk mengatasi transmisi di lingkup udara (meski karakter penyebarannya masih dispute sampai saat ini).
- 6) Sekarang kita mengalami tingginya angka kesakitan di seluruh dunia, lebih dari 31 juta sudah menderita penyakit ini selama enam bulan terakhir dan masih belum pasti peningkatan jumlah kasus yang akan terjadi di masa mendatang. Tidak ada jaminan untuk kita tidak terinfeksi oleh virus ini. Oleh karena itu, pencegahan transmisi itu sangat penting.
- 7) Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa transmisi menyebabkan kluster-kluster. Kluster-kluster ini adalah pencerminan dari local transmission, jadi sudah tidak bisa lagi dilakukan penutupan airport, gedung A, kereta api, dst. Hal ini karena virus sudah ada bersama kita, dan harus melakukan adaptasi sedemikian rupa agar tidak bisa menularkan dan tidak tertular. Salah satunya ialah dengan menjaga kualitas udara di sekitar, karena memang kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau menyendiri juga tidak bisa tidak berinteraksi dengan orang lain. Di sinilah kita mengharapakan suatu teknologi yang bisa mencegah transmisi ini dapat dikembangkan dan diandalkan dalam waktu dekat, mengingat kehidupan sosial terus berjalan.
- 8) Di kalangan kedokteran terus berusaha keras untuk menurunkan angka sakit & angka kematian. Tetapi sepertinya masih membutuhkan waktu lama sebelum vaksin diperoleh untuk mengatasi virus covid-19 ini.

Demikian introduksi yang dapat disampaikan, Terima kasih.

C. Paparan Kepala Bappeda DKI Jakarta, Dr. Nasruddin Djoko Surjono:

Upaya Pencegahan Covid-19 dalam Mempersiapkan Lingkungan Kerja

Saya hanya ingin menyampaikan potret terkait kondisi covid-19 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tantangan di DKI Jakarta memang tidak mudah, selain terkait dengan covid-19 juga perlu mengantisipasi terkait banjir. Untuk tema dari Bappeda di tahun depan adalah lebih diutamakan ke pertahanan kota atau city resilience. Saya akan menyampaikan bagaimana pencegahan covid-19 dalam mempersiapkan di lingkungan kerja (bahan terlampir), termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi covid-19 ini.

Kami menyambut baik bila ada penelitian dari DRD dan LIPI yang menciptakan alat pemurni udara, prototipenya dikembangkan menjadi produk massal. Karena bagaimanapun covid-19 dapat menular dari airborne dan hal tersebut merupakan sebuah ikhtiar.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih.

D. Paparan CEO PT Nanobubble Karya Indonesia, Hardi Junaedi, S.T.P:

Menghadapi Covid-19 dengan Pandangan Teknologi Terkini

Assalamu'alaikum wr. wb

PT Nanobubble Karya Indonesia sendiri mengembangkan teknologi dan mesin teknologi nano untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Tetapi pada kesempatan ini, kita diberi kepercayaan untuk melakukan uji coba produksi mesin ATTACT, alat treatment udara, di lingkungan yang sebenarnya.

- 1) ATTACT sudah dilisensikan oleh LIPI kepada PT Nanobubble Karya Indonesia, dan sudah dipatenkan per bulan Agustus 2020.
- 2) Uji coba produksi mesin ATTACT dilakukan sesuai standar yang ditentukan oleh LIPI dan early adaptor.
- 3) Implementasi lapangan produk ATTACT sudah dilaksanakan, pertama di Grha Sehat Mandiri (GSM) yang merupakan program dari DRD DKI Jakarta dengan pemasangan 4 (empat) unit yang dicobakan dan sampai saat ini masih berjalan dengan lancar (belum ada kendala yang masif).
- 4) Selain itu, ada beberapa lembaga/institusi lain yang telah mencoba alat ATTACT ini seperti KemenPUPR & PLN, yangmana telah memberikan masukan-masukan luar biasa untuk improve produknya, salah satunya ialah terkait electrical (status mesin dan perpaduan sensor). Kemudian ada juga permintaan untuk penambahan IoT, hal ini mungkin bisa dikombinasikan dengan FUSI untuk bisa mendigitalkan mesin ini.
- 5) Evaluasi lain dari early adaptor ialah perlu penyempurnaan produk dengan uji klinis & sertifikasi khusus terkait virus, dan kondisinya bahwa sedang dipersiapkan untuk uji BSL3. Setelah mendapat sertifikasi BSL3 maka akan diketahui keefektifan mesin terhadap pembunuhan virus dan kami pun siap untuk produksi mesin ATTACT secara massal.
- 6) Ada teknologi lain yang sudah beredar, seperti sterilisasi udara menggunakan UV, namun hal itu sangat berbahaya ketika UV langsung dipaparkan ke tubuh manusia; ada teknologi HEPA Filter, namun terkendala pada maintenance rutin dan memerlukan biaya. Kemudian ada juga produk teknologi buatan luar negeri yang masuk ke Indonesia seperti mesin UV (harga produk sangat mahal dan sedikit riskan apabila diterapkan di kantor), air purifier dengan menggunakan HEPA Filter (harga produk sangat mahal dan high maintenance).
- 7) Apabila dibandingkan dengan produk ATTACT, ATTACT memiliki uniqueness, teknologi yang ber-

beda dari yang berada di pasaran, jadi menggabungkan beberapa teknologi untuk treatment udara dengan UV, noozles sabun, dan trapping yang dilapis dengan teknologi nano. Saya yakin bisa efektif untuk mensterilkan atau mencuci udara.

- 8) ATTACT memiliki kapasitas yang cukup besar, sekitar 79 cubic feet per menit atau setara dengan 2200 L per menit dan bisa menjangkau ruangan dengan ukuran 10x10 m atau lebih.

Dengan adanya inovasi ini, kami mengharapkan dukungan dari pemerintah dalam fase uji coba produksi atau fase early adaptor ini. Bagi teman-teman, diharapkan juga dapat memproduksi dan mengembangkan produk teknologi yang berdaya saing dengan produk luar negeri secara cepat & terukur, serta terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Sekian paparannya, dan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr.wb

E. Paparan CEO PT Fusi Solusi Teknologi, Medisa Aris Ginanjar, ST., MM:

Pentingnya Penerapan Teknologi di Lingkungan Masyarakat untuk Menghindari Penyebaran Covid-19

Assalamu'alaikum wr. wb

Salam sejahtera untuk kita semua..

Kami adalah pelaku usaha, bentukan dari alumni TELKOM, yang membuat solusi di bidang teknologi. Kaitannya dengan covid-19 ini, kami berusaha untuk menggabungkan teknologi-teknologi yang bisa diolah (pengolahan data yang mutakhir) dan akan diberikan kepada para stakeholder. Sebagai contoh, ada implementasi CCTV yang bisa mengecek heat sensor dari setiap kepala manusia secara interaktif dan ada implementasi gelang untuk contact tracing (mencatat orang yang berdekatan dalam radius $\pm 2m$) dan datanya akan tersimpan di server. Kedua contoh tersebut berada pada level people, dimana agar orang bisa tetap menjaga social distancing dan bisa track kondisi suhu tubuh. Selain level people, harus melihat juga dari sisi places (menjaga agar suatu tempat/area tertentu tidak terkontaminasi oleh banyak orang).

Kaitannya dengan kualitas udara, ada alat seperti air purifier, HEPA lalu ada teknologi pencucian udara ini, dan semua ini merupakan solusi (jika memang sudah dibuktikan secara klinis). Erat kaitannya dengan data, apabila ATTACT ini disimpan dalam suatu lokasi bisa ditulis label "Lokasi ini Aman, Ten-teram & Nyaman", karena memang udaranya sudah dicuci. Namun keinginan kami lebih dari itu, karena mempertimbangkan para stakeholder & customer. Jika aplikasi/hardware ini bisa dimasukkan menjadi sumber data, maka akan lengkap dimana data people & places-nya bisa masuk dan kemudian dapat dimanfaatkan dalam pemeriksaan riwayat kontak tanpa melakukan interview individu. Selanjutnya, terkait kualitas udara bisa dilihat dari durasi alat ATTACT bekerja menyedot dan mencuci udara. Misalnya dalam seminggu pengoperasian ATTACT, berapa banyak udara yang sudah dibersihkan (dalam satuan cubic). Data ini nantinya bisa membantu mengidentifikasi lebih tajam penyebab penularannya seperti apa.

Hubungannya dengan customer/karyawan yang menginginkan lingkungan kerja yang aman, kami mengusulkan bahwa ATTACT ini bisa dimasukkan datanya ke dalam satu big data/database lalu diberikan kembali kepada customer/karyawan, maka akan sangat memberikan dampak (mengingat persepsi risiko seseorang dipengaruhi oleh sumber data & informasi serta kondisi sosial ekonomi). Jika nanti semua data ini digabungkan, data ini bisa kita sharing ke berbagai macam stakeholder. Demikian.

F. Paparan Perwakilan MUI, Ustadz Erick Yusuf:

Pentingnya Menjaga Kesehatan Rohani dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Assalamu'alaikum wr. Wb

Bentuk musibah atau bala ini semoga bisa menjadi penggugur dosa, namun bisa juga sebagai peringatan bagi kita agar bisa terus beristighfar. Bagi alam, pandemi ini menjadi sebuah recovery atau cosmic balance, serta bagi IPTEK, LIPI, para peneliti & ilmuwan pandemi ini menjadi sebuah tantangan untuk dapat mengembangkan solusi dengan menggunakan science & technology.

Selain sisi ekonomi lingkungan kerja, perlu juga diperhatikan dari sisi spiritual lingkungan ibadah, seperti di masjid, surau, gereja dll, karena memang itu termasuk suatu kebutuhan. Penting untuk melakukan ikhtiar yang bukan hanya dengan pendekatan mitigasi science & technology, tetapi juga ikhtiar dalam bentuk mitigasi spiritual. Bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan memaksimalkan ikhtiar dari berbagai hal, baik dari upaya science & technology maupun upaya rohaniah. Dalam menghadapi pandemi ini, webinar kali ini merupakan sebuah gambaran kerja sama yang erat antara semua stakeholder (bukan hanya pemerintah tetapi juga ada ilmuwan, ulama, dan juga ekonom).

Kita harus pahami bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada kita menjadi sebuah peluang bagi kita semua, oleh karenanya kita harus bersabar dan bertawakal. Sabar di sini bukan hanya berdiam diri, namun diartikan sebagai menahan diri untuk tidak memberikan dampak buruk bagi orang lain dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ketika kita bersama-sama bertawakal setelah melakukan optimalisasi upaya, insya Allah akan membuka pertolongan dari Allah berupa kebaikan yang dibutuhkan saat ini maupun kebaikan di masa mendatang. Dan kita harus tetap optimis bisa melewati ujian ini. Sekian. Wassalamu'alaikum wr.wb

VIII. Kesimpulan dan Penutupan Dialog Interaktif oleh Moderator

Sebagai rekomendasi atau kesimpulan terakhir: strategi peningkatan kualitas udara di lingkungan kerja perlu didalami dan diterapkan dengan memaksimalkan teknologi, sehingga setidaknya bisa mengurangi penambahan jumlah pasien positif covid-19 sebelum obat dan vaksin ditemukan.

IX. Penutupan acara webinar oleh MC

Cegah COVID-19 dengan: 3T & V



Testing
Tracing

Treatment



Kajian Perencanaan dan Perancangan Model Grha Sehat Mandiri COVID-19
<https://drdjakarta.id/index.php/publikasi/buku>



Vaccination

covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/3t-testing-tracing-treatment

04

Climate Leadership Program

Kolaborasi DRD DKI Jakarta dengan CityNet terkait Climate Leadership Program, Carbon Finance, & Carbon Trade (16, 23, 25 Sept 2020)

Untuk kelima kalinya, Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan CityNet mengadakan seri pembelajaran tahunan Climate Leadership Program (CLP) pada tanggal 16, 23 dan 25 September 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas praktisi perubahan iklim di kota-kota Asia-Pasifik, khususnya meningkatkan kapasitas kepemimpinan yang inovatif serta dapat melihat beberapa alternatif potensi finansial (Carbon finance and Carbon Trade) dalam upaya pencapaian target penurunan karbon.

Tahun 2020 ini, dengan mempertimbangkan COVID-19, Program Kepemimpinan Iklim keempat ini diadakan secara online. CLP juga berkolaborasi dengan mitra antara lain ICLEI, CDP, ArchiCity, dan GrEEAcc. CLP 2020 dibuka oleh Ketua DRD Provinsi DKI Jakarta Prof. Kemas Ridwan Kurniawan yang menekankan pentingnya membangun motivasi bagi para pemimpin untuk mencari strategi local yang inovatif dalam menghadapi tantangan global ini dan Bp. Geun Hyeong Yim, Chief Executive Officer (CEO) CityNet, menyambut para peserta. CEO Yim menggarisbawahi pentingnya CLP sebagai platform regi-

onal untuk ide, inovasi lokal, dan kerja sama kota internasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Selanjutnya Dr. Aisa Tobing, Sekretaris DRD

menjelaskan tentang tema CLP 2020 yaitu Resilience Innovation and Carbon Finance in the Asia Pasific.



Provinsi DKI Jakarta yang juga merupakan Deputy Secretary General Citynet sekaligus Ketua Climate Change Cluster CityNet

Sesi pertama pada tanggal 16 September menghadirkan motivator Frans Sugiarta dari United in Diversity dan IDEAS Indo-

nesia sebagai pembicara utama. Frans membawakan Sesi Kepemimpinan tentang Leading Disruptive Times, Transformational Leadership in Digital World and New Normal Era yang antara lain berbagi tentang perlunya Transformational Tri-Sector Leadership untuk mengatasi tantangan dan divisi keberlanjutan. Ada kesenjangan yang tumbuh

kesenjangan membutuhkan pola pikir dan proses transformasional. Frans Sugiarta juga mencatat bahwa pandemi yang terjadi saat ini telah mempercepat proses pergeseran masyarakat dari creative-based economy to digital economy. Sekarang penting untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola data, khusus-

Sesi kedua pada tanggal 23 September 2020 dengan topik Carbon Finance, dan menampilkan Paul Butarbutar dari PT JJB Sustainability and Indonesian Carbon Management Association menyampaikan Mitigation and Carbon Finance Development, Hanah Paik dari CDP menyampaikan Carbon Finance and Private Sector Engagement, Axel Michaelowa dari Perspectives Climate Group dan Chunmei Li dari Divisi Perubahan Iklim, Pemerintah Kota Beijing.

Keempat pembicara menggarisbawahi kebutuhan untuk menyediakan pembiayaan dan pendapatan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim. Pembiayaan Karbon mengacu pada aliran pendapatan yang dapat dihasilkan oleh proyek dan kegiatan rendah karbon dari penjualan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) global berdasarkan sumbernya, atau penghilangan emisi GRK oleh penyerap, atau dari perdagangan kredit karbon.

Sebagai ringkasan dari sesi tersebut, pendanaan karbon masih relatif baru di kota-kota berkembang. Keterlibatan kota dan kotamadya dalam pasar karbon telah dibatasi. Keterlibatan partisipasi sektor swasta perlu diperkuat seperti dalam kasus Pemerintah Kota Beijing melalui sistem perdagangan emisi mereka. Peluang, bagaimana-



antara manusia ke manusia (kesenjangan sosial), manusia dan planet (kesenjangan ekologis), dan manusia dan ilahi (kesenjangan spiritual), tambahannya. Langkah untuk menjembatani

nya tentang cara memilih data yang relevan dan tidak terjebak dalam analysis paralysis mode. Pemimpin perlu disiplin dalam menjaga pola pikir organik dan sikap kolaboratif.

pun, berlimpah karena lembaga dan organisasi terus memberikan kapasitas kepada kota-kota dalam mengakses mekanisme pendanaan karbon yang dapat menawarkan jalur baru untuk berkontribusi pada aksi iklim mereka.

Sesi ketiga pada tanggal 25 September 2020 dengan tema Resilience Innovations and Carbon Trade in the Asia Pacific ' menghadirkan pemerintah kota dan beberapa pakar di untuk berbagi inisiatif rendah karbon mereka dan meningkatkan prospek untuk memperkuat program perdagangan karbon lokal mereka. Sesi ini dimoderatori oleh Jeffrey Mulyono, salah satu Board of Directors GrEEnAcc Indonesia.

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang menyampaikan Resilience Innovations for Low Carbon mengatakan strategi kota rendah karbon difokuskan pada pengurangan risiko iklim pada sumber daya air karena air kota menjadi terbatas. Kota Bogor juga akan melakukan penataan ruang untuk mitigasi risiko bencana, dan mengembangkan transportasi umum ramah lingkungan. Sementara itu, Kota Pasig sudah mulai mengolah becak bermotornya menjadi becak elektronik. Kota ini juga mendorong sekolah umum dan warga untuk memelihara taman kota. Allendri Angeles, kepala lingkungan Kota Pasig menyampaikan How to Finance Emission Reduction using Market Based Mechanism Scheme dan berbagai program daur ulang berbasis komunitas telah diterapkan untuk mengurangi sampah di masyarakat.

Untuk membantu kota-kota mengurangi emisi karbonnya, pertukaran antar kota dapat menjadi mekanisme yang layak, kata Dicky Edwin Hindarto, penasihat saat ini untuk Sistem Kredit Bersama Indonesia. Dicky memaparkan contoh pertukaran antar kota antara Jepang dan Indonesia. Kota-kota di Jepang memberikan bantuan teknis tentang pengelolaan energi, pengelolaan limbah, panel surya, dan teknologi bio massa ke kota-kota di Indonesia.

Selain itu, teknik pengeboran yang berbeda telah membantu mengurangi dampak kegiatan penambangan terhadap ekologi seperti yang terjadi pada Perusahaan Yunnan Phosphating Group. Rehabilitasi dan penghijauan tambang juga menghadirkan peluang di mana hal itu dapat mengimbangi perdagangan karbon, seperti yang dicatat Dr. Felicia Jiang.

Di Guangzhou, Ms. Qing Liu, dari China Emissions Exchange (CEEX), berbagi bahwa aktivitas pengurangan emisi yang berbeda dari sektor swasta dan publik difasilitasi oleh pasar karbon kota, yang telah menjadi pasar perdagangan karbon global terbesar ketiga. Kota ini telah mampu membangun fasilitas pembiayaan hijau untuk produksi produk berbasis ekologi dan pengembangan teknologi hijau.

CLP 2020 ditutup oleh Wakil Sekretaris Jenderal CityNet (Sekretaris DRD), Dr. Aisa Tobing yang mengucapkan terima kasih kepada para peserta selama tiga sesi CLP. Aisa Tobing berharap CLP memberikan wawasan tentang bagaimana Kota-kota memiliki Kebijakan dan Rencana aksi dalam memberi kontribusi terhadap target pengurangan karbon sesuai Komitmen Global seperti Paris Agreement, SDGs, New Urban Agenda dan Komitmen Nasional untuk Pembangunan Rendah Karbon. Selain itu wawasan Kota sebagai Katalis Perubahan perlu diberdayakan dengan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan inovatif serta dapat melihat alternatif potensi finansial (Carbon finance and Carbon Trade) dalam pencapaian target penurunan karbon.

Catatan: Bahan-bahan Paparan dapat di akses melalui Web DRD Jakarta atau Web CityNet, sebagaimana daftar lampiran

Climate Leadership Program

*A three-part webinar session on leadership, low carbon innovations, and carbon trade and finance
September 16, 2020, Wednesday, 3:00 p.m. - 5:00 p.m., Korean Standard Time (KST), (1:00 – 3:00 PM WIB)*

September 23, 2020, Wednesday, 3:00 p.m. - 5:00 p.m. KST, (1:00 – 3:00 PM WIB)

September 25, 2020, Friday, 3:00 p.m. - 5:00 p.m. KST, (1:00 – 3:00 PM WIB)

Resilience Innovations and Carbon Trade in the Asia Pacific

Background

Confronted by sustainable development-related challenges, countries have aligned themselves in their commitment to implement different global agenda such as the Sustainable Development Goals, Paris Agreement, New Urban Agenda, and Sendai Framework which oriented them towards solutions to development challenges.

This global agenda – to make them more meaningful and to provide better outcomes - must be translated into innovative local strategies.

Developing innovation strategies require local leaders to think in a strategic and systematic manner so as not to waste time and resources. City leaders who are working towards climate change adaptation and mitigation must be receptive enough to tackle the nuances of the challenges in today's current disruptive world, characterized by volatility, uncertainty, complexity.

Moreover, the post-COVID 19 scenario raises further questions and creates new layers on the challenges as to how we can develop new ways of out-of-the-box strategic management, develop new capacities, and new collaboration for addressing climate change issues.

Climate Leadership Program

The Climate Leadership Program is an exclusive series of leadership and technical learning series that aims to increase the capacities of climate change practitioners in the Asia Pacific with the end view of helping them transform their communities while addressing impacts of climate change. This is jointly organized by CityNet and Jakarta Capital City Government with potential partners along the process.

This activity is also a global peer-based exchange of best practices of both innovative national and local climate actions. It will provide a regional platform for further knowledge exchanges of practical tools and tried-and- tested processes for the development of sustainable urban solutions to mitigate impacts of climate change.

The general objectives of this workshop:

1. To learn and familiarize basic leadership and problem solving approaches using systems design thinking while analyzing climate-related and the post covid-19 challenges;
2. To exchange information and insights on emerging global trends, regional situationers on climate change, private sector-led opportunities. local innovations and sustainable urban solutions relative to low carbon and and understanding the potential of project Carbon finance and Carbon Market Mechanism
3. To present different strategies city governments are implementing relative to financing climate adaptation and mitigation activities;
4. To learn on the different prototypes on climate change solutions and build further conversations as to how they can scale up and raise the prospect of replications to other countries;
5. To identify action plans and develop further prospects on sustainable city to city cooperation using different CityNet and other regional platforms.

Target Participants

City mayors, senior city managers, urban planners, environmental officers and key urban leaders and decision makers from public, private and civil society sectors.

Certificate Program

The CLP is an exclusive program but free of charge for those who are interested and committed to complete the three sessions. A general screening application process will be conducted to ensure the quality of the participation and outcome. At least, CityNet is expecting 30-50 international participants for each webinar.

A Certificate of Completion to be signed by CityNet and its partner organizations will be given to those who will successfully complete the program.

Webinar Methodology

- Leadership Session: Leading In Disruptive Times (Climate Change and the Pandemic)
- City sharing – Select participants and cities will share best practice/ solutions on integrating key questions prior to the session;
- Expert Hour – CityNet and different partners of CityNet will organize an expert hour session with the participants to spark further conversations and generate insights on the opportunities for carbon financing and Carbon Market;
- Discussion and Insights –Participants will be able to consolidate learnings and generate reflections on the program

Climate Leadership Program

CLIMATE LEADERSHIP PROGRAM

Towards Low Carbon Cities

CITYNET
THE REGIONAL NETWORK OF LOCAL AUTHORITIES FOR THE MANAGEMENT OF HUMAN SETTLEMENTS



ICLEI
Local Governments for Sustainability



ARCHICITY



Sept. 16, 2020
Sept. 23, 2020
Sept. 25, 2020

Program Details:

| Webinar Session 1: General Orientation / Climate Leadership Session September 16, 2020, Wednesday, 3:00 p.m.- 4:30 p.m., Korean Standard Time (KST) | | |
|--|--|---|
| Time | Activity | Person |
| 3:00 – 3:05 | General Welcome | Kevin Drouin, Program Officer, CityNet Secretariat / Facilitator, CLP Webinar Session 1 |
| 3:05 – 3:10 | Opening Remarks | Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T.M. Sc, Phd. Chairman, Jakarta Research Council, Jakarta City Government Indonesia |
| 3:10- 3:15 | Welcome Message – CityNet Secretariat | Geun Hyeong Yim, CityNet Chief Executive Officer |
| 3:15 - 3:25 | Special Message/Key Note – 2020 Climate Leadership Program /Climate Change Cluster | Aisa Tobing, Secretary-General, Jakarta Research Council /Deputy Secretary General, CityNet |
| 3:25- 3:35 | General Orientation for Participants / House Rules – | Paulie Mora, CityNet Senior Program Officer |
| 3:35- 4:05 | Leadership Session: Transformational Leadership in Digital World and New Normal | Frans Ade Nugraha Sugiarta, United in Diversity Academic Director/ co-founder, IDEAS Indonesia |
| 4:05- 4:35 | Open Forum | Kevin Drouin, Facilitator |
| 4:35- 5:00 | Recognition of Partners/ Closing Statement | Kevin Drouin, Facilitator/ Paulie Mora, Senior Program Officer |

citynet-ap.org/cities-urged-to-expand-financing-sources-to-support-climate-actions/

URBAN SDG KNOWLEDGE PLATFORM

Issues. This time the webinar tackled "Climate Finance: Tale of Asian Cities" on September 9, 2021.

CITYNET used on learning and gen... ABOUT NETWORK PROGRAMS EVENTS PUBLICATIONS NEWS GET INVOLVED

despite the competing priorities and limitations the cities are currently facing.



City experts from Beijing, Jakarta, and Mumbai have underscored the importance of access to funding to implement sustainable climate actions. This is imperative for cities as they account for 70% of global carbon emissions. Moreover, the COVID-19 pandemic is competing priorities while adding financing strain to cities.

Press Release

Monthly Newsletter

RECENT POSTS

- Sejong and Rotterdam exchange knowledge on smart mobility 2022.02.14
- Making cities walkable with Seoul and Dublin 2022.02.3
- Busan and Rotterdam discuss joint actions on mobility and logistics 2022.01.28
- Learn why Seoul is a global model on urban mobility! 2022.01.20

| Webinar Session 2: Carbon Finance September 23, 2020, Wednesday, 3:00 p.m. – 5:00 p.m., KST *tentative title, subject to further confirmation | | |
|--|---|--|
| 3:00 – 3:05 | Welcome Statement | Paulie Mora, Senior Program Officer/ Emcee |
| 3:05 – 3:15 | Context Setting | Maria Adelaida Antonette M. Cea, Technical Adviser/Coordinator, Cities and Climate Change Initiative Asia and the Pacific, UN HABITAT Regional Office for Asia and the Pacific |
| 3:15 – 3:35 | Mitigation and Carbon Finance Development | Paul Butarbutar, founder/ director, PT 3GT Servis Indonesia / PT JJB Sustainability Indonesia |
| 3:35- 3:55 | Carbon Finance and Private Sector Engagement* | Hannah Paik, Cities, States and Regions Lead, Asia Pacific, CDP |
| 3:55 - 4:10 | Open Forum | Maria Adelaida Antonette M. Cea, UN HABITAT Regional Office for Asia and the Pacific |
| 4:10- 4:30 | Carbon Finance* | Axel Michaelowa, President, Zurich Carbon Market Association |
| 4:30-4:50 | Cities on Carbon Finance* | c/o Beijing City Government |
| 4:50- 5:00 | Open Forum/ Closing Statement | Maria Adelaida Antonette M. Cea, UN HABITAT Regional Office for Asia and the Pacific |

| Webinar Session 3: Resilience Innovations and Carbon Trade in the Asia Pacific September 25, 2020, Friday, 3:00 p.m. – 5:00 p.m., KST *tentative title, subject to further confirmation | | |
|--|---|---|
| 3:00 – 3:05 | General Recap | Paulie Mora, Senior Program Officer/ Emcee |
| 3:00- 3:10 | Context Setting | Jeffrey Mulyono, Member, Board of Director, GrEEnAcc Indonesia |
| 3:10 – 3:30 | Carbon Finance and Carbon Trade* | c/o China Emission Exchange (CEEX) Guangzhou, Guangzhou City Government |
| 3:30- 3:50 | How to Finance Emission Reduction using Market Based Mechanism Scheme | Dicky Edwin Hindarto, Advisor, Indonesia Joint Crediting System |
| 3:50-4:00 | Open Forum | Jeffrey Mulyono, Member, Board of Director, GrEEnAcc Indonesia |
| 4:00-4:20 | The Development and Outlook of Green GDP* | Dr. Felicia Jang, Associate Researcher, Natural Resources Policy, Ministry of Natural Resources, People's Republic of China |
| 4:20- 4:40 | Resilience Innovations for Low Carbon: The Pasig City Experience | Allendri Angeles, acting City Environment and Natural Resources Officer and Solid Waste Management Officer, Pasig City, Philippines |
| 4:40 – 4:55 | Open Forum | Jeffrey Mulyono, Member, Board of Director, GrEEnAcc Indonesia |
| 4:55 – 5:00 | Closing Statement | Aisa Tobing, Secretary-General, Jakarta Research Council , Indonesia / Deputy Secretary General, CityNet |

05

Pemulihan Ekonomi Jakarta

Jakarta Tangguh

Kolaborasi DRD DKI Jakarta dengan TGUPP dan BPSDM

I. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 memberikan dampak baik pada aspek ekonomi dan sosial terutama wilayah DKI Jakarta sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam upaya memahami kondisi dan memberikan gagasan solusi terhadap permasalahan dampak pandemi, pada tanggal 24 Juni 2020, perwakilan DRD dari Komisi 2 (Komisi Ekonomi dan Keuangan) menyampaikan pandangan dan usulan kepada Bapak Gubernur Anies Baswedan dan Bapak Wagub Bapak A. Riza Patria, beserta Tim TGUPP. Perwakilan dari DRD tersebut adalah: Sunarsip (narasumber), Teddy R Bachtiar, Anang K. Umaedi, Khoirunnurofik.



Paparan kepada Gubernur dan Wagub DKI Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020.

Dalam pembahasan tersebut, DRD DKI Jakarta menyampaikan beberapa pemikiran mengenai kebijakan makro ekonomi dan mikro ekonomi, serta beberapa usulan spesifik untuk UMKM di DKI Jakarta. Arahan dari Bapak Gubernur setelah mendengarkan paparan tersebut adalah agar dilakukan workshop untuk lebih mendetailkan pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan serta merekomendasikan kebijakan spesifik kepada Pemda DKI Jakarta. Untuk melaksanakan arahan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, maka peserta diskusi dari DRD dan Tim TGUPP sepakat untuk melakukan diskusi online untuk menyelenggarakan workshop tersebut.

II. DISKUSI ONLINE

Persiapan Webinar dan Workshop 25 Juni 2020

Sebagai tindak lanjut dari pemaparan kepada Bapak Gubernur, maka pada keesokan harinya dilakukan diskusi online antara Tim TGUPP dan Tim Komisi 2 DRD untuk membahas arahan dari Bapak Gubernur.

Kesimpulan dari diskusi online tersebut disepakati tiga parameter utama untuk pemulihan Ekonomi Jakarta:

- A. Penciptaan lapangan kerja
- B. Penyerapan lapangan kerja
- C. Peningkatan Pendapatan, termasuk Penerimaan Pemda DKI Jakarta.

Secara teknis, untuk menyusun usulan kebijakan dan aksi spesifik diperlukan dua tahap kegiatan berbeda:

- A. Webinar untuk membahas garis besar dan memperluas perspektif mengenai pemulihan ekonomi, termasuk untuk menjangkau pandangan dari berbagai stake holders dan dunia usaha. Diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2020
- B. Workshop dengan kehadiran fisik untuk membahas hasil webinar tersebut dan menyampaikan rekomendasi spesifik untuk pemulihan Ekonomi Jakarta. Workshop dilakukan secara fisik dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat pada tanggal 2 Juli 2020.

Untuk pelaksana kegiatan disepakati akan diserahkan kepada Jakarta Public Policy Center – BPSDM DKI Jakarta. Terlampir:

- A. Lampiran 1 – TOR untuk Webinar dan Workshop berdasarkan diskusi online tanggal 25 Juni
- B. Lampiran 2 – Undangan untuk Bapak Sunarsip dari DRD sebagai nara sumber untuk Webinar dan Workshop
- C. Lampiran 2 – Undangan kepada anggota DRD untuk mengikuti Webinar dan Workshop pada tanggal 1 dan tanggal 2 Juli 2020.

III. WEBINAR

Webinar Pemulihan Ekonomi pada tanggal 1 Juli 2020

Acara Webinar Pemulihan Ekonomi Jakarta dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rasyid Baswedan, dan mencakup pembahasan oleh empat narasumber:

- 1) Ibu Sri Haryati, Asisten Perencanaan dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Bapak Sunarsip, Ekonom Senior The Indonesia Economist Intelligence dan Wakil Ketua DRD Provinsi DKI Jakarta
- 3) Bapak Amin Subekti, Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta
- 4) Bapak Thomas Trikasi Lembong, Pelaku Usaha dan Mantan Kepala BKPM serta Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Materi Pembicara 1 (Ibu Sri Haryati):

Pandemi dan Dampaknya pada Revisi RPJMD dan KSD oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Transformasi Kota Pasca Pandemi: Upgrade Visi Jakarta

Kota Jakarta memiliki beberapa gagasan, diantaranya Kolaborasi dan City 4.0, Regenerasi Ibukota, dan Jakarta Smart City. Menanggapi kondisi pandemi saat ini, diharapkan Jakarta memiliki strategi akselerasi dan Upgrade Pasca Pandemi untuk menanggapi kondisi yang diprediksi akan terjadi seperti krisis kesehatan, krisis ekonomi, terobosan digitalisasi, dan masalah lingkungan hijau. Jakarta saat ini memerlukan transformasi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dan mengambil peluang untuk mewujudkan pembaharuan/ upgrade visi kota Jakarta seperti Pandemic Proof City, Crisis Resilient City, Digitally Advanced City, dan Sustainable and Liveable City.

Webinar ini bertujuan untuk memperoleh bahan referensi dari praktisi dan akademisi terkait bagaimana inisiatif untuk pemulihan ekonomi Jakarta.

Rabu, 01 Juli 2020
09:00 WIB

Registrasi Peserta :
https://bit.ly/webinar_jakartatangguh

Pembicara

- Sambutan
Anies Rasyid Baswedan, Ph.D
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Dr. Amin Subekti, M.B.A**
Ketua TGUPP Prov. DKI Jakarta
- Dr. Sri Haryati, S.PI, M.Si.**
Asisten Perencanaan dan Keuangan
Prov. DKI Jakarta
- Dr. Sunarsip, Ak., M.E.**
Wakil Ketua Dewan Riset
Daerah Prov. DKI Jakarta
- Thomas Lembong, A.B.**
Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Tahun 2015 - 2016

Kontak
BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Gedung Teknis Abdi Muis II Jakarta Pusat
Telp. (021) 3865500
Email: jktpp@gmail.com
Website: www.bpsdm.jakarta.go.id/gppc

@jktppc

Mengacu pada upgrade visi tersebut, dapat diterjemahkan dalam 4 hal, diantaranya; space (ruang), di mana Jakarta akan berkembang dengan berorientasi pada era digital dan komunitas, business (bisnis), Jakarta dapat lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan Industri, government (tatanan pemerintahan), Jakarta akan menjadi pemerintahan yang lebih cepat tanggap dan berbasis data, Welfare (Kesejahteraan), Jakarta menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan terpersonalisasi.

A. Space

Dalam kondisi sebelumnya, Jakarta menerapkan pembangunan yang berorientasi pada kendaraan pribadi, perencanaan monosentris, dan kurangnya pelayanan dasar. Namun, merespon kondisi pandemi saat ini, Jakarta menjadi menerapkan pembangunan berorientasi transit (TOD), perencanaan polisentris, dan terpenuhinya pelayanan dasar. Menanggapi kondisi spesial saat ini, akhirnya Jakarta melakukan upgrade di bidang pembangunan menjadi berorientasi digital, perencanaan berbasis neighborhood, dan pelayanan dasar berketahanan.

(Space) Pengembangan Spasial Baru di Jakarta yang Berorientasi Digital dan Komunitas

Pembangunan Berorientasi Digital

Mendorong kehidupan kota berbasis digital yang berkelanjutan dan efisien, dengan memprioritaskan investasi infrastruktur digital dan percepatan adopsi digital di semua sektor. Meminimalisasi kebutuhan mobilitas fisik.

Perencanaan berbasis Neighborhood

Menciptakan lingkungan permukiman (neighborhood) yang mandiri, dengan menghadirkan pelayanan dan fasilitas kota di tingkat tersebut. Mengarahkan investasi publik yang lebih berdampak di tingkat lokal.

Pelayanan Dasar Berketahanan

- 1) Ruang publik - ruang komunal & hub digital
- 2) Tempat usaha & hub logistik mikro
- 3) Pelayanan kesehatan yang multi-faceted
- 4) Pusat makanan yang higienis & terjangkau
- 5) RTH yang adaptif
- 6) Perumahan vertikal terjangkau
- 7) Air bersih dan sanitasi yang tersedia di masyarakat.

B. Government

Dalam kondisi sebelumnya, Jakarta menerapkan Model Organisasi Struktural, Pemerintahan dengan Dukungan IT, dan Manajemen Performa Berbasis Aktivitas, Namun, merespon kondisi pandemi saat ini, Jakarta menjadi menerapkan Model Organisasi Fungsional, Pemerintahan Digital dengan Penargetan, dan Manajemen Performa Berbasis Output. Menanggapi kondisi spesial saat ini, akhirnya Jakarta melakukan upgrade pengembangan dengan menambahkan Model Organisasi Dinamis, Pemerintahan Digital Menyeluruh (End-to-end), dan Manajemen Performa yang Agile.

Reformasi Birokrasi di Jakarta untuk Pemerintahan yang Agile dan Data-driven

Model Organisasi Dinamis

- 1) Organisasi yang adaptif yang mampu untuk thinking ahead, thinking again, and thinking across.
- 2) Efektivitas dalam organisasi dimana seluruh anggota memiliki keahlian, mampu melakukan percepatan pembuatan kebijakan, dan berorientasi pada delivery.
- 3) Model kerja yang dinamis dan fleksibel.

Pemerintahan Digital Menyeluruh (End-to-end)

- 1) Memanfaatkan teknologi end-to-end pada pelayanan pemerintah untuk peningkatan kualitas layanan
- 2) Menghasilkan data real-time untuk pembuatan kebijakan yang berbasis data (data-driven policies).
- 3) Menciptakan transparansi dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Manajemen Performa yang Agile

- 1) Penilaian kinerja yang adaptif, human-centered, inklusif dan berkelanjutan
- 2) Prioritاسasi yang jelas dan dampak riil di lapangan
- 3) Peningkatan kemampuan coaching skills (mengarahkan cara mencapai target dan sasaran)
- 4) Sistem merit-based yang terintegrasi dan dinamis.

C. Welfare

Dalam kondisi sebelumnya, Jakarta menerapkan Manajemen Data Tersegregasi, Intervensi Homogen dengan Dampak Tidak Terukur, dan Keterbatasan Akses Layanan. Namun, merespon kondisi pandemi saat ini, Jakarta menjadi menerapkan Integrasi Manajemen Data, Intervensi yang customized secara parsial, dan afirmasi bagi kelompok tertentu. Menanggapi kondisi spesial saat ini, akhirnya Jakarta juga melakukan upgrade pengembangan dengan menambahkan Manajemen Data Dinamis dan Personal, Intervensi Berdasarkan Kebutuhan Personal dengan Dampak Terukur, dan Akses Layanan Universal Melalui Dukungan Digital.

Pola Pengembangan SDM di Jakarta dengan Pelayanan Inklusif dan Personalized

Manajemen Data Dinamis dan Personal

- 1) Single ID yang terkoneksi ke seluruh layanan pemerintah.
- 2) Layanan kesejahteraan yang dinamis dengan mengikuti perubahan kondisi dan kebutuhan sosial-ekonomi individu.

Intervensi Berdasarkan Kebutuhan Personal dengan Dampak Terukur

- 1) Pemerintah memahami kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap warganya melalui penyesuaian jenis pelayanan sehingga memberikan hasil yang lebih berdampak.
- 2) Pelayanan dasar yang terdokumentasi dengan baik dan berkelanjutan.
- 3) Dimungkinkan dengan adanya personalized data dan dukungan digital; sehingga proses administrasi yang panjang menjadi tidak relevan.

Akses Layanan Universal Melalui Dukungan Digital

- 1) Sumber pengetahuan dan layanan kesejahteraan bersifat demokratis dan universal. Pemerintah berperan sebagai enabler.
- 2) Semua orang dapat mengakses sumber pengetahuan dan layanan kesejahteraan terlepas dari kondisi sosial-ekonomi, lokasi dan infrastruktur.

D. Business

Dalam kondisi sebelumnya, Jakarta menerapkan Tenaga Kerja Berkeahlian Rendah, Industri Homogen, dan Sistem Perizinan Manual. Namun, merespon kondisi pandemi saat ini, Jakarta menjadi menerapkan Reformasi Bisnis dengan Tenaga Kerja Berbasis Keahlian, Industri Terspesialisasi, dan Sistem Perizinan Daring. Menanggapi kondisi spesial saat ini, akhirnya Jakarta juga melakukan upgrade pengembangan dengan menambahkan Tenaga Kerja Adaptif Secara Digital, Industri Berbasis Pengalaman Baru dan Nilai Tambah, dan Automasi Sistem Perizinan.

Reformasi Bisnis di Jakarta dengan Adaptive Economy & Experiential Industries

Tenaga Kerja Digitally Adaptable

- 1) Menciptakan tenaga kerja yang digitally-able & digitally-enabled.
- 2) Meningkatkan kemampuan beradaptasi secara mental dan keterampilan terhadap perubahan kondisi dan krisis di depan.

Industri Berbasis Pengalaman Baru dan Nilai Tambah

- 1) Industri dan pebisnis akan berfokus pada beragam pengalaman dan nilai tambah dibandingkan hanya mengikuti tren:
- 2) Industri mikro kreatif
- 3) Digital economy development and hub
- 4) Alternative value tourism
- 5) Unique-valued export
- 6) Industri dan pariwisata dengan nilai budaya dan historis

Automasi Sistem Perizinan

- 1) Kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas pada perizinan dengan proses automasi.
- 2) Customer Service online dan offline yang berkualitas, dengan system automasi yang mengurangi kebutuhan peran serta sumber daya manusia.
- 3) Fair judgment & quality control dalam perizinan yang kompleks melalui teknologi automasi.

Adapun pendekatan yang dilakukan untuk menuju visi Jakarta pasca-pandemi, di antaranya

Pendekatan Utama Jakarta: Melalui Kolaborasi.

Jakarta nantinya akan membangun kolaborasi yang solid antar pemerintah, pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan sektor usaha, dan antar masyarakat untuk mencapai kemajuan kota dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah akan bertindak sebagai kolaborator dan masyarakat berperan sebagai ko- kreator.

Materi Pembicara 2 (Bapak Sunarsip):

Strategi Percepatan Pemulihan Dunia Usaha, terutama UMKM, di DKI Jakarta Pasca Covid (Macro and Micro Policy Level)

Kinerja Ekonomi – Dampak Covid-19

Pertumbuhan ekonomi seluruh daerah terdampak Covid 19. Secara makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan dari kuartal pertama tahun 2019 ke kuartal 1 2020 sebesar 2,1% dari 5,07% (Q1 2019) ke 2,97% (Q1 2020) dengan provinsi yang tumbuh paling lambat adalah provinsi Jambi dengan pertumbuhan di kuartal 1 2020 sebesar 1,65%. Beberapa provinsi justru mengalami pertumbuhan minus di kuartal 1 2020, diantaranya adalah provinsi DIY dan Bali. Hal ini dikarenakan rendahnya dan matinya sejumlah aktivitas sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi wilayah.

Distribusi Dampak Penurunan Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi akibat lock-down di Jakarta

Kebijakan lock-down yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah, namun juga diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi lainnya. Jawa Timur sebagai provinsi yang paling terdampak akibat lock down Jakarta dengan persentase distribusi dampak sebesar 23,3%, kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Barat sebesar 19,2%, dan Jawa Tengah sebesar 10,2%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan kondisi perekonomian antar wilayah. Kebijakan lock down memberikan dampak penurunan aktivitas ekonomi di beberapa wilayah lain dikarenakan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kedudukan kantor pusat bisnis di Indonesia di mana menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan, Jakarta menjadi net-importer terhadap daerah lainnya, dan Jakarta sebagai jalur utama transportasi udara dan laut. Pulau Jawa sebagai wilayah yang paling terdampak karena merupakan kontributor terbesar di sektor perdagangan dan Industri di Indonesia.

Berdasarkan data struktur ekonomi DKI Jakarta, dapat dijelaskan bahwa sektor sekunder dan tersier menjadi sektor yang mendominasi PRDB DKI Jakarta dengan pangsa pasar 24,28% untuk sektor sekunder dan 75,42% untuk sektor tersier. Lebih dari 85% PRDB Industri Pengolahan DKI Jakarta berasal dari 5 sub-sektor, diantaranya adalah Industri Alat Angkutan, Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional, Industri Makan Minum, Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik dan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Industri Alat Angkut menjadi industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu lebih dari 50% terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan DKI Jakarta.

Menurut komponen pendapatan, surplus usaha menjadi komponen terbesar bagi pembentuk PDRB DKI Jakarta. Dominasi Surplus Usaha dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta menurut pendapatan sangat wajar, mengingat banyaknya jumlah perusahaan multinasional yang beroperasi di Jakarta. Selama 3 tahun berturut-turut (2016, 2017, dan 2018), telah terjadi perubahan struktur PDRB, dimana pangsa Surplus Usaha menurun sedangkan pangsa Upah/Gaji meningkat. Perubahan struktur ini merupakan dampak kenaikan UMP Jakarta. Rata-rata kenaikan UMP tiga tahun tersebut adalah sebesar 10,59% per tahun. Lebih dari 50% upah/gaji berasal dari 4 sektor ekonomi yaitu sektor administrasi pemerintahan (18,58%), perdagangan (12,31%), industri pengolahan (10,60%), dan konstruksi (10,01%).

Secara neto pendapatan, DKI Jakarta memiliki pendapatan faktor neto yang surplus. Namun, surplus aliran pendapatan faktor neto ini disebabkan karena Surplus Usaha jauh lebih besar dibandingkan dengan defisit dari upah/gaji. Pendapatan faktor neto Upah/Gaji Provinsi DKI Jakarta bernilai negatif yang berarti bahwa nilai Upah/Gaji yang keluar dari Jakarta lebih besar dari nilai Upah/Gaji yang masuk ke Jakarta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa lebih banyak tenaga asing dan pekerja komuter yang bergantung nafkahnya di Jakarta dibandingkan penduduk Jakarta yang bekerja di luar

Jakarta maupun luar negeri. Pendapatan faktor neto surplus usaha mempunyai nilai positif dimana nilai positif ini mencerminkan bahwa surplus usaha yang masuk ke Jakarta lebih banyak dibandingkan nilai yang keluar dari Jakarta. Selain itu, penduduk maupun perusahaan Jakarta banyak yang memiliki saham di perusahaan yang berlokasi di provinsi lain bahkan di luar negeri.

Pendapatan Faktor Neto yang Surplus dan Implikasi Kebijakan

Beberapa rekomendasi yang bisa diberikan terkait dengan profil Pendapatan Faktor Neto DKI Jakarta:

- 1) Kecenderungan peningkatan pendapatan upah gaji berimbas pada menurunnya surplus usaha, ini berarti keuntungan yang diterima oleh usaha berkurang karena beban biaya upah gaji yang semakin besar. Untuk itu dibutuhkan skema kebijakan yang dapat mengatasi kondisi tersebut sehingga tidak mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Jakarta, atau setidaknya dapat menahan laju relokasi usaha dari Jakarta ke luar Jakarta.
- 2) Besarnya pendapatan faktor neto yang masuk Jakarta dalam wujud surplus usaha membuka peluang lebih besar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak DKI Jakarta (potensi pajak yang besar). Berarti pula perlu disiapkan strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan intensitas pajak tanpa menyebabkan kontraproduktif terhadap penerimaan pajak
- 3) Tingginya surplus usaha mengindikasikan pula peningkatan pendapatan perusahaan sehingga dapat lebih didorong untuk meningkatkan kontribusi terhadap lingkungan, baik dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dalam bentuk skema pembinaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah

Lebih dari 70% pelaku usaha di DKI Jakarta bekerja di 3 sektor ekonomi utama, diantaranya sektor industri pengolahan (7,9%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (27,97%), dan sektor perdagangan besar dan eceran (36,73%).

Lebih dari 90% pelaku usaha di DKI Jakarta bekerja di usaha Mikro (80,95%) dan Kecil (12,50%) yang tersebar di 3 sektor utama yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan sektor Industri Pengolahan. Meskipun pelaku usaha besar terbilang minim, sebesar kurang dari 1%, namun sektor usaha besar termasuk salah satu sektor usaha yang menyerap tenaga kerja besar di Indonesia sebesar 24,28% dengan komposisi tenaga kerja di setiap skala usaha relatif merata. Sebagian besar pelaku usaha di DKI Jakarta belum memanfaatkan fasilitas internet terutama untuk pelaku usaha di sektor Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum yang sebagian besar merupakan pelaku di usaha Mikro. Hanya sekitar kurang dari 10% pelaku usaha yang telah memanfaatkan internetnya untuk menjalankan usahanya.

Dari seluruh pelaku usaha, lebih dari 80% di DKI Jakarta hanya mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 5% terutama perusahaan/ pelaku usaha yang menjalankan usahanya di sektor Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang sebagian besar merupakan sektor usaha Mikro.

Melihat kondisi saat ini, pandemi ini memberikan dampak terhadap bisnis UMKM di mana 36,7% bisnis UMKM tidak menerima penjualan selama periode covid 19, 26% mengalami penurunan penjualan lebih dari 60%, 15% mengalami penurunan antara 31-60%, 14,2% mengalami penurunan di antara 10-30%, dan sisanya mengalami penjualan dengan nilai jumlah yang sama dengan periode sebelumnya dan 3,6% mengalami peningkatan nilai penjualan (Gambar. 2)

Kendala yang dialami pelaku bisnis UMKM mayoritas adalah kebutuhan lebih atas restrukturisasi pinjaman atau kredit (92,6%), keterbatasan pasokan bahan baku (48,3%), dan tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman (26,6%).

Karena mayoritas pelaku bisnis di DKI Jakarta adalah pelaku sektor usaha UMKM, terjadinya sudden stop UMKM sangat berdampak besar terhadap penurunan PDRB di DKI Jakarta. Dengan skenario sudden-stop selama 3 bulan, DKI Jakarta mengalami estimasi kerugian pendapatan mencapai 1,09% terhadap PDRB sedangkan Bodetabek mengalami estimasi kerugian pendapatan sebesar 4,75%. Sedangkan untuk kerugian output diestimasi mencapai 3,41% terhadap PDRB untuk wilayah DKI Jakarta dan kerugian output mencapai 15,20% untuk wilayah Bodetabek.

Mengacu pada data BPS, 2019 dijelaskan bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi dengan magnitude besar dapat diandalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi DKI Jakarta pasca covid-19, diantaranya adalah kontributor pelaku usaha sebesar 90,65%, tenaga kerja sebesar 81,74%, dan pendapatan sebesar 85,72%.

Merespon kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi saat ini, pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 melalui stimulus fiskal di level kebijakan Makro seperti dana dukungan ABPM untuk pemulihan UMKM terdampak covid-19 sebesar 68,21 triliun rupiah yang diberikan melalui subsidi bunga untuk UMKM dan Ultra Mikro dengan total subsidi sebesar 34,15 triliun, alokasi untuk insentif perpajakan UMKM sebesar 28,06 triliun, dan dukungan pinjaman UMKM sebesar 6 triliun rupiah. Dukungan pinjaman UMKM ini berupa pembayaran imbal jasa penjaminan, counter guarantee (penjaminan balik), loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan.

Selain itu, kebijakan Makro yang diberikan pemerintah lainnya adalah stimulus kredit UMKM dengan total outstanding kredit penerima subsidi bunga sebesar 1.601 triliun rupiah. Paket stimulus subsidi bunga kredit yang diberikan pemerintah dengan total 34,1 triliun rupiah dan total penundaan pokok dengan total 285,1 triliun rupiah yang disalurkan melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan, KUR, UMi, Mekar, Pegadaian.

Sedangkan untuk kebijakan Mikro, pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat berfokus pada peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar melalui pengembangan kapasitas usaha, standardisasi dan sertifikasi produk, dan penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan teknis dan kewirausahaan, Inkubasi usaha, digitalisasi UMKM, dan penguatan kapasitas layanan usaha.

Dalam kondisi saat ini, UMKM harus mampu beradaptasi terhadap perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen terutama terkait penggunaan teknologi informasi, modifikasi produk, kolaborasi pasokan, standar keamanan, dan diversifikasi pasar. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah, BUMN/D, dan pemangku kepentingan lain sangat dibutuhkan untuk mampu mempercepat proses adaptasi UMKM. Tantangan yang tengah dihadapi di masa pandemi ini adalah akselerasi UMK melalui mendorong penggunaan internet yang notabene per tahun 2017, hanya 15,9% UMK non pertanian yang menggunakan fasilitas internet untuk mendukung bisnis.

Materi Pembicara 3 (Bapak Amin Subekti): Transformasi kota menuju #JakartaTangguh Masyarakat perlu untuk melihat dampak covid-19 dari perspektif lain yaitu penyesuaian dan akselerasi. Dampak adanya pandemi saat ini menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas telemedicine dengan peningkatan sebesar 1.5 kali lipat traffic dan user pada platform Alodokter, terjadi akselerasi industri digital dimana aktivitas belanja online meningkat hingga 20%. Saat PSBB, Transaksi digital di Indonesia melonjak 64,48% dan Volume transaksi digital tumbuh 37,35% (Bank Indonesia, Juni 2020). Salah satu platform e-commerce (Tokopedia) claim penambahan 2,3 juta mitra UMKM dalam waktu setahun. Sebelumnya, membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai 6 juta mitra kegiatan produktif di rumah.

Hasil survei yang dilakukan BCG menyimpulkan bahwa 33% penduduk Indonesia berencana meningkatkan belanja internet. Selama pandemi, 4000 lebih perusahaan dengan lebih dari 1 juta pegawai di Jakarta bekerja di rumah sehingga dapat dijelaskan bahwa produktif di rumah dapat menjadi solusi akselerasi selama masa pandemi. Selain itu, lebih dari 1,5 juta murid belajar mengajar online di rumah, meningkatnya mobilitas berbasis sepeda, dan kualitas udara yang meningkat dan menjadi kualitas udara terbaik selama 5 tahun. Meskipun saat ini terdapat tantangan berupa krisis ekonomi dan kesehatan, namun peluang yang dapat dioptimalisasi dengan adanya pandemi adalah meningkatnya digitalisasi dan lingkungan berkelanjutan. Kondisi pandemi dapat memperkaya perspektif kebutuhan Jakarta untuk mampu melakukan akselerasi dan pengembangan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Materi Pembicara 4 (Bapak Thomas Trikasih Lembong): Peluang dan Strategi Dunia Usaha Jakarta dengan COVID-19

Kondisi pandemi saat ini mau tidak mau akan menyebabkan perubahan drastis di beberapa aspek dan bersifat permanen. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memicu ledakan pertumbuhan sektor e-commerce yang terbilang dramatis dengan rata-rata pertumbuhan penjualan sebesar 26% dari kuartal 2 2019 ke 2020. Diperkirakan dampak PSBB adalah percepatan migrasi offline ke online menjadi 3-9 tahun lebih awal. Dampak permanen covid-19 pada pola hidup dan usaha masyarakat dimana sekalipun pandemi berakhir 2 – 3 tahun dari sekarang dengan distribusi luas vaksin, beberapa perubahan pola kerja & pola hidup akibat COVID-19 akan permanen, dan dunia tidak akan kembali ke pola usaha dan pola hidup pra-pandemi.

Untuk bisa sukses di ‘dunia baru’ pasca-COVID-19, pelaku usaha harus bisa mengikuti, meneruskan dan menjiwai beberapa perubahan total yang terjadi. Contohnya; telah terjadi pergeseran yang fundamental dalam paradigma konsumen terkait sanitasi dan hygiene pada seluruh produk dan jasa yang ingin dikonsumsi – dari jasa lifestyle sampai transportasi dan perhotelan (hospitality).

Di samping hal yang akan berubah secara permanen, terdapat pula hal yang tidak berubah dengan Covid-19 dimana rantai pasok dunia akan semakin saling berhubungan. Globalisasi dan internasionalisasi tidak akan berhenti, tapi bahkan akan mengalami akselerasi dan ekspansi. Dunia digital secara fundamental adalah sebuah dunia yang bersifat global dan tidak mengenal perbatasan (“bor-

derless”). Meskipun pandemi menjadi tantangan khusus bagi pelaku usaha, namun globalisasi dan internasionalisasi tidak akan berhenti bahkan akan mengalami akselerasi dan ekspansi khususnya di wilayah DKI Jakarta yang akan semakin menjadi metropolis utama di Indonesia. Jakarta akan tetap menjadi “gerbang utama” (gateway) untuk lalu lintas multisektor keluar dan masuk Indonesia. Jabodetabek akan tetap menjadi daerah yang paling bankable dan memiliki daya beli tertinggi dibandingkan daerah lain bahkan jarak antar daya saing Jabodetabek dan daerah lain justru akan melebar.

Kontinuitas selanjutnya adalah Jakarta akan terus menjadi wilayah terdepan dalam recovery pasca Covid-

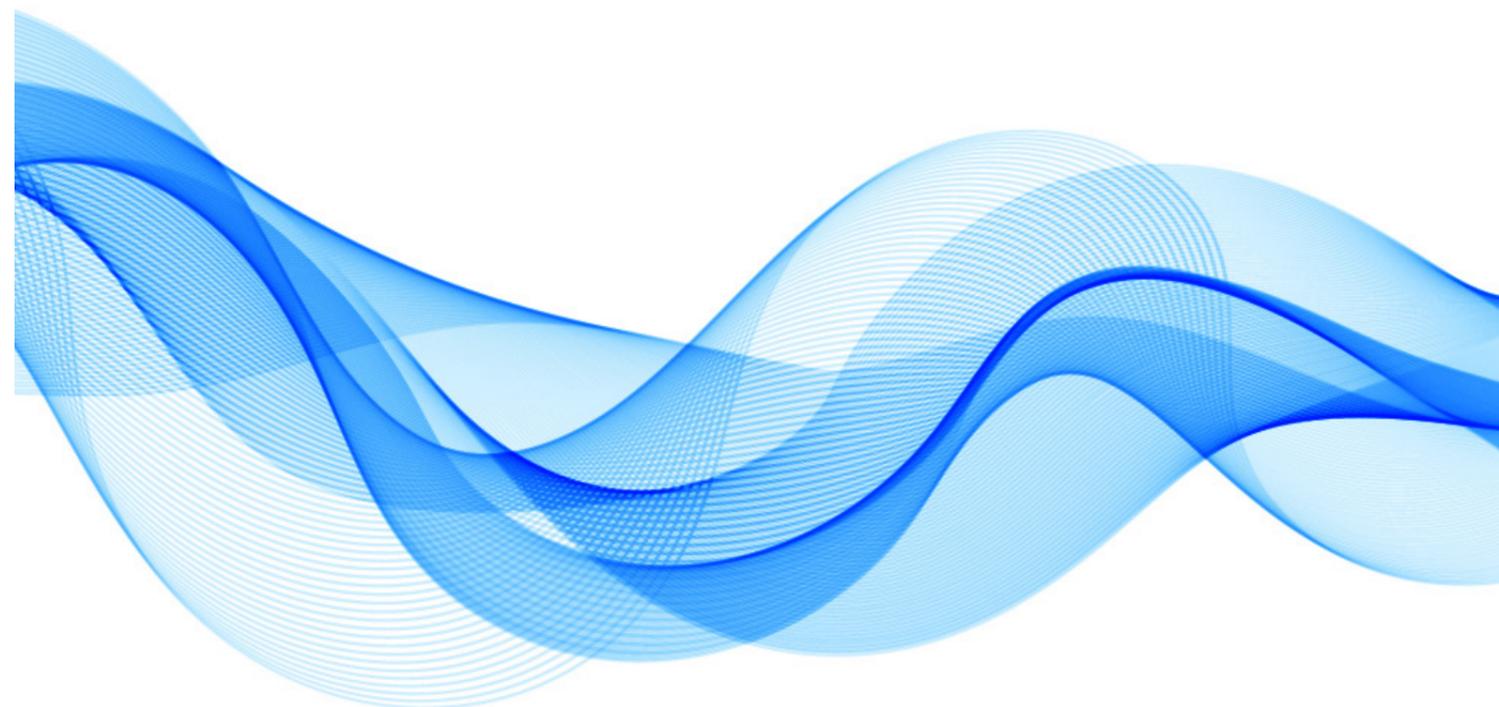
19. Jakarta sudah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19, dan kemungkinan besar dapat mencegah kembali menjadi zona merah. Terlepas dari laju infeksi, daerah-daerah di luar Jabodetabek akan dihantam lebih keras oleh multikrisis COVID-19 dalam 2 - 3 tahun ke depan. Ini konsisten dengan pengalaman kawasan lain seperti Eropa dan Amerika, dimana sentra-sentra perekonomian lebih tangguh menghadapi COVID-19 daripada daerah yang jauh dari sentra.

Menanggapi perubahan dan kontinuitas ini, maka disarankan untuk pelaku usaha tetap optimis dan mampu menjalankan transformasi total menuju digitalisasi yang lebih komprehensif. Mengingat akan terjadi resesi ekonomi global dan regional, pelaku usaha dari seluruh dunia akan semakin sengit merebut pasar, termasuk di Indonesia, maka diharapkan pelaku usaha mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya secara drastis, Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang di tawarkan, dan multilingual.

IV. WORKSHOP



Workshop Pemulihan Ekonomi Jakarta, tanggal 2 Juli 2020



06

Mewujudkan Lansia yang Sehat di Perkotaan pada Era Kenormalan Baru

Kolaborasi DRD DKI Jakarta dengan Studi Kajian Pengembangan Perkotaan SKSG UI

I. LATAR BELAKANG

Saat ini pandemi Virus Corona/Corona Virus Disease (disingkat COVID-19) masih terus berlangsung. Tidak ada pilihan bagi masyarakat selain menghadapi wabah ini dengan era Normal Baru. Kesiapan masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi era ini masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai panduan dan protokol dalam menghadapi wabah sudah tersedia, namun jumlah orang yang positif terinfeksi virus ini masih terus bertambah, bahkan dengan angka kematian yang cukup tinggi di dunia.

Wabah COVID-19 ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (PHEIC) dan virusnya sekarang sudah menyebar ke berbagai negara dan teritori. Masih banyak yang belum diketahui tentang virus penyebab COVID-19, tetapi diketahui bahwa virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan cairan saluran napas orang yang terinfeksi (yang keluar melalui batuk dan bersin). Meskipun COVID-19 terus menyebar, masyarakat harus mengambil tindakan untuk mencegah penularan lebih jauh.

Saat ini pandemi masih berlangsung bahkan cenderung memperlihatkan adanya tanda-tanda akan mereda, karenanya tidak ada pilihan lain selain bagi masyarakat dan Pemerintah untuk menghadapi pandemi ini dengan tatanan kehidupan baru. Untuk itu segala persiapan harus dilakukan termasuk melakukan edukasi di segala aspek kehidupan, baik dari segi sosial, kesehatan, ekonomi dan keamanan. Salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap sendi kehidupan ini adalah kelompok lansia (lanjut usia).

Pengertian lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Perkembangan demografi ini dapat membawa dampak bagi kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Jumlah penduduk lansia di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, tahun 2018, penduduk usia 60 tahun ke atas berjumlah 793.201 jiwa atau sekitar 7,6 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Pada tahun 2019, jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas menjadi 842.832 jiwa atau sekitar 8 persen dari total penduduk DKI Jakarta (<https://jakarta.bps.go.id>). Peningkatan jumlah dan proporsi lansia ini memberikan implikasi pada tantangan untuk mewujudkan penuaan yang sehat (healthy ageing), terutama pada era new normal.

Guna memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Pengelola Perkotaan, maka perlu dilakukan diskusi daring terkait dengan kesiapan para pengelola perkotaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan penuaan yang sehat di era tatanan kehidupan normal baru. Untuk itu Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan SKSG UI bekerja sama dengan DRD DKI Jakarta berinisiasi melaksanakan Seminar Daring dengan judul "Mewujudkan Lansia yang Sehat di Perkotaan pada Era New Normal".

II. TUJUAN

- Memahami trend kenaikan penduduk lansia di Indonesia dan di DKI Jakarta khususnya.
- Memahami keberadaan penduduk lansia dan sebarannya secara spasial di DKI Jakarta.
- Memahami keterkaitan keberadaan penduduk lansia dan penyebaran Covid-19 secara spasial di DKI Jakarta.
- Sebagai kontribusi Kajian Pengembangan Perkotaan SKSG UI dan DRD dalam mewujudkan lansia yang sehat di era tatanan kehidupan baru.
- Merumuskan policy brief penanganan penduduk lansia di era new normal kepada Pemerintah DKI Jakarta pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya.

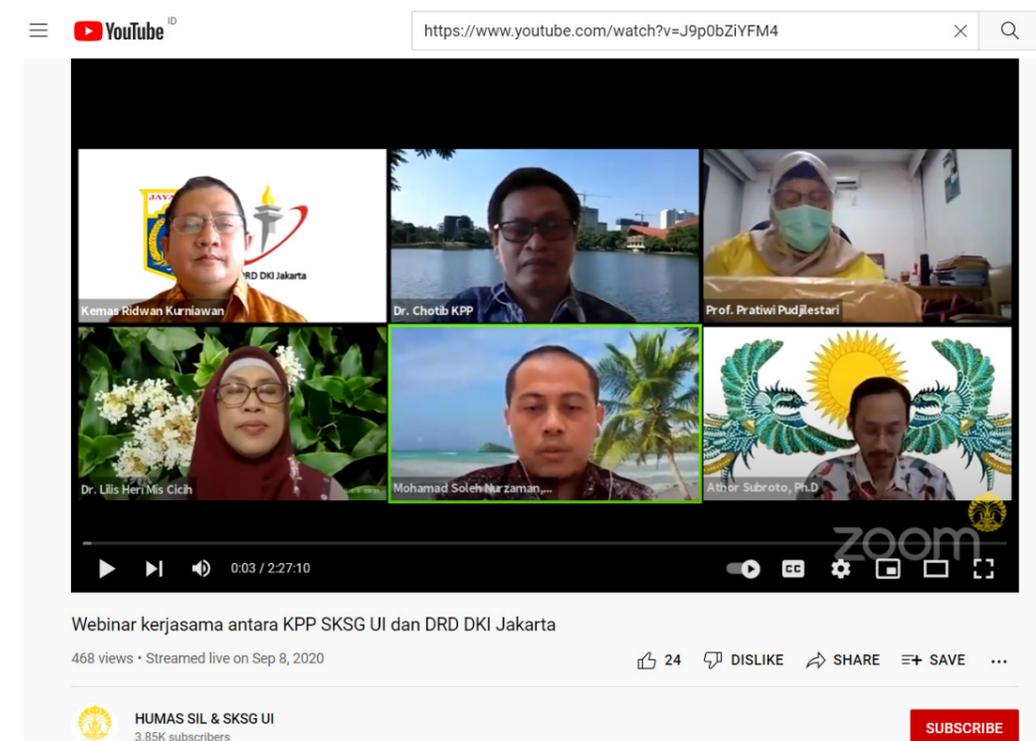
III. LUARAN

Hasil diskusi akan berupa perumusan Policy Brief upaya mewujudkan lansia yang sehat di masa era new normal kepada Gubernur DKI Jakarta.

Peserta: Peserta terbuka untuk umum terutama pihak yang tertarik dengan masalah kesehatan lansia dan perkotaan. Peserta yang hadir pada saat acara berlangsung kurang lebih 60 orang. Peserta memperoleh e- sertifikat berdasarkan daftar kehadiran pada tautan diberikan pada saat acara berlangsung.

IV. PELAKSANAAN

Webinar ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 13.00 – 15.30 WIB melalui video conference Zoom. Di samping itu acara ini juga disiarkan secara langsung melalui youtube streaming pada tautan <https://www.youtube.com/watch?v=J9p0bZiYFM4>.



Pemateri:

Pemateri acara ini diisi oleh Prof. Pratiwi Pudjilestari (Guru Besar FKUI/Anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta), Dr. Lilis Heri Mis Cich (Peneliti masalah Lansia Lembaga Demografi FEB UI), dan Dr. Chotib (Kaprodikajian Pengembangan Perkotaan/Anggota DRD DKI Jakarta).

Moderator:

Dr. Moh. Soleh Nurzaman, MA (Anggota DRD DKI Jakarta/dosen SKSG UI).

Agenda:

Susunan acara kegiatan sebagai berikut:

| No | Waktu | Aktivitas | PJ |
|----|-------------------|--|------------|
| 1. | 13.00 – 13.05 WIB | Pembukaan oleh Moderator, Dr. Moh. Soleh Nurzaman, MA. | Moderator |
| 2. | 13.05 – 13.15 WIB | Sambutan dari Direktur SKSG UI, Athor Subroto, Ph.D. | Moderator |
| 3. | 13.15 – 13.25 WIB | Sambutan dari Ketua DRD DKI Jakarta, Prof. Ridwan Kemas Kurniawan | Moderator |
| 4. | 13.25 – 13.45 WIB | Materi inti I: Dr. Lilis Heri Mis Cich (Mempersiapkan Kesehatan Lansia di masa Era <i>New Normal</i>) | Narasumber |
| 3. | 13.45 – 14.05 WIB | Materi inti II: Dr. Chotib, M.Si (Efek Spasial Keberadaan Lansia terhadap Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta) | Narasumber |
| 3. | 14.05 – 14.25 WIB | Materi inti III: Prof. Pratiwi Pudjilestari (Upaya Pemerintah Prof. DKI Jakarta dalam Mewujudkan Lansia yang Sehat) | Narasumber |
| 4. | 14.25 – 15.25 WIB | Diskusi Aktif dengan Peserta | Moderator |
| 5. | 15.25 – 15.30 WIB | Penutupan dan Foto Bersama Daring | Moderator |

V. RINGKASAN HASIL DISKUSI

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Lilis Heri Mis Cich tentang peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia, baik dari segi jumlah secara absolut maupun persentasenya. Pada tahun 2019 tercatat persentase penduduk lansia 9,7 persen; lalu diperkirakan meningkat menjadi 12,54 persen pada tahun 2025; dan terus meningkat menjadi 16,77 persen pada tahun 2035; di tahun 2045 angka ini terus meningkat menjadi 19,9 persen. Peningkatan persentase penduduk lansia ini disebabkan oleh semakin meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah 71,5 tahun, sedangkan angka harapan hidup sehat 62,7 tahun.

Jika dilihat dari profil demografinya, penduduk lansia di Indonesia sebagian besar berada di wilayah perkotaan (52,80 persen), perempuan (52,35 persen), dan merupakan lansia muda (62,83 persen). Secara definisi, lansia muda adalah mereka yang berusia 60-69 tahun, lansia madya berusia 70-79 tahun (27,68 persen), dan lansia tua, 80 tahun ke atas (8,50 persen).

Penduduk lansia di DKI Jakarta tahun 2019 sekitar 1.250.000 jiwa atau sekitar 11 persen dari penduduk DKI Jakarta secara keseluruhan. Dengan angka yang sudah tergolong ageing population ini, maka daerah ini menghadapi masalah kesehatan lansia. Beberapa di antara-

nya yang dapat menjadi masalah adalah: tingkat kemandirian, perawatan jangka panjang, masalah demensia, penurunan imunitas tubuh, multipatologi, dan belum lagi Pemerintah DKI Jakarta juga harus berhadapan dengan tingginya risiko terpapar virus covid-19.

Penyebaran virus Covid-19 di DKI Jakarta telah berlangsung cepat sejak pertengahan bulan Maret 2020. Ketika itu daerah yang paling banyak hanyalah Kelurahan Petamburan (Kecamatan Tanah Abang). Penyebaran ini terus berlangsung secara spasial pada akhir Mei lalu dimana daerah merah sudah melampaui kelurahan asalnya. Di bulan Mei, daerah tertinggi berpindah ke Sunter Agung (Kec. Tanjung Priok), berlanjut ke Kelapa Gading dan sekitarnya. Pada bulan September, penyebaran virus semakin merata di hampir seluruh Kelurahan di Jakarta. Hanya beberapa kelurahan yang jumlah kasusnya kurang dari 10, yaitu: Roa Malaka, Melwai, Glodok, Karet Semanggi, dan Pulo.

Hasil analisis spasial memperlihatkan adanya korelasi yang kuat antarwilayah dalam penyebaran Covid-19. Artinya ada kecenderungan saling menularkan dari satu kelurahan ke kelurahan lain di sekitarnya. Demikian juga dengan keberadaan lansia di setiap kelurahan. Tampak bahwa variable ini selalu memberikan dampak yang signifikan dalam penyebaran Covid-19 baik pada pengamatan di bulan Maret, Mei maupun September. Sementara vari-

able-variabel lain seperti kerapatan bangunan, kepadatan penduduk, jumlah pasar hanya signifikan pada pengamatan bulan September.

Secara umum persentase harian jumlah penderita lansia dalam perawatan mencapai rata-rata 1,7% dari kasus yang ditemukan, meninggal 0,2%, dan sembuh 0,08%. Angka yang ditemukan ini tentu bukan merupakan angka final mengingat fenomena gunung es yang terjadi di masyarakat Social distancing yang dilakukan saat ini diketahui memiliki efek negatif pada lansia dan dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius karena lansia memiliki risiko tinggi dan memerlukan perawatan dirumah yang intensif.

Masalah serius adalah bila lansia menderita penyakit kardiovaskular, autoimun, neurokognitif, dan kesehatan mental. Mengisolasi lansia mungkin dapat mengurangi penularan terutama bila positivity rate di masyarakat cukup tinggi, di Jakarta per 8 Sept 2020, angkanya 18,3 %. Mengisolasi diri tidak cocok dilakukan lansia yang sangat bergantung pada kontak sosial di luar rumah, seperti layanan homecare, komunitas lansia, dan tempat ibadah. Mereka yang tidak memiliki keluarga atau teman dekat, dan bergantung pada dukungan layanan sukarela atau perawatan sosial, dapat mengalami rasa kesepian, terisolasi, atau terpencil. Akses pada layanan kesehatan yang buruk.

07

Perempuan Bicara tentang Perempuan: Peran Perempuan dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Perkotaan Selama Masa Pandemi COVID-19

Kolaborasi DRD DKI Jakarta dengan Studi Kajian
Pengembangan Perkotaan SKSG UI

I. LATAR BELAKANG

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta diharapkan memberikan dampak terhadap penekanan laju pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan PSBB di Jakarta dimulai tanggal 10 April berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tertanggal 9 April 2020 No. 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan PSBB ini di antaranya adalah memberlakukan physical distancing dengan baik dalam rangka membatasi pergerakan warganya untuk memutus rantai penularan virus.

Kebijakan ini telah memberikan dampak yang luar biasa utamanya bagi penduduk yang bekerja di sektor informal. Kegiatan ekonomi penduduk yang selama ini dapat menghasilkan pendapatan rumah tangga telah mengalami penurunan yang signifikan. Banyak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selama ini menjadi mesin penggerak ekonomi mengalami hambatan untuk berkembang. Pandemi menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan yaitu konsumsi dan daya beli yang kemudian mengganggu proses produksi serta perdagangan. Selain itu keadaan ini juga menimbulkan permasalahan baru terhadap pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Pengurangan tenaga kerja yang signifikan ini memberikan banyak pengangguran yang disebabkan pandemi ini.

Pada tingkat keluarga, perekonomian keluarga juga menjadi terganggu. Banyak kepala keluarga yang hidup di perkotaan mengalami penurunan bahkan sampai kehilangan pendapatan, sementara sementara kebutuhan hidup terus merangkak naik. Banyak juga di antara anggota keluarga yang mengalami putus sekolah akibat ketiadaan biaya pendidikan. Belum lagi persoalan kesehatan mental yang dialami oleh anak-anak usia sekolah dimana mereka harus mengikuti proses pembelajaran di rumah, yang biasanya dilakukan di lingkungan sekolah. Survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap 1.548 responden di 32 provinsi di Indonesia, mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen rumah tangga mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19.

Kedudukan perempuan dalam sebuah rumah tangga secara umum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dari pria yang merupakan kepala rumah tangganya. Pemenuhan kebutuhan tangga merupakan tanggung jawab suami, baik hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan tempat tinggal. Namun dalam kenyataannya banyak perempuan yang berfungsi peran ganda dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangganya. Peran perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga dapat dilakukan melalui kegiatan membantu ekonomi keluarga dalam bentuk kegiatan mikro.

Menjadi perempuan yang memiliki banyak peran tidaklah semudah yang dibayangkan. Diperlukan keterampilan tambahan atau ilmu pengetahuan yang dapat menunjang peran yang dilakukan perempuan. Apabila perempuan ingin bekerja dalam kaitannya membantu suami, maka ia harus memiliki kemampuan bekerja pada bidang pekerjaan yang ia kerjakan. Perempuan melakukan peran ganda akan memiliki perbedaan pembagian waktu melakukan perannya dibandingkan dengan perempuan yang melakukan peran tunggal.

Perempuan yang bekerja tidak hanya untuk mengisi waktu luang, namun juga mereka ingin meningkatkan taraf kehidupannya sendiri maupun keluarganya. Perempuan di perkotaan tidak semata-mata mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, tetapi juga untuk mencari nafkah karena pendapatan suaminya yang dirasakan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Terlebih lagi pada masa pandemi, perempuan tidak hanya berperan ganda dalam rumah tangganya tetapi justru menjadi katup penyelamat ketika suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja atau usaha suaminya mengalami kebangkrutan.

Webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan SKSG UI bekerja sama dengan Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta kali ini akan menyoroti masalah peran perempuan di masa pandemic yang melanda daerah perkotaan, utamanya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penyelenggaraan webinar ini akan mengangkat isu tentang "Perempuan Bicara tentang Perempuan: Peran Perempuan dalam Mempertahankan Ekonomi Rumah Tangga di Masa Pandemi di Wilayah Perkotaan".

II. TUJUAN KEGIATAN

- 1) Memahami tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia, kecenderungan dan implikasinya terhadap kehidupan sosial ekonomi rumah tangga.
- 2) Memahami peran perempuan di wilayah perkotaan (khususnya Provinsi DKI Jakarta) dalam mempertahankan ekonomi rumah tangga di masa pandemi.
- 3) Memahami program dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemberdayaan perempuan.
- 4) Merumuskan policy brief penanganan pemberdayaan perempuan utamanya dalam kaitannya dengan ekonomi rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta.

III. LUARAN

Hasil diskusi akan berupa menghasilkan suatu perumusan Policy Brief upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan dan pemberian apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh perempuan dalam mempertahankan kehidupan ekonomi rumah tangga mereka selama masa pandemi di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

IV. AGENDA

Berikut ini adalah susunan acara kegiatan:

| No | Waktu | Aktivitas | PJ |
|----|--------------------|--|------------------|
| 1. | 13.00 – 13.05 WIB | Pembukaan oleh Moderator, Dr. Beti Nurbaiti, ME. | Moderator |
| 2. | 13.05 -- 13.15 WIB | Sambutan dari Direktur SKSG UI, Athor Subroto, Ph.D. | Moderator |
| 3 | 13.15 – 13.25 WIB | Sambutan dari Ketua DRD DKI Jakarta, Prof. Ridwan Kemas Kurniawan | Moderator |
| 4. | 13.25 – 13.40 WIB | Materi inti I: Dr. Diahadi Setyonaluri (Partisipasi Perempuan dalam Pasar Kerja di Indonesia) | Narasumber |
| 5. | 13.40 – 14.55 WIB | Materi inti II: Sukma Widyanti (Perempuan Tangguh di Tengah Wabah Covid-19). | Narasumber |
| 6. | 14.55 – 15.10 WIB | Materi inti III: Dr. Renny Nurhasana (Dukungan Perempuan dalam Ketahanan Keluarga Pengemudi Ojek Online di Jakarta Selama Covid-19) | Narasumber |
| 7. | 15.10-15.25 WIB | Materi Inti IV: Ibu Tuty Kusumawati (Program dan Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan) | Narasumber |
| 4. | 15.25 – 16.25 WIB | Diskusi Aktif dari Para Peserta | Moderator |
| 5. | 16.25 – 16.30 WIB | Penutupan dan Do'a | Ust. Erick Yusuf |

Peserta:

terbuka untuk umum terutama pihak yang tertarik dengan masalah pemberdayaan perempuan di perkotaan, dihadiri oleh 143 orang peserta.

V. HASIL DISKUSI

Pandemi menyebabkan beberapa kegiatan ekonomi mengalami mati suri, terjadi PHK di berbagai sektor, kolapsnya kegiatan-kegiatan ekonomi non formal, terutama yang masih dalam skala kecil dan menengah. Belum lagi di sektor angkutan yang mengalami penurunan jumlah penumpang secara drastis. Dalam hal ini tentu saja kelangsungan ekonomi rumah tangga di perkotaan mengalami penurunan drastis, para kepala rumah tangga sebisa mungkin mempertahankan kehidupan ekonominya untuk dapat sekedar bertahan hidup. Di sinilah kemudian peran perempuan, baik yang berstatus sebagai pasangan kepala rumah tangga maupun sebagai kepala rumah tangga, atau bahkan sebagai anggota rumah tangga juga turut berperan dalam mempertahankan kehidupan ekonomi mereka.

A. Masih Rendahnya Partisipasi Ekonomi bagi Perempuan

Rendahnya tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja terbilang masih rendah, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Malaysia, dan Thailand. Jika dilihat secara nasional Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) perempuan bahkan relative mengalami stagnasi sejak tahun 1990 hingga data terakhir tahun 2018, yaitu tidak pernah lebih dari 50 persen.

Secara spasial APAK perempuan cukup bervariasi, provinsi dengan PDB per kapita rendah namun share tenaga kerja di sektor pertanian cukup tinggi serta kesenjangan upah menurut gender yang cukup besar cenderung memiliki APAK yang tinggi. Hal ini menunjukkan perempuan di wilayah dengan APAK tinggi terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya dan di sector yang tidak produktif (Lain, Alatas, Setyonaluri, 2020, forthcoming).

APAK perempuan muda meningkat di wilayah perkotaan dan menurun di wilayah perdesaan karena perempuan muda menarik diri dari sektor informal tanpa upah. Meski demikian probabilitas partisipasi kerja perempuan generasi termuda mengalami peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya. Perempuan berusia muda di perkotaan memiliki probabilitas berpartisipasi kerja lebih rendah daripada di perdesaan, tetapi gap antar generasi di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Terjadi juga pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor manufaktur atau jasa akibat adanya transformasi struktural dan terus meningkatnya angka urbanisasi.

Isu lain yang diangkat pada diskusi ini adalah adanya risiko berhenti bekerja ketika mereka memasuki jenjang perkawinan dan memiliki anak pertama. Risiko berhenti bekerja ini bisa berbeda antarsektor dan tingkat pendidikan perempuan. Angka kembali bekerja (returning rate) secara umum juga masih rendah, karena pernikahan dan mengurus anak mengurangi probabilitas kembali bekerja. Memiliki anak usia balita juga berasosiasi dengan terjadinya "pindah" ke sektor informal.

Beberapa faktor yang menyebabkan adanya dilema antara pekerjaan dan mengurus anak di antaranya adalah:

1. Dukungan dari keluarga. Seorang perempuan yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilannya dan harus merawat anak akan merasa sia-sia dari hasil trainingnya tersebut. Karena itu dukungan keluarga seperti orang tua dan mertua dapat membantu mengatasi persoalan dilemma antara bekerja atau mengurus anak.
2. Sikap anggota keluarga. Seorang suami bisa saja tidak mendukung istrinya untuk bekerja, melainkan meminta istrinya untuk tetap tinggal di rumah untuk merawat dan mendidik anak di rumah. Padahal si istri ingin sekali bekerja dan mencari tambahan pendapatan untuk membantu kebutuhan hidup keluarganya.
3. Ada masalah kepercayaan terhadap perawat anak yang bukan keluarga. Beberapa kasus dimana perawat anak bukanlah orang yang dikenal seringkali menimbulkan trauma bagi kalangan istri,

sehingga mereka memutuskan untuk berhenti bekerja dan merawat anak.

- Keberadaan orang tua yang sudah lansia. Keberadaan lansia di dalam keluarga juga mengakibatkan seorang istri harus berhenti bekerja untuk merawat orang tua/mertua yang sudah lanjut usia.
- Jarak dari rumah ke tempat kerja. Jika memungkinkan seorang istri dapat melakukan pekerjaan rumah sekaligus dapat bekerja untuk menghasilkan income. Di daerah perkotaan, banyak perempuan yang berstatus sebagai istri memiliki jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal ke tempat kerja, dan hal ini menimbulkan kelelahan.

Selama masa pandemi perempuan terpaksa bekerja secara serabutan dan menerima “beban tambahan” karena SFH dan WFH. Satu dari tiga perempuan dari 71 juta rumah tangga di Indonesia terdampak SFH. Double atau bahkan triple burden relative tinggi di antara pekerja perempuan di sektor manufaktur, perdagangan dan hospitality (hotel/rumah makan/akomodasi).

B. Dukungan Para Istri, Kasus Pengemudi Ojol

Di awal-awal masa pandemi, upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 oleh Pemerintah telah dilakukan di antaranya adalah dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 33 Tahun 2020, Pemerintah DKI Jakarta mulai menerapkan PSBB tanggal 10 April hingga 4 Juni 2020. Salah satu implikasi dari penerapan peraturan ini adalah dengan diterapkannya physical/social distancing, banyak lembaga pemerintah, perusahaan menerapkan skema work from home (wfh), dan skema learning from home untuk para pelajar dan mahasiswa.

Penerapan jarak sosial ini membawa dampak kepada masyarakat terutama di kalangan kelompok ekonomi bawah yang kegiatan ekonominya semata-mata mengandalkan pada kegiatan yang mengharuskan adanya tatap muka, seperti pedagang kaki lima, pengemudi transportasi umum, pengemudi ojek online, dan sebagainya. Dalam hal ini makalah yang disampaikan oleh Nurhasana, et al. (2020) menyoroti dampak sosial dan ekonomi bagi para pengemudi motor maupun mobil yang ber-platform online.

Berdasarkan Pergub nomor 33 Tahun 2020 ini angkutan roda dua berbasis aplikasi (ojek online) dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 9 Tahun 2020, angkutan roda dua berbasis aplikasi sebagai bagian dari layanan ekspedisi barang dibatasi hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang. Para sopir angkutan roda empat berbasis aplikasi juga dibatasi jumlah penumpangnya.

Pembatasan jumlah penumpang ini dilakukan dengan beberapa alasan: 1. Pengemudi ojek online, baik roda dua maupun roda empat, bisa menjadi orang yang rentan tertular Covid-19 dari penumpang yang kedapatan positif terinfeksi Covid-19; 2. Pengemudi ojek online dapat menjadi pembawa virus, baik dari penumpang, pengemudi, maupun barang yang dikirimkan oleh pengemudi; dan 3. Pengemudi ojek online yang terjangkit Covid-19 juga dapat menularkannya kepada penumpang dan keluarganya di rumah.

Pada satu sisi penerapan PSBB merupakan suatu upaya yang memang harus dilakukan dalam menangani penularan lebih lanjut virus Covid-19. Namun pada sisi lain, penerapan ini memberikan ancaman ketahanan keluarga bagi pengemudi ojek online di DKI Jakarta. Ketahanan keluarga merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin (Undang Undang no. 52 Tahun 2009). Menurut KPPA (2016) dalam Nurhasana, et al (2020), Ketahanan Keluarga memiliki lima dimensi,

yaitu: Dimensi Landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dimensi ketahanan fisik, dimensi ketahanan ekonomi, dimensi ketahanan sosial-psikologi, dan dimensi sosial-budaya. Masing-masing dimensi tersebut memiliki beberapa variabel yang dapat digambarkan pada Gambar 1 (kanan):



Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhasana, et al. (2020) tentang kondisi sosial-ekonomi keluarga ojek online dan dukungan istri dalam menjaga ketahanan keluarga selama PSBB di tengah Pandemi Covid-19 memperlihatkan terjadinya penurunan rata-rata pendapatan dari para pengemudi ojol tersebut. Dari empat informan yang diwawancarai mendalam (indepth interview) diperoleh hasil sebagai berikut:

Para informan menyatakan mereka tinggal bersama istri dan anaknya dalam satu rumah, meski ada satu informan yang tidak tinggal serumah dengan istrinya karena istrinya menetap di kampung halaman. Penurunan pendapatan yang terjadi selama pandemi tidak menyebabkan mereka berpisah dengan istri mereka. Diakui oleh para informan, bahwa istri mereka sangat mendukung perjalanan hidup keluarga meski diterpa badai ekonomi. Para informan secara terbuka menyampaikan besarnya pendapatan mereka per hari seberapa pun kecilnya yang diperoleh selama masa PSBB.

| <u>Informan</u> | <u>Sebelum Menjadi Pengemudi Ojol</u> | <u>Menjadi Pengemudi Ojol Sebelum Pandemi</u> | <u>Menjadi Pengemudi Selama Pandemi</u> |
|-------------------------|---------------------------------------|---|---|
| <u>Pengemudi Ojol 1</u> | 5 juta | 9 juta | < 1 juta |
| <u>Pengemudi Ojol 2</u> | 2,1 juta | 8 juta | < 1 juta |
| <u>Pengemudi Ojol 3</u> | 1,8 juta | 8 juta | < 1 juta |
| <u>Pengemudi Ojol 4</u> | 4,3 juta | 7 juta | < 1 juta |

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan (dalam rupiah per bulan) Keluarga Pengemudi Ojol di DKI Jakarta

Penurunan pendapatan ini tentu saja mempengaruhi pemenuhan pembelian makanan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, mereka harus melakukan penghematan pembelian, dan berharap pada bantuan nasi kotak yang dibagikan di jalan. Selain itu mereka juga mengandalkan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah, dan bantuan kantor ojol berupa voucher yang dapat digunakan dalam pembelian di mini market guna memenuhi kebutuhan pokok. Upaya lain adalah dengan cara meminjam kepada sanak-saudara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

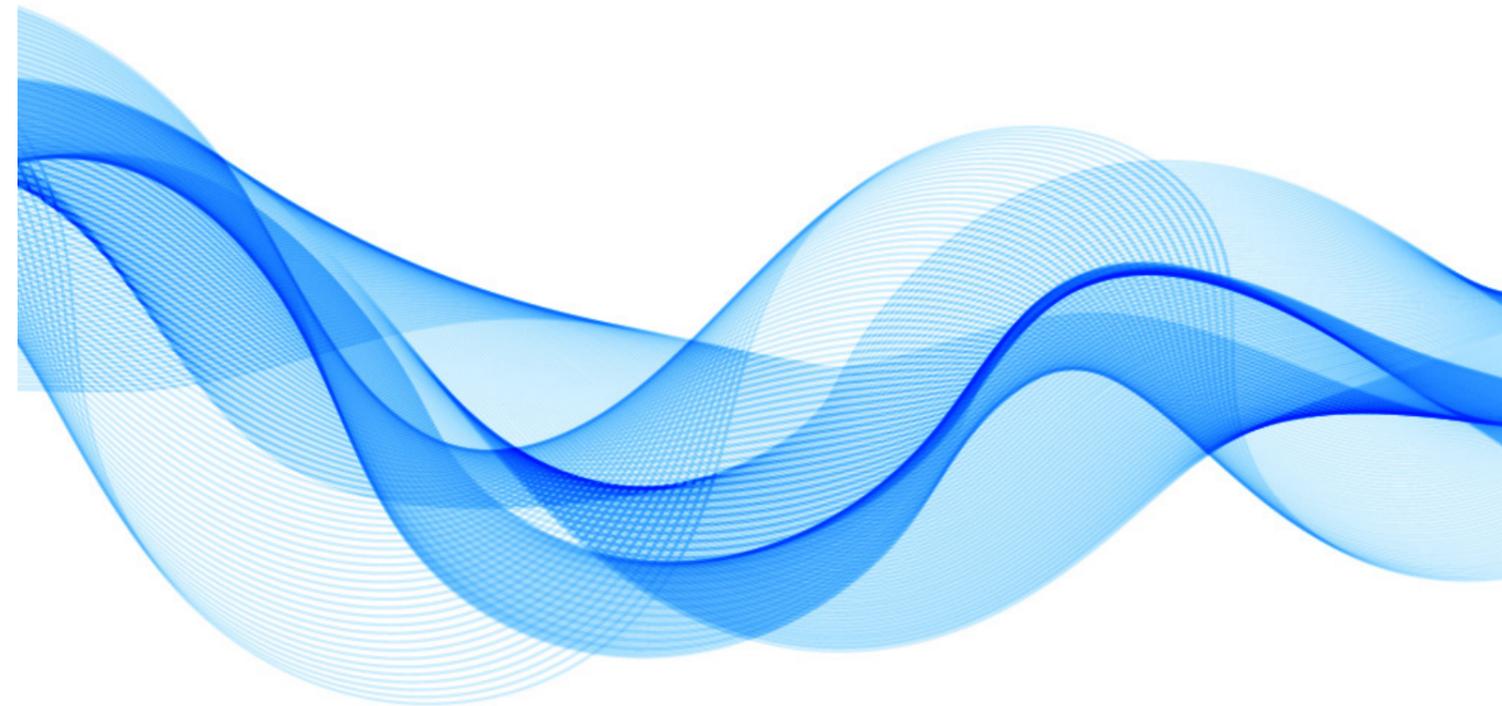
Upaya untuk tetap bertahan dalam kehidupan di tengah pandemi mendapat dukungan dari para istri informan. Salah satu istri menyebutkan bahwa mereka harus tetap bertahan dengan suami mereka. Tidak terfikirkan oleh mereka untuk bercerai apalagi jika dikaitkan dengan nasib anak-anak mereka. Istri yang tinggalnya jauh terpisah dari suami pun menyatakan tetap memberikan dukungan suaminya yang berada di Jakarta, tetap menjaga keutuhan keluarganya dengan adanya saling komunikasi dan keterbukaan.

Dalam hal keuangan, para istri mengaku adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan meski harus diakui bahwa sangat sulit mengatur keuangan keluarga di masa PSBB. Salah satu dari istri bahkan menyebutkan adanya bantuan dari orang tua guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Karena itulah dukungan para istri terhadap suami mereka sangat diperlukan, misalnya dengan memberikan motivasi, selalu mengirimkan do'a. Tidak lupa juga sang istri mewanti-wanti suaminya agar tetap selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Bentuk dukungan lain adalah dengan berjualan sampingan secara online seperti menjual baju untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun jualan online ini tidak selalu dapat menghasilkan pendapatan sesuai harapan karena jarang nya para pembeli di tengah pandemi.

Ada juga salah satu dari istri informan yang mengaku mencoba mendaftar ke program Pra-Kerja yang dimiliki oleh Pemerintah. Dengan mendaftar ke program ini mereka berharap dapat memanfaatkan kemampuan mereka dalam membuka usaha, dan memanfaatkan dana insentif kartu Pra_Kerja untuk bantuan modal usaha. Namun upaya tersebut belum memperoleh hasil yang diharapkan.

VI. IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Mempromosikan kesetaraan tanggung jawab dalam urusan pekerjaan domestic. Melakukan social exchange terkait relasi suami-istri dalam rumah tangga, sehingga hubungannya tidak lagi menjadi super-subordinat. Melainkan pada hubungan kooperatif.
2. Menyempurnakan kebijakan tempat kerja dalam mengurangi ketidakcocokan peran: pengaturan kerja fleksibel, tempat kerja yang ramah keluarga, dan pengaturan cuti bagi orang tua yang mengasuh anak.
3. Memastikan ketersediaan bagi pengasuhan anak: penyediaan pengasuhan anak yang terjangkau, regulasi tentang kualitas pengasuh anak dalam keluarga.
4. Kebijakan pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan, perubahan RPJMD, dan RPBD 2021.
5. Memaksimalkan akses perempuan pada materi-materi KIE, memperbanyak program pemberdayaan di sektor ekonomi dalam program-program pemerintah terutama sektor UMKM, jasa, dan teknologi.
6. Kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan sudah tertuang dalam beberapa Pergub.
7. Mengembangkan kewirausahaan terpadu: menumbuhkembangkan potensi kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha; meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya manusia melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya local bagi penguatan ekonomi Provinsi DKI Jakarta; mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kesempatan berwirausaha; meningkatkan jumlah wirausahawan mandiri yang tangguh dan berkualitas; meningkatkan produktifitas dan daya saing menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; megarahkan kebijakan dan dukungan guna mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



08

Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu - Jakarta

Kolaborasi DRD DKI Jakarta & Dosen Perguruan Tinggi

I. LATAR BELAKANG

Jakarta menghadapi beberapa permasalahan masyarakat, baik secara umum maupun khusus. Beberapa permasalahan itu adalah terkait masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta, iklim dan lingkungan. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah, ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Kepulauan Seribu. Dibandingkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta yang tinggal di daerah lain di Provinsi yang sama, DKI Jakarta.

Di lain pihak, Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai fungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui kegiatan Riset terkait Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Jakarta, dapat melakukan penelitian sendiri dan/atau bekerjasama dengan Lembaga Riset, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Lembaga lainnya baik di tingkat Nasional maupun Internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai center of excellence, secara organisasi dan kelembagaan membangun kesadaran di kalangan komunitas akademik sebagai bagian dari agent of change di masyarakat. Agent of change ini dapat membantu dan terlibat aktif, dan diharapkan mampu memunculkan berbagai inovasi baru yang implementatif, sehingga dengan mudah diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dalam melaksanakan program penelitian sekaligus yang berbasis pada pengabdian kepada masyarakat menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan riset dengan luaran yang dapat dihilirisasi menjadi produk atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dengan membuat penelitian yang dapat bersinergi dengan kebutuhan daerah. Sehingga diharapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh akademisi akan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan hilirisasi melalui pengabdian masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka mencari solusi berkaitan dengan isu peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu seperti yang disebutkan di atas, Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta, bekerjasama dengan dosen-dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat/ ADPI Wilayah DKI Jakarta berkolaborasi mengadakan sebuah Webinar berjudul “Kolaborasi DRD Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu - Jakarta”

Webinar ini diharapkan dapat menjadi kegiatan pendahuluan dari rencana kolaborasi dalam rangka hilirisasi riset untuk pembangunan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, khususnya mendapatkan solusi bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

II. TUJUAN

Seminar Nasional ini bertujuan:

- Meningkatkan sinergitas dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan masyarakat antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Menjalin kolaborasi antar para pemangku kepentingan, khususnya DRD DKI Jakarta dan ADPI DKI Jakarta, dalam berkontribusi mencari solusi permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
- Merekomendasikan sebuah policy brief kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat/ PkM di Provinsi DKI Jakarta khususnya dalam rangka memberikan jalan keluar bagi pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

III. GAMBARAN KEGIATAN

- Nama Kegiatan
Seminar Online:
“Kolaborasi DRD DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta”
- Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini adalah kegiatan Seminar Nasional yang dilakukan secara online. Panitia mengundang akademisi, peneliti dan semua pemangku kepentingan terkait, untuk mengikuti kegiatan ini, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PkM.
- Waktu & Tempat
Hari/ Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 23 Desember 2020 (Jam 09.00 - 12.30 WIB)
Tempat Pelaksanaan : Secara online melalui Zoom Cloud Meeting

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Susunan Acaranya adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| 08:30 – 09.00 | : Registrasi Peserta – (admission time) |
| 09:00 – 09.15 | : Pembukaan oleh MC |
| 09:15 – 10.00 | : Sambutan Pembukaan |
| | 1. Sambutan Ketua DRD Provinsi DKI Jakarta Prof Dr Kemas Ridwan Kurniawan ST M.Sc |
| | 2. Sambutan Ketua Umum ADPI Pusat Prof. Dr. M. Zaim, M. Hum. |
| | 3. Sambutan Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta Dr (C) Isroil Samiharjo |
| | 4. Keynote Speaker Dr. Ir. Nasruddin Djoko Surjono MSi.MBA Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu. |
| 10.00 - 13.00 | : Penyampaian Materi oleh Pembicara (4 orang) |
| 13:00 – 14.10 | : Tanya Jawab |
| 14:10 – 14.15 | : Pembacaan Kesimpulan (Concluding Remarks) Koordinator APDI DKI Jakarta Resista Vikaliana S.Si. MM |
| 14.15 - 14.20 | : Penutupan dan Foto Bersama |

Narasumber : Junaedi, S.Sos, M.Si (Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu)

Materi : Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kepulauan Seribu yang masih tertinggal dibandingkan wilayah di DKI Jakarta, serta Sumbangsih Yang dapat dilakukan para Dosen dan Mahasiswa Dalam Rangka Mempercepat pembangunan Sosial Ekonomi di Kepulauan Seribu.

Pembicara 2 : Heru Susetyo, S.H, L.L.M, M.Si, PhD (Anggota Komisi 1 DRD DKI dan dosen)

Materi : Tantangan dan Peluang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Wilayah di Kepulauan Seribu

Pembicara 3 : Dr. Ing. Widodo Setiyo Pranowo, S.T, M.Si (Anggota Komisi 1 DRD DKI dan Peneliti Pusat Riset Kelautan di Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Materi : Mengenal Karakter Interaksi Laut dan Atmosfer di Kepulauan Seribu sebagai Pijakan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Ekonomi Masyarakat Kepulauan Seribu.

Pembicara 4 : Dr. Nur Aini (Bendahara ADPI DKI Jakarta dan Dosen ITB)

Materi : Peran Serta Dosen dan Mahasiswa dalam Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Kepulauan Seribu

Moderator : Drs. Eman Sulaeman Nasim, MH (Sekretaris Komisi 1 DRD DKI Jakarta)

V. HASIL KEGIATAN

Secara umum kegiatan berjalan dengan baik. Peserta terdaftar berjumlah 180 peserta. Kehadiran peserta di zoom meeting mencapai 172 orang.

Kegiatan berjalan sesuai dengan rundown acara yang direncanakan, meskipun terjadi pengunduran waktu, karena kendala teknis sinyal internet. Beberapa improvisasi dilakukan baik oleh MC maupun Moderator, menyesuaikan kesiapan Pembicara dalam memberikan materi. Kendala utama dalam pelaksanaan adalah kelancaran transmisi sinyal internet.

Dari materi yang disampaikan oleh Pembicara, berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat disampaikan dari setiap Pembicara

Kesimpulan dari materi Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta:

1. Bila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Kepulauan Seribu masih tertinggal, tetapi masih di atas rata-rata wilayah Indonesia. Misal, belum ada SPBU, ke depan sudah kerjasama dengan Pertamina, berupa SPBU terapung.
2. Di wilayah pemukiman Kabupaten Kepulauan Seribu sudah tersedia mesin pengolah air laut.
3. Pelabuhan di DKI Jakarta, seperti antara China dan Thailand supaya dapat mengatasi kesulitan dalam mengangkut barang maupun muatan lain dari DKI ke Kabupaten Kepulauan Seribu.
4. Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu masih melakukan pembangunan sekaligus peningkatan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Seribu. Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta, tidak menutup kemungkinan kepada Dosen ADPI dan DRD untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kesimpulan dari Dr. Heru (DRD DKI JAKARTA)

1. Potensi wisata Kabupaten Kepulauan Seribu adalah sangat besar. Sayangnya, warga DKI Jakarta belum terlalu melirik, mungkin karena sarana yang terbatas, karena warga baru mengenal Pelabuhan Marina untuk menuju ke Kabupaten Kepulauan Seribu.
2. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu terbuka, begitu pula dengan Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu. Keduanya mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dan akan dilakukan. Hal ini dibuktikan dari aktivitas Dr. Heru (DRD DKI Jakarta) dan Tim Universitas Indonesia.
3. Potensi Kabupaten Kepulauan Seribu besar tetapi Pandemi Covid-19 menjadi terkendala.
4. Setelah pandemi, jika Kabupaten Kepulauan Seribu ingin terus menarik wisatawan yang lebih banyak, maka Kabupaten Kepulauan Seribu harus melindungi hak wisatawan. Misal dengan menyediakan wilayah yang bersih dan nyaman.
5. Adapun yang bisa dilakukan peneliti dan dosen adalah dengan menjaga dan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
6. Kabupaten Kepulauan Seribu pada tingkat Nasional sudah menjadi kawasan bisnis.
7. Harapan ke depan, Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi "Maldives Indonesia".
8. DRD sudah melakukan kajian rencana pemindahan ibukota. Hasilnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta bisa dijadikan bisnis internasional. Salah satu yang bisa dikembangkan sebagai wisata internasional adalah Kabupaten Kepulauan Seribu.
9. Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan daerah kepulauan. Banyak kawasan pulauanya. Ada pemukiman dan resort. Karena lebih banyak kawasan air, maka pembangunan bergantung kepada kondisi alam.

Kesimpulan Dr. Widodo (DRD DKI JAKARTA)

1. Kondisi Kabupaten Kepulauan Seribu satu sisi tertinggal tapi tetap lebih maju dari rata-rata seluruh daerah di Indonesia.
2. Pembangunan infrastruktur sudah cukup menggembirakan, apalagi akan dibangun "Negeri Seribu Pulau".
3. Ada kerentanan yang dapat mengancam pembangunan dan keberlangsungan Kabupaten Kepulauan Seribu, di antaranya:
 - a. Adanya ceceran minyak.
 - b. Ada anjungan.
 - c. Ada penampungan bahan bakar.
 - d. Adanya Sampah, tergantung angin berhembus.
4. Kabupaten Kepulauan Seribu dapat menjadi tempat berkumpul sampah, dan dapat menjadi asal sampah. Hal ini harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan.

Kesimpulan Dr. Nur Aini (ADPI DKI JAKARTA)

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dilakukan dengan penjagaan terhadap lingkungan serta pengembangan wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu.



Policy Brief

Kajian Pengembangan dan Pengelolaan
Kawasan Muara Angke 09

Bang Godot, Sang Jawara! 10

Jurus Jitu Sang Jawara 11

Penyediaan Air Minum melalui Ekstraksi Air dari Udara
bagi Warga Jakarta yang Belum Terakses Air Perpipaan 12

Usulan Perijinan Pemanfaatan Ruang Jakarta
yang Partisipatif dan Transparan 13

Kajian Partisipasi Komunitas dalam
Pelestarian Cagar Budaya 14

09

Kajian Pengembangan & Pengelolaan Kawasan Muara Angke

Oleh: Komisi 3 DRD DKI Jakarta

Latar Belakang

1. Permasalahan
 - a. Land subsidence di Kawasan Muara Angke cukup tinggi sehingga sering terkena banjir dan rob.
 - b. Ketersediaan air minum bersih terbatas, kualitas air di Kawasan Muara Angke hanya untuk kegiatan MCK.
 - c. Kawasan permukiman penduduk/nelayan masih banyak yang kumuh dan tidak layak huni.
 - d. Fasilitas pendukung pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan masih kurang maksimal untuk kegiatan distribusi perdagangan ikan, padahal demand-nya cukup tinggi.
 - e. Pengembangan usaha hasil olahan ikan masih kurang maksimal.
 - f. Penataan kawasan masih kurang efektif
2. Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Undang Undang No.7 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
 - b. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030;
 - c. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang RDTRPZ;
 - d. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022

Maksud & Tujuan

Maksud Kajian Pengembangan & Pengelolaan Kawasan Muara Angke adalah untuk dapat memberikan gambaran tentang kondisi umum, permasalahan, Rencana Peruntukan Tanah pada RDTR & Panduan Rancang Kota (Urban Design Guid Line) di Kawasan Muara Angke dari aspek Pengembangan & Pengelolaan Kawasan (+65 Ha). Sedangkan tujuan kajian ini adalah untuk dapat menyimpulkan kondisi dan permasalahan yang ada dan juga untuk dapat memberikan usulan rekomendasi yang dapat di implementasikan oleh SKPD/UKPD guna perbaikan kondisi di Kawasan Muara Angke agar lebih baik dan lebih menarik untuk "Investasi Pengembangan & Pengelolaan Kawasan".

Metodologi Kajian

Metode pelaksanaan kajian dilakukan melalui Rapat Internal, Pengalaman Empiris, Studi Literatur & Arsip Penyusun, Pengumpulan Data & Informasi dengan para pihak terkait, misalnya Kepala Dinas Kelautan yang memberikan masukan tentang Historis Kewenangan dan adanya tambahan areal pelabuhan penumpang yang juga memerlukan lahan & sistem infrastruktur angkutan yang lebih besar.

Analisis

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, pengembangan dan pengelolaan kawasan Muara Angke menjadi lebih kompleks dan lintas sektor, yang meliputi:

Sektor Perikanan, yang meliputi:

1. Dermaga/Pelabuhan Ikan, Tempat Parkir & Bengkel Kapal, Kolam Pelabuhan & Break Water;
2. Tempat Pendaratan Kapal Penangkap Ikan;
3. Tempat Pelelangan Ikan;
4. Industri/Tempat Pengolahan Ikan;
5. Gudang/Tempat Penyimpanan Ikan (Cold Storage).

Sektor Transportasi Laut & Darat, yang meliputi:

1. Dermaga Penumpang (Syah Bandar), Kolam Pelabuhan & Break Water;
2. Dermaga Penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu;
3. Terminal Bus Penumpang dari dan ke bagian kota Jakarta yang terintegrasi dengan Pelabuhan;
4. Trotoar bagi Pejalan Kaki pada jalan-jalan utama yang aman, nyaman & berkualitas;
5. Ketersediaan Jumlah Kapal & Angkutan Umum/Bus yang memadai dari sisi kuantitas & kualitas.

Sektor Permukiman Nelayan & Fasilitasnya, yang meliputi:

1. Jumlah unit rumah "dibatasi" berdasarkan daya tampung & daya dukung kawasan;
2. Peningkatan penghasilan nelayan sehingga mampu memperbaiki rumah & lingkungannya;
3. Mendorong industri rumahan yang ramah lingkungan, bersih & lebih modern;
4. Pembangunan Rusunami/Rusunawa diperlukan untuk menampung kebutuhan (membuka ruang kawasan) dan untuk resettlement guna memenuhi kebutuhan Fasum Fasos & RTH.

Sektor Industri, Pengolahan Ikan & Penyimpanannya, yang meliputi:

1. Peningkatan industrialisasi pengolahan ikan yang lebih bersih, lebih sehat, lebih modern, lebih berkualitas & berdaya saing;
2. Pemberian fasilitas/akses Tempat Penjualan Ikan (Resto & Pusat Jajan) di lokasi yang lebih bersih, lebih menarik & lebih nyaman yang lebih spesifik berkarakter;
3. Penyediaan tempat penyimpanan ikan/cold storage secara berjenjang untuk semua kelompok usaha terutama untuk kelompok kecil yang diselenggarakan secara bersama/ Koperasi.

Sektor Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Tanggul Laut, Saluran, Limbah, Sampah & Energi, yang meliputi:

1. Jalan, Trotoar & Jembatan, sesuai Standar Prasarana, Sarana Jalan & Jembatan yang memenuhi dimensi RDTR & PRK/UDGL, yang berkualitas sesuai dengan Visi Pengembangan Kawasan;
2. Break Water/Kolam Pelabuhan Ikan & Penumpang, harus memenuhi standar kualitas yang disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan kawasan;
3. Tanggul Pantai, harus dibangun secara tuntas untuk menanggulangi banjir rob;
4. Saluran Air Bersih, Saluran Air Kotor & Limbah, harus memenuhi dimensi & kapasitas yang ditetapkan dalam RDTR dan memenuhi standar kualitas lingkungan;
5. Sampah, harus memenuhi sistem pengolahan & pembuangan sampah rumah tangga, pasar & industri;
6. Energi, energi listrik mutlak harus dipenuhi untuk kebutuhan kawasan ini.

Sektor Pembangunan & Pengembangan Kawasan, yang meliputi:

1. Pembangunan Fisik Kawasan dianggarkan melalui APBD/APBN & kerja sama dengan Swasta/BUMD/BUMN yang saling menguntungkan;
2. Pembangunan Sosial & Ekonomi kawasan diselenggarakan melalui APBD/APBN dan kerja sama dengan Swasta/BUMD/BUMN yang saling menguntungkan;
3. Pengembangan Kawasan diselenggarakan melalui APBD/APBN beserta Swasta/BUMD/BUMN berdasarkan RDTR & PRK/UDGL yang telah diperbaiki/disempurnakan berdasarkan Visi Pengembangan Kawasan yang lebih bersih, lebih nyaman & lebih kompetitif.

Sektor Pengelolaan Kawasan, yang meliputi:

1. Pengelolaan Kawasan Muara Angke ini idealnya tidak diselenggarakan hanya oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kewenangannya sangat terbatas (Eselon III) sebagaimana kondisi sekarang;
2. Pengelolaan Kawasan Muara Angke ini harus dikelola oleh suatu lembaga setingkat Kepala Dinas (semacam OTORITA - eselon II) yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

| KESIMPULAN | REKOMENDASI |
|---|---|
| <p>Aspek Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa penurunan muka tanah (0,8-1,0 M/thn) – sekarang >1,5 M di bawah air laut, mutlak harus diperhitungkan; 2. Bahwa air tanah tidak layak pakai/anta/asin hanya bisa dipakai untuk cuci tidak untuk makan minum; 3. Bahwa kondisi jalan-jalan di permukiman masih berupa jalan tanah dan beberapa bagian telah diaspal/dibeton; 4. Bahwa beberapa bangunan rumah penduduk/nelayan sebagian besar kumuh, tidak permanen & tidak layak huni; 5. Bahwa tiap tahun banjir karena rob, dan karena Kapasitas Waduk & Pompa kurang memadai. | <p>Aspek Fisik & Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena banjir, diperlukan pembangunan Tanggul Pantai, dan menambah Kapasitas Waduk & Pompa; 2. Karena kondisinya, diperlukan Pembangunan Infrastruktur Kawasan yang menyeluruh; 3. Karena kurangnya distribusi air bersih, diperlukan Pasokan Air Bersih/Air Minum dari PDAM; 4. Untuk membuka ruang kawasan, diperlukan membangun Rusunawa & Rusunami yang memadai kapasitasnya; 5. Untuk peningkatan kapasitas & kualitas pelabuhan, diperlukan revitalisasi Pelabuhan Ikan & Penumpang. |
| <p>Aspek Sosial Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa secara umum pendidikan penduduk/nelayan tidak tinggi (tidak lulus SD-D3, maksimal SMA); 2. Bahwa sebagian besar pekerjaan nelayan adalah melaut & mengolah ikan: ikan asin, pindang & membuat terasi; 3. Bahwa penghasilan nelayan – sebagai buruh, tidak tetap tidak memadai (penghasilan < pengeluaran); 4. Bahwa sebagian besar merupakan nelayan perahu kecil penangkap ikan di perairan dekat/Laut Jawa; | <p>Aspek Sosial Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan kapasitas Nelayan, diperlukan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi MBR; 2. Untuk meningkatkan penghasilan Nelayan, diperlukan Manajemen Usaha Perikanan yang lebih modern; 3. Untuk penguatan ekonomi Nelayan, diperlukan lembaga Koperasi, dan kemudahan akses permodalan (Bank). |
| <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa regulasi untuk panataan Kawasan Muara Angke telah mencukupi: Sesuai UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030; Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTRPZ; dan Perda No. 1 Tahun 2018 | <p>Aspek Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan kondisi dan permasalahan, diperlukan penyesuaian struktur ruang, dimensi, fungsi kawasan yang visioner; • Karena kondisi eksisting, diperlukan pengaturan Kewenangan Pengembangan & Pengelolaan Kawasan. |

10

Bang Godot, Sang Jawara!

Oleh: Komisi 3 DRD DKI Jakarta

Rumah adalah salah satu hak dasar warga kota yang harus dipenuhi. Namun hal ini terkendala masalah penyediaan tanah yang kian mahal, sistem pembiayaan yang sulit terjangkau masyarakat sehingga memiliki rumah di kota Jakarta merupakan salah satu mimpi indah yang sulit terpenuhi. Sebuah badan pengelola perumahan JAWARA (Jawatan Rumah dan Agraria) sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah rumit ini. Namun sejak satu dekade lampau terus didiskusikan tanpa pernah hadir. Bang Godot, sang JAWARA!

I. Kebutuhan & kemampuan penyediaan rumah

Walau laju pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta kian menurun, sayangnya jumlah kekurangan rumah seakan enggan mengikutinya. Dalam buku Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta tahun 2018-2022, jumlah kekurangan rumah milik Provinsi DKI Jakarta mencapai lebih dari 300 ribu. Sayangnya, skenario optimis yang dicanangkan hanya berkisar setengah dari jumlah kekurangan tersebut. Kelangkaan tanah untuk perumahan terjangkau, keterbatasan dana pembangunan, serta kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli dan memenuhi kewajiban lainnya menjadi kendala utama pemenuhan ini.

Hal ini memperlihatkan deskripsi komprehensif bahwa penyelenggaraan perumahan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pemerintah haruslah juga memampukan masyarakat, khususnya MBR, untuk dapat memperoleh tanah yang layak hunian, membangun hunian yang layak untuk menjamin keselamatannya dan keluarga, serta meningkatkan kesejahteraannya untuk membangun dan memelihara hunian dan lingkungannya. Sayangnya, penyelenggaraan dengan sistem pasar bebas yang berlangsung tidak memampukan seluruh warga kota untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak, namun hanya melayani yang mampu.

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan tanah dengan harga terjangkau, membangun hunian ekonomis namun mampu menjamin keamanan dan keselamatan, serta memampukan penghuninya untuk hidup sejahtera sehingga mampu membeli dan memelihara hunian tersebut, sebagai wujud amanah menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sayangnya, ketiganya tidak dapat dijalankan oleh sebuah instansi tertentu, karena keterbatasan tugas pokok dan fungsinya, serta sumber daya lainnya, sehingga integrasi syarat penting menjalankan amanah tersebut tidak terjadi.

II. Badan Pengelola Perumahan DKI Jakarta

Beragam program penyediaan hunian telah dijalankan negara ini, bahkan sejak era pra-kemerdekaan. Program ini berusaha untuk membangun sebuah sistem penyediaan hunian, dengan puncaknya pada tahun 1974 dengan berdirinya PERUMNAS (Perumahan Nasional) dan REI (Real Estate Indonesia). Lembaga pertama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi MBR, dan yang kedua bagi kelompok masyarakat berekonomi yang lebih baik. Namun seiring berjalannya waktu, Perumnas menjelma menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai salah satu entitas usaha pemerintah untuk menambah pundi-pundi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menyebabkan kegamangan usaha memenuhi fitrahnya.

Program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) melejit di pertengahan decade 2000-an melalui program nasional Seribu Menara merupakan usaha negara untuk memenuhi mandat. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta (2018), lebih dari 25 ribu unit tersebar di 23 lokasi Rusunawa, untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi MBR. Sebagai Barang Milik Daerah (BMD) karena berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah dan dibangun dengan dana APBN/ APBD, biaya operasional dan pemeliharaan sangat tergantung dari alokasi APBD, karena tarif sewa yang terjangkau pun tersubsidi oleh APBD.

Selain jumlahnya yang sangat terbatas, jumlah tunggakan sewa penghuni yang melampaui 70 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi masalah pengelolaan tipe bangunan ini. Hal ini tentunya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta untuk subsidi yang berpotensi memperburuk kualitas bangunan. Pandemi COVID-19 kian meluluhlantakkan APBD, dan terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 yang meniadakan sewa Rusunawa saat pandemic berlangsung, akan memperburuk kondisi Rusunawa.

III. JAWARA berbentuk BLUD

Penyelenggaraan perumahan merupakan sebuah sistem multi dimensi yang membutuhkan integrasi program lintas sector dari penyediaan tanah, pembangunan rumah dan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan MBR. Mempercayakan koordinasi lintas sector dengan model instansi berjiwa sectoral, hanya akan mengulang beragam masalah yang sudah lampau. Untuk itu, Lembaga integratif dapat menjadi alternatif solusi untuk menyelesaikan tantangan penyediaan perumahan di ibukota. Lembaga ini tidak hanya menangani pembangunan, pembiayaan, dan pengelolaan perumahan untuk MBR, tetapi juga penyediaan tanah bagi perumahan serta peningkatan kesejahteraan MBR. Lembaga ini dapat bernama Jawatan Rumah dan Agraria (JAWARA).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Jawatan merujuk pada arti; “bagian dari departemen atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan suatu tugas atau pekerjaan yang luas lingkungannya”. Hal ini menegaskan bahwa Lembaga ini menyelenggarakan perumahan dan agrarian secara luas. Sementara kata “agrarian” dari sumber yang sama berarti: segala sesuatu yang terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah.” Dengan demikian, Lembaga ini akan bekerja untuk menyediakan tanah, bangunan dan memanfaatkan keduanya untuk memberikan pelayanan public terbaik untuk memenuhi kebutuhan hunian MBR. Kehadiran ini sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 40 yaitu membentuk Lembaga atau badan yang bertanggung jawab membangun rumah umum, menyediakan tanah bagi perumahan, dan mengkoordinasi proses perizinan dan pemastian kelayakan. Mandat ini menegaskan bahwa Lembaga ini harus menyediakan tanah untuk membangun rumah, sehingga seyogyanya memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya untuk menyediakan dan membangun rumah, terlebih untuk MBR di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penyediaan rumah, sebagai hak dasar warga negara, Lembaga ini tidaklah berorientasi profit (profit-oriented), tetapi layanan (service-oriented). Pengalaman PERUMNAS sebagai Lembaga yang mengemban mandate ini, gagal karena berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengetengahkan bentuk Lembaga ini baik di tingkat pusat atau daerah berorientasi profit untuk memperoleh laba/ keuntungan untuk meningkatkan anggaran pendapatan pemerintah pusat/ daerah. Hal ini mengakibatkan kesulitan Lembaga untuk memberikan layanan prima selagi bertugas menimbun keuntungan bagi pemerintah pusat/ negara, sebagaimana sudah dikaji oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional tahun 2016.

Untuk itu, perlu bentuk Lembaga lain yang tepat untuk mengemban amanah ini. Badan Layanan Umum /Daerah (BLU/D) sejauh ini bentuk yang sesuai dengan amanah yang diemban, sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menugaskan bentuk Lembaga ini untuk memperoleh keuntungan dari produksi barang/ jasa untuk meningkatkan kualitas layanan, sebagaimana rumah sakit, universitas, atau penyedia transportasi kota.

Dalam konteks JAWARA, bentuk Lembaga ini memungkinkannya untuk memanfaatkan asset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan rumah bagi MBR melalui skema bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, APBD, CSR, atau lainnya. Setelahnya, JAWARA dengan bentuk BLUD dapat mengelola tanah dan bangunan untuk memperoleh keuntungan yang potensial digunakan untuk subsidi tarif sewa dan perawatan bangunan. Hal ini melampaui kemampuan badan pengelola yang dimandatkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yakni kemampuan membiayai subsidi tarif sewa dan biaya perawatan Rusunawa yang kian mengkhawatirkan, bahkan membangun Rusunawa secara kesinambungan.

Walau sudah dimandatkan untuk dibentuk dan beroperasi menjalankan kewajibannya selama satu dekade, Lembaga ini tidak pernah hadir di bumi Nusantara, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Layaknya Godot, dalam sebuah mahakarya drama komedi tragis di akhir tahun 1940-an pasca Perang Dunia II yang diciptakan oleh Samuel Beckett, Lembaga seperti JAWARA dimandatkan dalam peraturan dan didiskusikan oleh banyak pakar, namun tidak pernah hadir. Hal ini tidak ubahnya kisah Vladimir dan Estragon dalam drama komedi tragis “Waiting for Godot” yang terus membicarakan dan menunggu Godot yang tidak pernah hadir hingga akhir drama. Oleh karenanya tidaklah salah kalau Bang Godot sang JAWARA!

IV. Daftar Pustaka

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta tahun 2018-2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. 2016.
Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan Perumahan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

11

Jurus Jitu Sang Jawara

Oleh: Komisi 3 DRD DKI Jakarta

Ringkasan kebijakan ini berisi jurus jitu sang JAWARA untuk melaksanakan kewajiban untuk menyediakan tanah untuk perumahan, membangun perumahan, dan mengelola pembiayaannya agar dapat mengakomodasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bertinggal di ibukota. Lembaga ini membutuhkan kewenangan untuk mengelola tanah aset pemerintah provinsi, akses pendanaan multi-sumber untuk membangun, dan pengelolaan keuangan agar mampu melakukan subsidi, sebagai wujud Jurus Jitu sang JAWARA!

Jurus 1: Pengelolaan tanah multi-sumber Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk MBR yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sayangnya, harga tanah yang sangat mahal dan langkanya luasan yang memungkinkan menjadi dua kendala penyediaan hunian terjangkau bagi, sudah menjadi penghambat klasik. Pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah, seyogyanya dapat mengatasi masalah ini, karena Rusunawa merupakan aset pemerintah daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 sudah menyediakan tata kelola penggunaan aset milik Negara untuk pembangunan, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi MBR. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pun terbit untuk menyediakan tata kelola pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Rusunawa Jatinegara Barat (Jakarta Timur) menjadi preseden hal ini.

Data jumlah, luasan, dan sebaran lokasi tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seharusnya dapat diperoleh dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) yang kemudian dialihfungsikan menjadi hunian vertikal MBR. Sayangnya, data tersebut masih terbatas, baik kuantitas dan kualitasnya. Oleh karenanya, pemutakhiran data spasial aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dilakukan oleh BPAD agar dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk hunian MBR di ibukota. Selain itu, program Reforma Agraria (RA) dapat menjadi salah satu opsi mobilisasi tanah untuk pembangunan rumah di ibukota. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yang disusul dengan penetapan Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019, menegaskan redistribusi hak atas tanah kepada MBR khususnya, secara kelompok sangat dimungkinkan. Terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 574 Tahun 2019 bertugas untuk menjalankan reformasi aset dan akses untuk redistribusi hak atas tanah obyek RA (TORA) di ibukota kepada subyeknya. Sebagai salah satu pilihan hasil RA*, JAWARA dapat menjadi pengelola tanah dan Rusunawa untuk menghasilkan keuntungan agar mampu menjalankan subsidi silang kepada penyewa MBR. Dengan demikian, JAWARA memperoleh tanah, sebagai salah satu kewajibannya, dengan memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari BPAD dan Reforma Agraria (RA) untuk menyediakan hunian terjangkau di ibukota, khususnya bagi MBR.

Jurus 2: Pembangunan hunian terjangkau. Dana pembangunan Rusunawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPU-PR) menjadi salah satu pilihan kedua yang jitu. Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019-2024. Tanah yang sudah clear dan clean sebagai syarat utama pemanfaatan dana tersebut terpenuhi melalui skema penyediaan tanah yang jelas dari BPAD atau GTRA sebagai aset pengelolaan JAWARA. Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau retribusi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari badan usaha privat pun dapat menjadi pilihan ketiga yang jitu. Utilisasi dana ini tentunya berkontribusi pada penyediaan hunian terjangkau di Provinsi DKI Jakarta. Jurus kedua ini menjelaskan bahwa JAWARA dapat memperoleh dana pembangunan hunian MBR dalam bentuk Rusunawa di ibukota dari banyak sumber, sehingga secara berkesinambungan menyediakan hunian terjangkau bagi MBR.

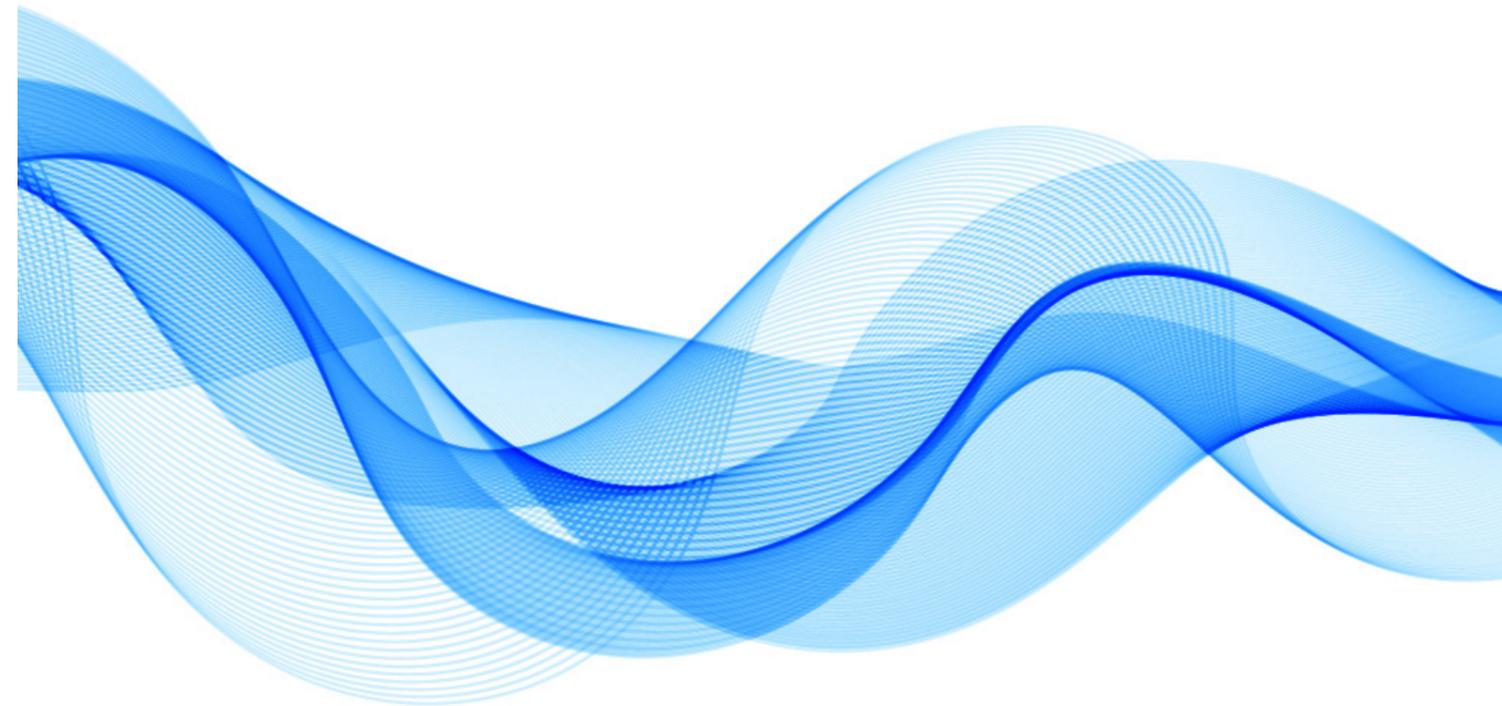
Jurus 3: Posisi kelembagaan Jurus pertama dan kedua mengindikasikan bahwa lembaga ini beroperasi lintas instansi di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Walau kata “kolaborasi” sudah didengungkan selama satu dekade terakhir, sayangnya kenyataan praktis tidak seindah janji manis dengungan. Setidaknya terdapat dua hal penyebab utama pahitnya janji manis tersebut. Pertama, tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penyediaan tanah aset milik pemerintah pusat/ daerah adalah proses lintas institusi, dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DKI Jakarta, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCK-TRP), dan beragam instansi teknis lainnya. Demikian pula jurus kedua yang melingkupi kewenangan mengakses bantuan dana pembangunan yang selama ini dikomandani oleh DPRKP, proses perijinan yang sangat ditentukan oleh DCKTRP dan Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKM-PTSP), hingga pengelolaan bangunan dan rangkaian tugas pasca-konstruksi yang termandat kepada DPRKP. Hal ini kerap menciptakan tumpang tindih tugas, fungsi, program dan kewenangan dari tiap instansi yang tidak pernah terselesaikan. Kedua, pembiayaan lembaga berkewenangan lintas instansi tidak jelas sumber anggarannya. Pengalaman empirik membuktikan bahwa sebuah lembaga kerap berinduk pada sebuah instansi publik sektor guna memperoleh dukungan dana dari anggaran instansi tersebut yang jelas. Padahal, kondisi ini mengerdilkan kewenangan JAWARA agar dapat mengorkestrasi asupan data, informasi, dana, aset dan kewenangan lintas instansi tersebut. Posisi kelembagaan JAWARA di konstelasi struktur administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan tumpang tindih antar lembaga yang kontraproduktif. Jika posisi kelembagaan berada di tingkat Kesekretariatan Daerah, maka JAWARA memiliki kewenangan untuk mengorkestrasi data, informasi, kewenangan, dan program beragam instansi teknis. Selain itu, program dan kegiatan JAWARA langsung memperoleh keputusan akhir dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai majelis tertinggi penentuan program lintas sektor tertinggi di pemerintah daerah, sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017.

Posisi kelembagaan ini tentunya menentukan sumber pembiayaan operasional JAWARA, sebagai lembaga lintas sektor pemerintah daerah. Penyertaan modal pemerintah sebagai modal awal tentunya bersumber dari instansi setara Kesekretariatan Daerah. Harapannya, lembaga ini harus mampu membiayai dirinya secara swadaya dan lestari di kemudian hari agar tidak membebani APBD. Selain itu, lembaga ini harus beranggotakan personil multi-disiplin agar mampu mengatasi isu pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah yang dimiliki, pembangunan dan pengelolaan bangunan Rusunawa secara teknis dan finansial agar dapat melakukan subsidi silang bagi MBR di ibukota. Keterlibatan personil dari instansi pemerintah provinsi selalu mengakibatkan kegagapan pelaksanaan kegiatan, karena ambiguitas peran tugas serta membebani tenaga dan waktu mereka. Para personil ini diangkat oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepadanya dalam majelis TKPRD.

Kesimpulan: Jurusan JAWARA. JAWARA, sebagai lembaga lintas sektor harus dilakukan guna mengurangi tumpang tindih instansi yang beragam. Penyatuan kewenangan yang solid seyogyanya mengatasi masalah tersebut. Saat JAWARA memiliki kewenangan untuk mengendalikan mata rantai penyediaan hunian terjangkau bagi MBR, dari penyediaan dan pengelolaan tanah dan bangunan hingga pembiayaan, tentu dapat menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 40. Oleh karenanya, posisi JAWARA tidak menginduk pada dinas teknis namun lebih tinggi daripadanya, agar mampu mengorkestrasi kegiatan penyelenggaraan hunian bagi MBR. Mengingat panjang dan rumitnya proses penyelenggaraan hunian bagi MBR, JAWARA seyogyanya berisikan para pakar di bidang pertanahan, tata ruang, bangunan gedung, pemberdayaan masyarakat hingga pengelolaan ruang ekonomi guna menciptakan ekosistem penyelenggaraan hunian MBR yang berkesinambungan.

Selain itu, usulan kehadiran JAWARA pun berimplikasi pada restrukturisasi tugas, pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, agar hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan tidak saling tumpang tindih. Kehampaan regulasi jembatan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ke Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri menyebabkan pemerintah daerah gamang membentuk badan pengelola perumahan. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu mencoba sistem kreatif dan inovatif untuk menciptakan ekosistem penyelenggaraan hunian MBR yang berkesinambungan melalui Jurusan JAWARA!

Catatan akhir. Proses Reforma Agraria dapat menghasilkan banyak pilihan pemberian hak dan pengelolaan bangunan di atasnya, seperti disampaikan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019. Koperasi MBR penghuni kampung kota dapat menjadi salah satu pilihan badan pengelola tanah aset pemerintah provinsi/ pusat yang memegang hak pengelolaan. Oleh karenanya, JAWARA menjadi salah satu pilihan badan pengelola Rusunawa, bukan satu-satunya. Daftar Pustaka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014. Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2019. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 574 Tahun 2019.



12

Penyediaan Air Minum Melalui Ekstraksi Air dari Udara bagi Warga Jakarta yang Belum Terakses Air Perpipaan

Oleh: Komisi 3 DRD DKI Jakarta

I. PENDAHULUAN

Hak atas air adalah hak asasi manusia, diakui secara eksplisit dalam Resolusi PBB No. 64/292. Menegaskan bahwa hak atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan terjangkau, baik untuk keperluan pribadi maupun rumah tangga. Di Jakarta, 40 persen warga belum memperoleh akses air bersih. Dua wilayah yang mengalami krisis air bersih, yaitu di Jakarta Barat: Kamal, Tegal Alur, Pegadungan, serta Jakarta Utara: Kamal Muara, Muara Angke, Muara Baru. Sementara, upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengejar target penyediaan instalasi air bersih mengalami deselerasi, salah satu sebabnya karena pengajuan penyertaan modal daerah untuk membangun instalasi air bersih senilai Rp 1,2 triliun pada APBD 2019 tidak dikabulkan DPRD DKI Jakarta. Ditambah lagi, pandemi dan resesi membuat gap realisasi terhadap rencana yang dibuat menjadi semakin lebar. Karena itu, perlu melakukan eksplorasi lebih lanjut dalam perencanaan sumber daya air, perlu radical re-thinking untuk menemukan solusi lainnya. Diketahui, selain air permukaan, air tanah, air hujan, ada sumber air non-konvensional yang belum tergarap yaitu air (dalam bentuk uap air) yang terkandung dalam udara sekitar. Kajian ini membahas eksploitasi kreatif sumber daya air lain tersebut, merekayasa proses presipitasi yang terjadi di alam ke dalam sebuah: mesin pemanen air atmosfer.

II. ANALISIS

A. Demand: Pertambahan Penduduk dan Kebutuhan Air Minum

Pertambahan Penduduk SUPAS 2015 memproyeksikan penduduk DKI Jakarta tahun 2025 berkisar 10.892.000 jiwa (angka penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi). Pertambahan penduduk mendorong kenaikan kebutuhan air. Badan Regulator PAM Jaya merilis Jakarta akan membutuhkan air sekitar 28.000 liter per detik pada tahun 2022.

Ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang per hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

B. Kebutuhan Air Minum

Survei yang dilakukan oleh Direktorat Air Minum tahun 2006 menunjukkan volume pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan Indonesia sebesar 144 liter per orang perhari. Pemakaian terbesar adalah untuk keperluan mandi sebesar 60 liter per orang per hari. Kebutuhan pokok minimal pemakaian air setiap orang mencapai 121 liter perharinya. Pemakaian tersebut antara lain untuk minum dan masak, cuci pakaian, mandi, bersih rumah, serta keperluan ibadah. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada periode April 2015 mengenai sumber air untuk masak dan minum warga Jakarta, 65 persen dicukupi dari galon/air mineral, 17 persen dari perusahaan air minum, dan 16,1 persen dari sumur bor. Data BPS, dalam kurun waktu enam belas tahun terakhir (2000–2016), persentase rumah tangga di Jakarta yang menggunakan air leding (air dari perusahaan air minum) dan air pompa (air tanah) sebagai sumber air minum dari tahun ke tahun cenderung menurun. Sebaliknya, konsumsi air dalam kemasan menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan: dari 4,32 persen di tahun 2000 menjadi sebesar 72,31 persen di tahun 2016. Menurut data Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN), pada 2015, total produksi nasional air minum dalam kemasan mencapai 25 miliar liter. Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen atau 15 miliar liter dikonsumsi di Jabodetabek dan sisanya menyebar di seluruh Indonesia.

C. Supply: Sumber Air Jakarta

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang setiap tahun mengalami peningkatan, perusahaan air bersih di DKI Jakarta menghadapi permasalahan utama yaitu terbatasnya sumber air baku. Sungai-sungai yang ada di Jakarta mengalami tingkat pencemaran yang tinggi sehingga membutuhkan biaya pengolahan yang besar bila dijadikan sumber air baku. Selama ini sumber air baku Jakarta 97 persen berasal dari luar Jakarta yaitu dari waduk Jati luhur, Cisadane, dan Cikokol. Hanya 3 persen yang dipasok dari Jakarta yaitu kali Krukut dan kali Pesanggrahan. Kapasitas produksi maksimum perusahaan air bersih di DKI Jakarta mencapai 20.985 liter per detik (tahun 2018). Realisasinya, rata-rata produksi air masih dibawah kapasitas penuh, kapasitas produksi efektif sebesar 20.627 liter per detik (tahun 2018). Disamping jumlah produksi yang belum mencapai kapasitas penuh, perusahaan air bersih juga dihadapkan pada permasalahan tingkat kebocoran pada jaringan distribusi air bersih. Sebesar 27,42 persen (tahun 2018) air yang diproduksi, tidak sampai kepada pelanggan, hilang di perjalanan.

Pemanfaatan air tanah sebagai sumber daya air lainnya harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Penyedotan air tanah secara berlebihan memberikan dampak terhadap meningkatnya laju penurunan muka tanah. 30 persen penurunan muka tanah Jakarta disumbang akibat dari pengambilan air tanah ini, disusul kompaksi tanah (alamiah), pembebanan akibat pembangunan, dan geotektonik. Pengukuran yang dilakukan oleh Badan Geologi, penurunan permukaan tanah di Jakarta mencapai 12 sentimeter per tahun. Penurunan muka tanah paling tinggi terjadi di daerah Ancol, Jakarta Utara. Kondisi cekungan air tanah Jakarta saat ini memasuki zona kritis akibat eksploitasi air tanah mencapai 40 persen di atas ambang batas normal 20 persen yang direkomendasikan. Jumlah penggunaan air tanah di DKI Jakarta di tahun 2018 sebesar 8.155.282 m³ dan tahun 2019 (hingga bulan September) sebesar 8.876.987 m³ (1 m³= 1000 liter). Rentang volume penggunaan air tanah perbulan di tahun 2018–2019 antara 500.000–750.000 m³ dan mengalami lonjakan pada bulan April 2018 sebesar 1.372.055 m³ dan puncaknya terjadi di bulan Juni 2019 sebesar 1.750.822 m³. Dalam upaya menahan laju penurunan muka tanah tersebut, pemerintah provinsi dan DPRD DKI Jakarta sejak tahun 2018 sudah mulai membahas peraturan daerah mengenai larangan penggunaan air tanah. Produk hukum yang tersedia saat ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2018 tentang pengawasan air tanah.

D. Biaya Air

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa tarif dikatakan terjangkau apabila pengeluaran rumah tangga per bulan untuk pemenuhan standar kebutuhan pokok akan air minum tidak melebihi 4% (empat per seratus) dari rata-rata pendapatan rumah tangga untuk kelompok pelanggan yang bersangkutan, atau 4% (empat per seratus) dari Upah Minimum Provinsi, angka tersebut 1 persen lebih besar dari target yang dicanangkan oleh PBB (3%). Mengacu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 tahun 2019 mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.276.349. Diperoleh target pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan air sebesar Rp. 128.290 per bulan (4% UMP). Pengakuan warga Jakarta yang belum terakses air bersih, mereka mencukupi kebutuhan akan airnya dengan mengeluarkan uang sekitar Rp 20.000 per hari atau Rp 600.000 per bulan. Biaya air tersebut masih cukup tinggi melampaui target yang dicanangkan.

E. Inovasi: Memanen Air Atmosfer

Kandungan Air dalam Udara Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Terdiri dari 3 unsur utama, yaitu: udara kering, aerosol, dan uap air (air yang berada pada fase gas). Udara kering mengandung 78 persen nitrogen, 21 persen oksigen, dan 1 persen gas lainnya. Aerosol adalah benda berukuran kecil, seperti garam, karbon, sulfat, nitrat, kalium, kalsium, serta partikel dari gunung berapi. Uap air yang ada di udara berasal dari evaporasi laut, sungai, danau, dan tempat berair lainnya. Keberadaan uap air di troposfer (lapisan atmosfer paling bawah yang tepat di atas permukaan bumi, ketinggian antara 0 sampai dengan 16 km) memegang peranan utama dalam pembentukan cuaca karena uap air di troposfer merupakan sumber dari semua bentuk kondensasi (proses pengembunan) dan presipitasi (hujan dan salju). Uap air terbesar berada di atas daerah tropis. Jumlahnya bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun secara umum diperkirakan jumlah atau konsentrasi uap air di troposfer berkisar antara hampir 0 persen sampai 4 persen (4 gram air untuk setiap 100 gram udara).

Di alam, siklus air dimulai dari panas sinar matahari yang menyebabkan terjadinya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, sehingga membentuk titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun air semakin banyak dan memadat, kemudian membentuk awan, sehingga makin berat dan tidak mampu lagi ditahan udara. Karena gaya berat tubuhnya sendiri, titik embun air ini lalu jatuh ke tanah sebagai hujan.

F. Cara Kerja Mesin Pemanen Air Atmosfer

Dalam upaya untuk memperoleh air setiap waktu, proses presipitasi yang terjadi di alam tersebut kemudian direkayasa ke dalam sebuah mesin yang dapat memanen air cair yang di-ekstraksi dari uap air di udara ambien (udara atmosfer dalam keadaan aslinya). Berdasarkan penggunaan energinya, terdapat dua jenis metoda pemanenan, yaitu: pasif dan aktif. Metoda pasif tidak memerlukan masukan energi, seperti: pemanenan kabut, pengumpulan embun. Teknik pasif ini dapat beroperasi di daerah dengan kelembaban tinggi atau rentang temperatur yang cukup besar untuk memungkinkan kondensasi spontan. Karena kendala ini, lokasi di mana metoda pasif dapat diterapkan menjadi terbatas dan biasanya tidak sesuai dengan lokasi yang mengalami kelangkaan air, yang cenderung memiliki kelembaban rendah. Metoda aktif, membutuhkan masukan energi untuk beroperasi, bekerja dengan baik pada tempat yang mempunyai kelembaban relatif di atas 30% dan temperatur di atas

18,3 derajat Celsius, sehingga sesuai untuk diterapkan di Jakarta karena mempunyai temperatur berkisar 30 derajat Celsius dan kelembaban relatif 80%. Mesin terdiri dari empat elemen utama: evaporator, kompresor, kondensor, dan katup ekspansi. Komponen-komponen ini, secara bersamaan, memungkinkan sistem untuk memadatkan media dari bentuk uap menjadi bentuk cair melalui kerja mekanik dan perpindahan panas dari elemen-elemen tersebut. Mesin dapat didesain dengan kapasitas berbeda sesuai peruntukannya. Untuk skala rumah tangga dirancang mesin dengan kapasitas 30-50 liter air per hari, lalu untuk skala industri dengan kapasitas 300 liter per hari ke atas.

III. PENUTUP

Melihat potensinya, penyediaan air minum yang bersumber dari ekstraksi air dari udara, sebaiknya tidak hanya sebatas pada pembuatan, pengadaan mesin saja tetapi perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu usaha partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai penyelenggara. Peran masyarakat dalam hal ini dapat dicirikan dengan adanya bentuk lembaga masyarakat yang mandiri keberadaannya sehingga dimungkinkan terlaksananya penyelenggaraan penyediaan air minum berbasis masyarakat yang mengutamakan pelayanan kepada para pengguna, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima, dan berkelanjutan.

IV. REFERENSI

- United Nations General Assembly (July 2010). Resolution A/RES/64/292: The human right to water and sanitation.
- UN-Water (2020). Analytical Brief on Unconventional Water Resources
- Peraturan Gubernur No 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi 2020.
- Badan Pusat Statistik (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 –2045.
- Badan Pusat Statistik (2019). Statistik Air Bersih DKI Jakarta 2015 –2018.
- Balai Konservasi Air Tanah (2018). Monitoring Air Tanah dan Subsiden Cekungan Air Tanah Jakarta. Diakses tanggal 13 Desember 2020 dari http://bkat.geologi.esdm.go.id/monas/t_homelist.php
- PAM JAYA (11 Oktober 2019). Rekapitulasi Data Hasil Pengujian Air Sungai dan Waduk di Jakarta bulan September 2019. Diakses tanggal 13 Desember 2020 dari http://pamjaya.co.id/id/others/press-release/data_recapitulation_results_testing_of_river_and_reservoir_water_in_september_2019_jakarta-776
- Sorta Tobing, Aghnia Adzka (29 Juli 2019). Susah air di ibukota. Diakses tanggal 13 Desember 2020 dari <https://lokadata.id/artikel/susah-air-di-ibu-kota>
- Mimi Kartika, Esthi Maharani (18 Februari 2019). Anies: 40 Persen Warga Jakarta Belum Akses Air Bersih. Diakses tanggal 13 Desember 2020 dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek_nasional/19/02/18/pn427a335-anies-40-persen-warga-jakarta-belum-akses-air-bersih
- pu.go.id (2007). Pemakaian air rumah tangga perkotaan. Diakses tanggal 14 Desember 2020 dari <https://www.pu.go.id/berita/view/4175/pemakaian-air-rumah-tangga-perkotaan-144-liter-per-hari>
- statistik.jakarta.go.id (2019). Penggunaan air tanah di DKI Jakarta meningkat di tahun 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2020 dari <http://statistik.jakarta.go.id/penggunaan-air-tanah-di-dki-jakarta-meningkat-di-tahun-2019/>
- bps.go.id (2017). Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum 2000-2016. Diakses tanggal 14 Desember 2020 dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/10/1361/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum-2000-2016.html>

13

Usulan Perijinan Pemanfaatan Ruang yang Partisipatif & Transparan

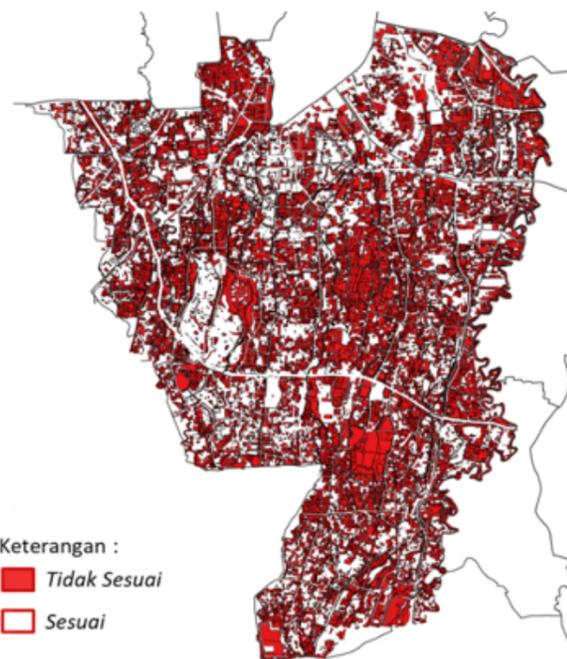
Oleh: Komisi 3 DRD DKI Jakarta

I. PENDAHULUAN

Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1965 telah mengalami empat kali perubahan. Dimulai pada Rencana Induk Kota (RIK) 1965 – 1985, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 1985 – 2005, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000 – 2010, kemudian terakhir RTRW 2010 – 2030. Dengan pengalaman memiliki rencana tata ruang selama 55 tahun, Provinsi DKI telah menjadi provinsi pelopor dalam bidang perencanaan bahkan sampai ketinggian detail skala kecamatan.

Namun demikian persoalan ketidaksesuaian rencana kota dengan implementasinya masih saja terjadi hingga saat ini. Berdasarkan temuan Penulis, ketidaksesuaian pola ruang di DKI Jakarta mencapai 50%. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya pengawasan perijinan hingga lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga banyak pola ruang yang belum terbentuk di beberapa area seperti rencana zona hijau dimana pada eksisting masih merupakan zona hunian yang sampai saat ini belum terimplementasikan.

GAMBAR 1 KETIDAKSESUAIAN RUANG DI DKI JAKARTA



Keterangan :
■ Tidak Sesuai
 Sesuai

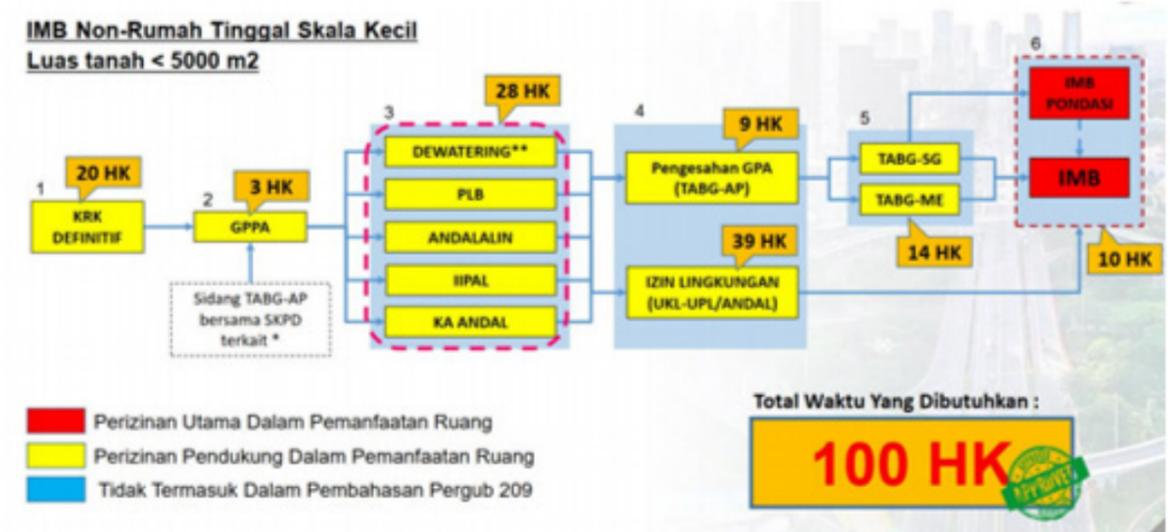
TABEL 1 PERSENTASE KETIDAKSESUAIAN

| Wilayah | Luas Ketidaksesuaian | Persentase Ketidaksesuaian |
|-----------------|----------------------|----------------------------|
| Jakarta Utara | 6.412,99 | 31,2% |
| Jakarta Timur | 9.755,17 | 58,3% |
| Jakarta Selatan | 7.577,68 | 67,6% |
| Jakarta Pusat | 2.384,07 | 57,8% |
| Jakarta Barat | 6.364,12 | 58,1% |
| TOTAL | 32.494,02 | 49,6% |

Sumber : diolah dari Jakartasatu.Jakarta.go.id, 2020

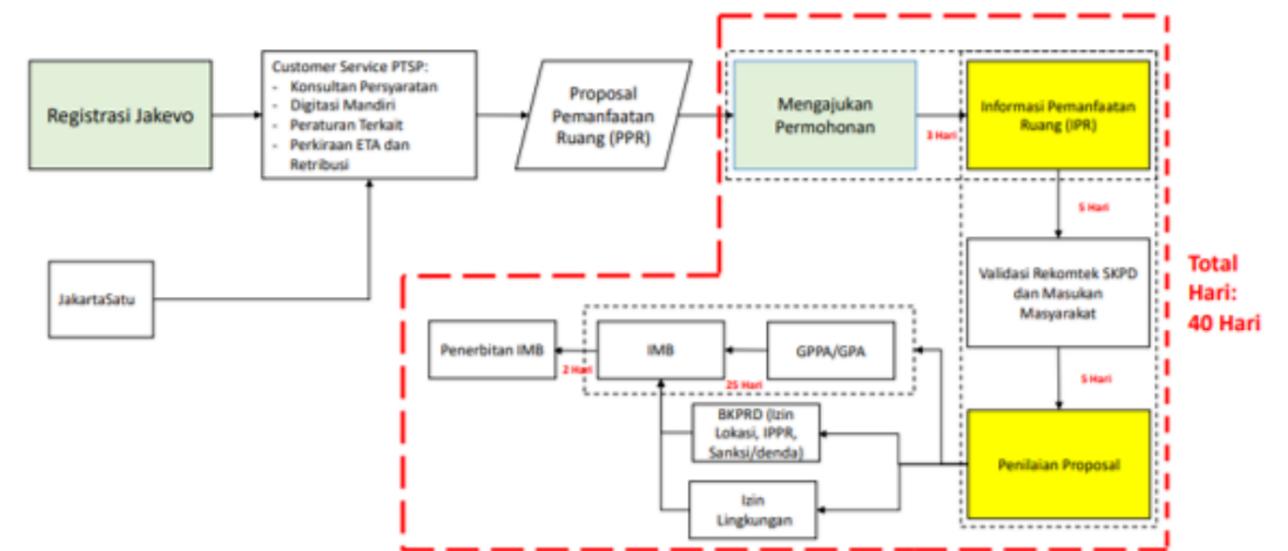
II. USULAN

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah wajah kota pasca Pandemi Covid19 ialah melakukan reformasi total di bidang perijinan agar kegiatan investasi dan pembangunan bisa dilakukan secara transparan, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi para pemohon, masyarakat, maupun Pemerintah.



Gambar 2. Perijinan Non Rumah Tinggal saat ini di Jakarta (sumber: PTSP DKI Jakarta, 2020)

Prosedur perijinan yang transparan, partisipatif, dan memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder hanya bisa dilakukan bila system beralih ke digital (menghindari tatap muka) dan memberlakukan Service Level Agreement (SLA) Otomatis atau Negative Approval. Oleh karenanya diusulkan agar alur sistem perijinan pemanfaatan ruang untuk non rumah skala kecil ialah sebagai berikut:



Gambar 3. Usulan Perijinan Pemanfaatan Ruang

Dalam usulan sistem perijinan pemanfaatan ruang terdapat dua komponen utama yang menjadi perbedaan tahapan prosedur pemanfaatan ruang, yaitu informasi pemanfaatan ruang dan penilaian proposal. Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR) mengumpulkan pelbagai informasi sehingga diharapkan memberikan output seperti:

- A. Nomor Persil: merupakan nomor induk registrasi perizinan persil, nantinya semua perizinan yang dimohonkan di atas persil ini akan di referensikan ke nomor ini.
- B. Informasi Kondisi Eksisting Persil: meliputi kondisi eksisting di atas dan di sekitar persil tersebut (penggunaan lahan, fasilitas terdekat, dan jalan terdekat)
- C. Informasi Kondisi Rencana Kota Persil: meliputi rencana tata ruang yang ber-overlapping dengan lahan.
- D. Informasi Kondisi Sosial Ekonomi Persil: meliputi informasi seperti kependudukan
- E. Analisis Persil: meliputi informasi hasil analisa kuantitatif dan kualitatif terkait kondisi persil. Seperti penggunaan koefisien gini untuk menganalisa tingkat kesenjangan ekonomi di suatu wilayah.
- F. Peta Teknis Persil: menjadi acuan arsitek pemohon dalam membuat dokumen-dokumen teknis, seperti: Gambar 2D 3D

Sedangkan tahap penilaian proposal adalah tahap dimana stakeholder Pemerintah Provinsi seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, Bappenda, Dinas Perhubungan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maupun masyarakat, asosiasi profesi (IAP, IAI, IARKI, dsb), akademisi, hingga Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memberikan masukan dan tanggapan terkait proposal dari Pemohon. Apabila dalam jangka waktu, misalnya, lima hari kerja belum ada tanggapan, maka dianggap proposal pembangunan dari Pemohon bisa disetujui sehingga masuk ke tahapan berikutnya.

Dengan adanya tahap penilaian proposal yang terbuka di Jakevo ataupun situs lainnya, diharapkan ada timbal balik tanggapan dan masukan dari berbagai pihak, sehingga prosedur perijinan yang tadinya masih tatap muka, hanya melibatkan pemohon dan dinas terkait, menjadi lebih terbuka dan menampung aspirasi masyarakat.

III. PENUTUP

Upaya mempercepat prosedur ijin pemanfaatan ruang seharusnya juga diimbangi dengan prinsip – prinsip partisipatif dan transparansi. Dengan kemajuan teknologi informasi, harapannya transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terwujud sehingga mewujudkan visi Jakarta 4.0 dimana masyarakatnya bisa menjadi kreator dan pemerintah menjadi kolaborator.

Namun demikian, usulan ini juga menuntut peran profesi dan masyarakat untuk dapat lebih terampil dan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait rencana pembangunan, sehingga terjalin sinergi antar pelaku pembangunan.

Harapannya kedepan akan percepatan prosedur ijin ini juga akan menjadi embrio dari Komisi Penataan Ruang, yang meliputi para ahli dan pelaku pembangunan terkait sehingga terwujud apa yang dicita – citakan dalam visi penataan ruang provinsi DKI Jakarta.

CATATAN TAMBAHAN

Upaya mempercepat prosedur ijin pemanfaatan ruang seharusnya juga diimbangi dengan prinsip – prinsip partisipatif dan transparansi. Dengan kemajuan teknologi informasi, harapannya transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terwujud sehingga mewujudkan visi Jakarta 4.0 dimana masyarakatnya bisa menjadi kreator dan pemerintah menjadi kolaborator.

Namun demikian, usulan ini juga menuntut peran profesi dan masyarakat untuk dapat lebih terampil dan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait rencana pembangunan, sehingga terjalin sinergi antar pelaku pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan substansi UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbentuknya Forum Penataan Ruang, yang mana akan melibatkan masyarakat, ahli, maupun pelaku usaha dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang, sehingga diharapkan tata ruang dapat lebih dinamis dan tetap berpegang teguh pada visi penataan ruang provinsi DKI Jakarta.

14

Kajian Partisipasi Komunitas dalam Pelestarian Cagar Budaya

Oleh: Komisi 4 DRD DKI Jakarta

Komunitas adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari berbagai individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan bersama. Sebuah komunitas dapat diidentifikasi melalui interaksi sosial yang terbentuk di antara individu yang melangsungkan beragam dimensi kebutuhan. Anggota komunitas seringkali bertindak dan peduli satu sama lain karena motivasi kesamaan kepentingan (interest) dan nilai (values).

Bangunan Cagar Budaya (BCB) sebagai monumen hidup (living monument) yang mengandung nilai-nilai warisan budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan keseharian komunitas, karena di dalam perkembangan zaman, selain merepresentasikan arti penting terhadap sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan budaya, sebuah CB masih terus berfungsi secara praktis dari waktu ke waktu. BCB mampu mengakomodasi beragam fungsi dan kebutuhan komunitas seperti fungsi pendidikan, kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi. Untuk membiayai fungsi-fungsi tersebut biasanya bersumber dari swadaya sepenuhnya oleh komunitas. Hal ini yang membuat tindakan pelestarian Cagar Budaya (BCB) perlu melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama, karena mereka telah menjadi garda terdepan yang berperan strategis untuk memastikan keberlanjutan agar BCB tetap lestari di masa kini.

Kepedulian terhadap pelestarian harus mempertimbangkan partisipasi komunitas sebagai bagian tak terpisahkan dari CB, karena tindakan pelestarian yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan perawatan tidak selalu rutin dilakukan oleh pihak di luar komunitas seperti tenaga ahli pelestari maupun pihak pemerintah dan swasta. Peran pemelihara ini seringkali diambil alih oleh komunitas sebagai pengguna yang hidup berdampingan dengan CB. Maka dari itu, prinsip pelestarian terhadap CB tidak hanya meliputi CB sebagai objek mati semata, tetapi juga harus bersama-sama dilakukan dengan komunitas dan untuk memberdayakan mereka.

Paradigma baru di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah menyusun seperangkat pengaturan yang lebih bersifat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk melestarikan CB. Paradigma ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan UU sebelumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang porsinya lebih banyak mengatur hal-hal yang dilarang terhadap CB oleh masyarakat. Kewajiban dan larangan tersebut akhirnya hanya mengandung pelestarian pasif terhadap CB secara kurang produktif sehingga tidak banyak mendorong pengembangan dan pemanfaatannya. Di sisi lain, penggunaan kontemporer terhadap BCB seringkali menghadirkan perubahan dan pengembangan inkremental pada bentuknya secara praktis seiring dengan bertambahnya kebutuhan baru di masyarakat. Kerusakan fisik dan penambahan bagian asli bangunan menjadi hal yang dianggap sebagai rutinitas dan tak terhindarkan. Masalah ini pun berkembang menjadi isu pelestarian yang lebih luas di tengah masyarakat; yaitu upaya mempertahankan nilai-nilai otentik fisik BCB di satu sisi, dan mendesaknya penyediaan kebutuhan fasilitas penunjang baru di sisi lainnya.

Ini menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan; baik pemerintah daerah, pemilik dan pengelola, maupun arsitek pelestari yang menggelar pekerjaan revitalisasi pada BCB untuk mampu menjaga keseimbangan di antara keduanya. Warga perlu mendapat manfaat pengetahuan dari tindakan pelestarian.

Sudah banyak berlangsung tindakan pemugaran terhadap bangunan bersejarah yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai BCB di DKI Jakarta yang dilakukan secara mandiri oleh komunitas karena kondisi urgen. Hal tersebut akhirnya menimbulkan risiko terhadap kualitas fisik bangunan maupun potensi terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 11 tahun 2010. Hal ini dapat terjadi disebabkan absennya pendampingan dari pemangku kepentingan, seperti kurangnya peran tenaga ahli pelestarian yang menghargai nilai heritage dan memiliki wawasan teknik pelestarian yang lebih luas; minimnya pengawasan dan layanan konsultasi para ahli bangunan gedung dan pemugaran; serta dukungan pemerintah daerah baik secara regulasi maupun pendanaan-pendampingan yang belum berjalan optimal. Dengan demikian, komunitas juga harus mendapat masukan dari ahli CB, sejarawan, akademisi. Proses pembangunan fasilitas baru di sekitar BCB harus memenuhi persyaratan CB maupun persyaratan bangunan yang terkait dengan fungsinya.

Dilema ini sesuai dengan apa yang selama ini terjadi pada peninggalan BCB yang eksis di tengah komunitas padat penduduk, seperti bangunan rumah ibadah misalnya. Renovasi berkala terhadap bangunan ibadah yang masih rutin digunakan kerap dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang darurat akibat faktor cuaca dan usia. Kerusakan fisik pada BCB terjadi juga disebabkan oleh minimnya perhatian terhadap bangunan bersejarah dan cagar budaya secara umum melalui alih fungsi lahan, minimnya dukungan masyarakat dan peraturan pemerintah daerah tentang pelestarian CB. Dinamika Pelestarian CB oleh Komunitas

Jakarta merupakan kota yang kaya akan sebaran bangunan bersejarah di dalamnya, terutama pada kawasan Kota Tua Jakarta dan sekitarnya. Wilayah ini telah menjadi tempat bermukimnya penduduk serta portal penyambung antara wilayah pesisir dan metropolitan di masa kini. Terletak di sekeliling jalan raya serta infrastruktur kota, hadirnya BCB di Kota Jakarta merupakan harta karun yang sarat nilai sejarah dan budayanya. BCB menjadi bukti artefak fisik dan warisan budaya yang terbagikan di masyarakat multikultural, menghimpun akulturasi dan percampuran budaya sepanjang jaman yang eksis di tengah-tengah ruang hidup masyarakat sejak ratusan tahun silam.

Proses pelestarian BCB secara mandiri oleh komunitas melibatkan pihak pemilik, pengelola, dan pengguna yang memiliki tanggung jawab bersama. Warga setempat sebagai pengguna BCB, terutama yang menjadi sarana publik seperti bangunan ibadah, memiliki respon yang lebih tanggap terhadap kondisi eksisting bangunan, karena terkadang pemilik resmi tidak bertinggal di lingkungan sekitar CB dan jarang mengadakan pengelolaan, sehingga kondisi BCB cenderung ditinggalkan dan terlantar.

Dalam kasus BCB yang masih difungsikan oleh masyarakat umum, pengguna BCB juga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan pemilik. Upaya pelestarian yang dilakukan untuk mencegah perubahan fisik yang otentik pada BCB tidak selalu dimaksudkan sebagai romantisasi masa lalu atau berangkat dari kepentingan parsial tertentu, tetapi itu dilakukan sebagai langkah untuk mempertahankan gaya dan elemen fisik yang mampu mencerminkan sejarah komunitas multikultural yang semakin absen. Dorongan untuk memajukan kebudayaan juga menjadi aspek penting yang memperkuat hubungan antara BCB dan masyarakat, Warisan budaya di sini tidak hanya berperan sebagai representasi atas satu-dua kelompok masyarakat saja, tetapi juga berfungsi sebagai simbol dan berfungsi praktis untuk mewadahi aktivitas sosial-budaya yang berkelanjutan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tindakan inisiatif dari komunitas terhadap CB terkadang juga berisiko berbenturan dengan aspek hukum. Sebagai bangunan bersejarah yang resmi terdaftar sebagai Bangunan Cagar Budaya DKI Jakarta, seluruh prinsip pelestarian harus berlandaskan pada aturan dan etika pelestarian yang berlaku.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu ikut proaktif dalam membantu komunitas setempat yang melakukan pelestarian BCB terutama pada tingkat regulasi dan administratif untuk menyediakan dokumen-dokumen yang menjadi prasyarat tindakan revitalisasi. Pasalnya, komunitas yang menjadi aktor utama pemugaran membutuhkan izin dan informasi yang berkenaan dengan aktivitas revitalisasi tersebut. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), Tim Sidang Pemugaran (TSP), hingga Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) perlu hadir dan mengambil tindakan yang tanggap dan strategis melalui pendampingan yang mengatur dampak positif dan negatif dari hadirnya perlakuan komunitas terhadap BCB.

Para mitra arsitek dan ahli pelestari juga dapat berperan dalam memfasilitasi masyarakat melalui pemberian masukan dan usulan di dalam perencanaan dan perancangan (desain) yang bersifat partisipatif. Langkah-langkah tersebut dapat dimulai dengan membantu tim panitia yang telah tersusun atas tokoh pimpinan lokal yang beranggotakan warga setempat, mendengarkan permasalahan umum dan teknis pada kondisi BCB saat itu, menampung kebutuhan/keinginan warga, serta membagikan pandangan sesuai dengan nilai-nilai BCB, prinsip desain arsitektur, dan juga aspek teknis. Beberapa kasus revitalisasi BCB berhasil ditangani dengan baik melalui keterlibatan pihak-pihak lain seperti halnya memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komunitas secara mandiri menerapkan prinsip-prinsip pelestarian arsitektur yang visioner, yang keduanya didukung oleh tenaga pelestari profesional. Posisi pemerintah, akademisi, tim ahli, arsitek profesional, dan tenaga ahli pelestari hanya mendorong, mendampingi, dan meyakinkan masyarakat sebagai tokoh kunci keberhasilan pemugaran. Sebaliknya, persepsi dan partisipasi komunitas yang akan menentukan sebagian besar keputusan penting sepenuhnya tentang bagaimana warisan budaya lokal dalam bentuk BCB harus dilestarikan dengan baik.

Proses pelaksanaan revitalisasi BCB yang melibatkan elemen komunitas secara partisipatif akan mendorong rasa memiliki (sense of belonging) dan menciptakan perluasan definisi terhadap kepemilikan dan pengelolaan terhadap CB. Peningkatan terhadap rasa kepemilikan tersebut dapat berkembang dari tingkat fungsi, peran, dan jenisnya. BCB yang awalnya hanya dimiliki dan dikelola secara formal sebagai warisan budaya yang bersifat eksklusif dapat menjadi semakin inklusif, terutama ketika masyarakat setempat telah mengambil peran sebagai "pemilik" sekaligus "pengelola". Ini menunjukkan tingginya inisiatif pengguna BCB tanpa memandang antara pemilik formal, fungsionaris, dan pengguna warisan budaya.

Masalah anggaran dan pembiayaan pelestarian BCB umumnya diselesaikan melalui gerakan sukarela para fungsionaris, terutama dari pimpinan Rukun Warga (RW 05) dan Rukun Tetangga (RT) yang dikelilingi lingkungan BCB berada. Pendanaan untuk pembangunan sarana fisik di lingkungan BCB sebelum melibatkan peran instansi pemerintah maupun pihak swasta hanya mengandalkan donasi dari para donatur yang berbentuk uang maupun material mentah.

BCB yang dilestarikan bersama-sama oleh masyarakat juga dapat mewakili kekayaan budaya komunitas yang lingkungannya lebih luas. Kita ambil contoh dari segi pendanaan pembangunan, bahwa sumber pemasukan yang terkumpul dalam arus kas untuk membiayai tindakan pelestarian seringkali berasal dari lingkup luar komunitas itu sendiri. Kategori donatur menjadi tidak terikat lagi pada hal-hal yang diasosiasikan secara langsung dengan BCB.

Sebuah BCB berjenis bangunan ibadah agama X, misalnya, bisa saja mendapatkan bantuan dana perlindungan dan pengembangan dari pihak-pihak yang memeluk keyakinan berbeda dari pada agama X. Hal yang sama terjadi pada BCB yang mewakili arti penting bagi satu kelompok masyarakat berdasarkan etnis, kepercayaan, domisili, dan kepentingan tertentu, tetapi kepedulian bisa hadir dari luar kelompok tersebut. Hal ini bisa terjadi karena faktor keterikatan budaya sepenanggungan pada masyarakat multikultural, serta visi dan minat yang sama terhadap pelestarian warisan budaya. Pendampingan Partisipatif dalam Revitalisasi CB

Sebagai bagian dari pelestarian CB, program revitalisasi memerlukan pembangunan berkelanjutan yang juga harus memfasilitasi penyelenggaraan aktivitas kontemporer untuk masyarakat, sehingga kepentingan dan tujuan pelestarian tidak bertentangan dengan kebutuhan masa kini dan berpotensi saling mendukung demi kepentingan bersama.

Proses dan tahap pelestarian Bangunan Cagar Budaya antara lain meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan. Upaya revitalisasi BCB akan mendukung program Pemerintah Daerah di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan pemanfaatan potensi pariwisata daerah di bidang budaya. BCB yang telah dimanfaatkan dapat menjadi sebuah destinasi wisata yang terintegrasi dengan program wisata pada objek budaya lokal lainnya yang khas, seperti bidang seni musik tradisional, kuliner dan jajanan lokal, hingga pertunjukan seni yang atraktif yang diselenggarakan melalui Festival Heritage di bawah Pengembangan Destinasi Wisata DKI Jakarta.

Komunitas juga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan konsep rancangan wisata heritage trail yang menunjukkan BCB yang telah dilestarikan sebagai daya tarik bagi wisatawan dan pengunjung. BCB sebagai peninggalan bersejarah di sini tidak hanya berperan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan tempat sosial, tetapi juga mengandung fungsi budaya dan pariwisata. Arah program ini memunculkan tantangan selanjutnya bagi BCB untuk menampung berbagai kegiatan budaya selain fungsi utamanya, demi menyikapi tren peningkatan kunjungan terhadap BCB seiring berlangsungnya integrasi kawasan wisata di sekitar Kota Tua Jakarta yang menuntut adanya fasilitas penunjang di seluruh BCB.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelestarian BCB partisipatif bersama komunitas bertujuan menciptakan perubahan sosial melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki peranan berbeda sebagai mitra yang setara dalam hubungan yang dinamis, mendorong partisipasi aktif dan dialog yang tidak menciptakan perbedaan formal antar berbagai pihak. Cara seperti ini akan membantu praktik revitalisasi BCB secara lebih fleksibel demi mencapai demokratisasi pengelolaan warisan budaya.

Langkah-langkah pendampingan dalam pelestarian partisipatif umumnya meliputi aktivitas perencanaan, tindakan dan/atau pengumpulan data, observasi dan analisis, dan refleksi untuk mengembangkan keputusan dalam pelestarian. Pendampingan dirumuskan ke dalam tiga kegiatan utama, antara lain:

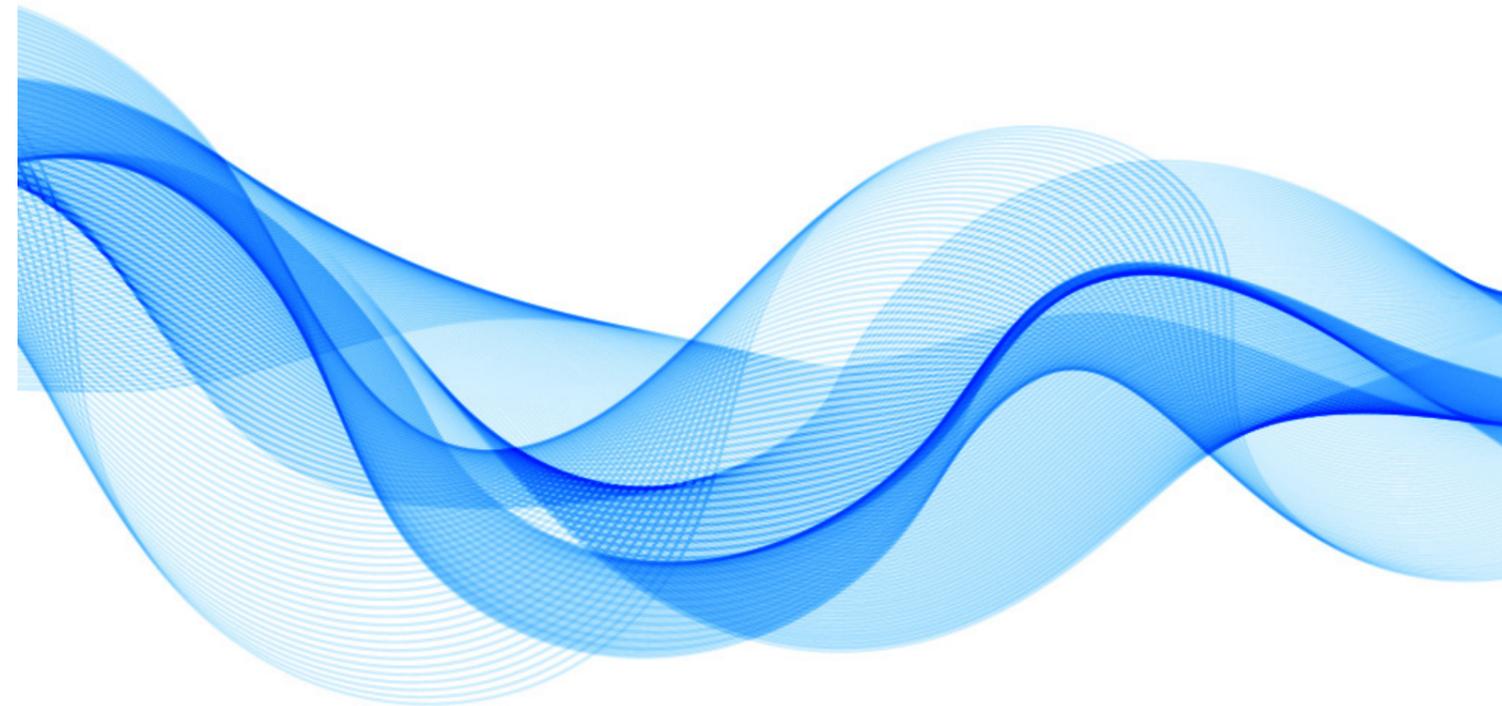
- 1) Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan komunitas terkait CB melalui Komisi 4 -Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta lokakarya (workshop) tentang Cagar Budaya dan prinsip pelestarian BCB;
- 2) Tindakan praktik pemugaran BCB yang memberdayakan komunitas dan melibatkan para ahli (arsitek dan tenaga ahli pelestari);
- 3) Dukungan pendanaan

Tiga kegiatan ini dapat dimulai dari diskusi dengan masyarakat lokal untuk proses revitalisasi yang belum, sedang, dan akan berlangsung terhadap BCB; mengadakan dokumentasi komprehensif mengenai objek di sekitar BCB; mengadakan penelitian sejarah dan signifikansi BCB yang melibatkan memori masyarakat setempat; hingga melangsungkan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif dan menanamkan nilai gotong royong, seperti kerja bakti dan pemeliharaan rutin BCB.

Di tahap berikutnya, penyusunan rencana induk (masterplan) revitalisasi harus memuat rancangan partisipatif setelah melibatkan anggota masyarakat di tingkat lokal (RT/RW, kelurahan, dan kecamatan), serta mengajak kalangan profesional seperti arsitek dan akademisi di lingkungan tempat tinggal komunitas, hingga pada tahap pelaksanaan yang meliputi pembangunan fisik sarana dan fasilitas penunjang, penganggaran dan pembelanjaan sumber daya material, dan pengawasan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- , Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
..... , Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
..... , Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.475 tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya.





Publikasi

DRD News

Aktifitas di Media Sosial

Jurnal Riset Jakarta

Penerbitan Buku

Diseminasi Ilmiah

15

Kegiatan Publikasi DRD DKI Jakarta Tahun 2020

Oleh: Tim Publikasi DRD DKI Jakarta

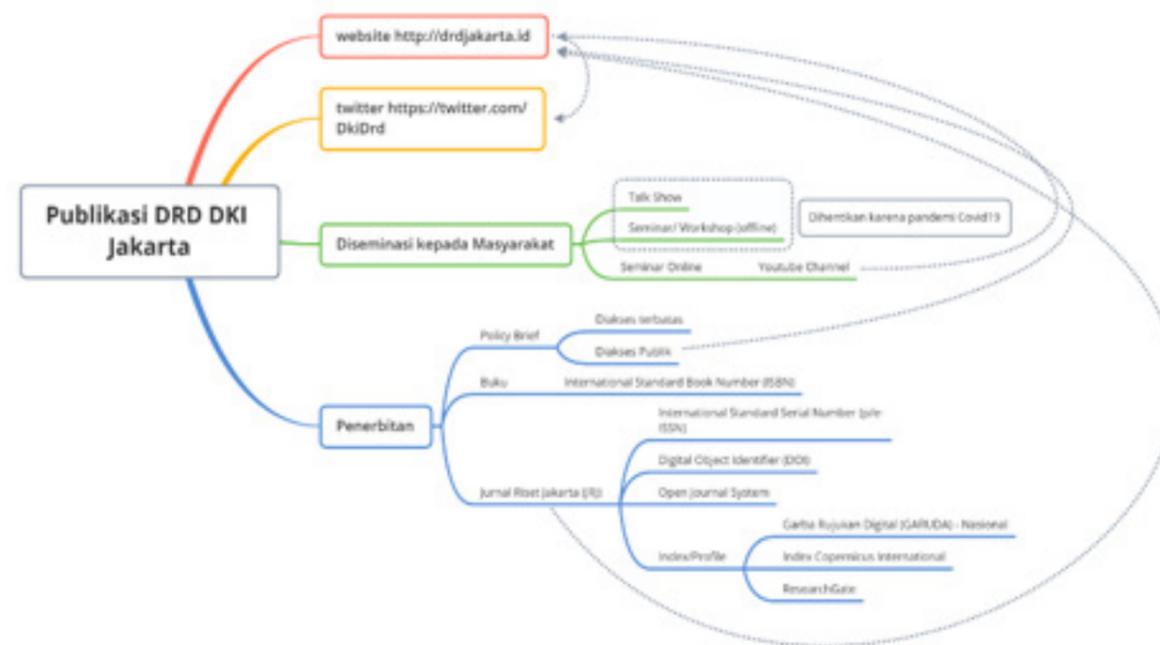
I. PENDAHULUAN

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta periode masa kerja tahun 2018-2020, telah aktif melakukan berbagai kegiatan riset, diskusi, penyusunan ikhtisar kebijakan (policy brief), rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur Prof. Anies Baswedan, Ph.D, rapat koordinasi dengan Bapak Wakil Gubernur Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A, turut aktif dalam Musrenbang, dan rapat-rapat bersama Kepala BAPPEDA Dr. Nasruddin Djoko Surjono, dan tentunya bersama dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dalam seminar online sebagai pengganti kegiatan TalkShow karena adanya pandemic Covid-19.

Para anggota DRD DKI Jakarta yang merupakan ahli/pakar di bidangnya masing-masing, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga aktif membawa nama DRD DKI Jakarta di beberapa kegiatan profesionalnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas kemudian didokumentasikan dan didiseminasikan dalam bentuk publikasi. Publikasi reguler yang dilakukan oleh DRD DKI Jakarta adalah melalui Website <http://drdjakarta.id> dan twitter <https://twitter.com/DkiDrd>. Adapun Publikasi ilmiah disajikan dalam bentuk Open Journal System (OJS) Jurnal Riset Jakarta dengan alamat: <https://drdjakarta.id/jrj/index.php/jurnalDRD/about> yang bisa diakses langsung oleh public dan diunduh pdf artikelnya saat ini tanpa berbayar. Pengelolaan jurnal ilmiah inipun masih ditanggung sepenuhnya oleh DRD DKI Jakarta sehingga pengirim naskah pun belum dikenai biaya proses publikasi. Terkait dengan dokumen publikasi berupa ikhtisar kebijakan (policy brief) ada yang bersifat rahasia karena hanya untuk konsumsi Gubernur/Wakil Gubernur dan pimpinan di pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta, dan ada juga policy brief yang dapat menjadi konsumsi publik yang dapat diakses melalui <https://www.drdjakarta.id/index.php/publikasi/policy-brief>. Badan penerbit DRD DKI Jakarta pada tahun 2020 ini juga menerbitkan sebuah buku berjudul “KAJIAN PERENCANAAN DAN PERANGCANGAN GRHA SEHAT MANDIRI COVID-19” yang memiliki p-ISBN 978-623-94517-0-7 (versi cetak), dan e-ISBN 978-623-94517-1-4 (versi elektronik pdf).

Secara umum, resume publikasi dari DRD DKI Jakarta dapat disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Publikasi DRD DKI Jakarta pada tahun 2020

II. STATISTIK BERITA (DRD-NEWS) DIBACA OLEH PUBLIK

Aktivitas dari para anggota DRD DKI Jakarta baik secara perorangan maupun secara komisi dan kegiatan resmi dari DRD DKI Jakarta didiseminasikan sebagai berita di Website DRD DKI Jakarta. Tercatat dari 1 Januari hingga 24 Desember 2020 telah diunggah 73 berita. Apabila dijumlahkan total dengan berita-berita sebelumnya dari sejak awal Website DRD di-published maka ada sekitar 19.551 (Semilan belas ribu lima ratus lima puluh satu) berita. Keseluruhan berita tersebut mendapatkan animo yang cukup besar karena rata-rata per satu berita telah dibaca sebanyak 267.8219 (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas) kali. Ilustrasi Statistik berita (DRD-News) dapat dilihat pada Tabel 1.

| Status | Title | Access | Author | Language | Date Created | Hits | Views | Ratings | ID |
|--------|--|-----------|----------------|----------|--------------|------|-------|---------|-----|
| ✓ | Seminar Online DRD DKI Jakarta Perencanaan Laut & Kepulauan 5 atau Nelayan Dengan Lintas Sektor: Jalan, seminar online ini diorganisir & dilaksanakan pada 10 Desember 2020. Untuk informasi lebih lanjut, klik link berikut ini: https://www.drdjakarta.id/index.php/publikasi/policy-brief | Publikasi | Joko Subandono | id | 2020-12-04 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| ✓ | Seminar Online "Kolaborasi DRD DKI Jakarta dan Dosen Pengajaran Tinggi Dalam Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Terluar - Jakarta" pada seminar online ini akan membahas tentang pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan terluar. | Publikasi | Joko Subandono | id | 2020-12-02 | 10 | 10 | 10 | 104 |
| ✓ | Seminar Online "Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Pengajaran Tinggi Dalam Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Terluar - Jakarta" pada seminar online ini akan membahas tentang pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan terluar. | Publikasi | Joko Subandono | id | 2020-12-01 | 10 | 10 | 10 | 103 |
| ✓ | Anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Turut Pijakan Peran Perencanaan Kita Dalam Mendukung Implementasi UU Cipta Kerja di Jakarta. Anggota dewan riset dan dewan ahli Jakarta berdiskusi dengan para pemangku kebijakan dalam mendukung implementasi UU Cipta Kerja di Jakarta. | Publikasi | Joko Subandono | id | 2020-12-19 | 10 | 10 | 10 | 102 |
| ✓ | Anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Dukung Peran Pengajaran Tinggi Dalam Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Terluar - Jakarta. Anggota dewan riset dan dewan ahli Jakarta berdiskusi dengan para pemangku kebijakan dalam mendukung implementasi UU Cipta Kerja di Jakarta. | Publikasi | Joko Subandono | id | 2020-12-19 | 10 | 10 | 10 | 101 |

Tabel 1. Contoh Statistik Berita (DRD-News) 2020

Adapun 5 (lima) berita terfavorit yang dibaca oleh publik adalah topik: tentang DRD DKI Jakarta membentuk Task Force Mitigasi Dampak Covid-19 (diunggah 2020-04-01, mendapatkan 626 hits); tentang the 5th international joint studio and seminar on green urbanism for sustainable environment Jakarta and Tangerang (diunggah 2020-01-09, mendapatkan 564 hits); tentang peran serta DRD DKI dalam pencetakan sumber daya manusia unggul lulusan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (diunggah 2019-12-18, mendapatkan 556 hits); tentang call for paper Jurnal Riset Jakarta Volume 12 nomer 2 tahun 2019 (diunggah 2019-10-09, mendapatkan 542 hits); dan tentang terpilihnya Prof. Kemas Ridwan Kurniawan sebagai Ketua DRD DKI Jakarta (520 hits), lihat Tabel 2.

| # | Status | Title | Access | Author | Language | Date Created | Hits* | Views | Rating |
|---|--------|---|--------|---------------|----------|--------------|-------|-------|--------|
| 1 | ✓ | DRD Riset Daerah DKI Jakarta Bentuk Task Force Mitigasi Dampak & Covid-19 | Public | Joko Subandyo | id | 2020-04-01 | 626 | 140 | 5 |
| 2 | ✓ | [Early Bird] The 5th International Joint Studio & Seminar on Green Urbanism for Sustainable Environment Jakarta & Tangerang | Public | Joko Subandyo | id | 2020-01-09 | 564 | 112 | 5 |
| 3 | ✓ | DRD DKI Jakarta Terlibat Dalam Pencetakan SDM Unggul Lulusan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia | Public | Joko Subandyo | id | 2019-12-18 | 556 | 110 | 5 |
| 4 | ✓ | Call for Paper Jurnal Riset Jakarta Vol. 12 No. 2, November 2019 | Public | Joko Subandyo | id | 2019-10-09 | 542 | 73 | 5 |
| 5 | ✓ | Selamat Atas Terpilihnya Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.S.c., Ph.D Sebagai Ketua DRD DKI Jakarta | Public | Joko Subandyo | id | 2019-10-08 | 520 | 65 | 5 |

Tabel 2. Lima berita terfavorit tercatat pada 24 Desember 2020

III. STATISTIK MEDSOS (TWITTER) DRD DKI JAKARTA

DRD DKI Jakarta aktif melakukan Twit di sepanjang tahun 2020, kecuali antara Juni hingga Agustus, dengan total 64 Twit. Aktivitas Twit ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Kekosongan tersebut sehubungan dengan aktivitas lebih difokuskan kepada penyusunan desain dan buku Grha Sehat Mandiri untuk mitigasi dampak pandemi Covid-19. Statistik Twit bulanan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Total jumlah twit DRD DKI Jakarta 1 Januari - 28 Desember 2020

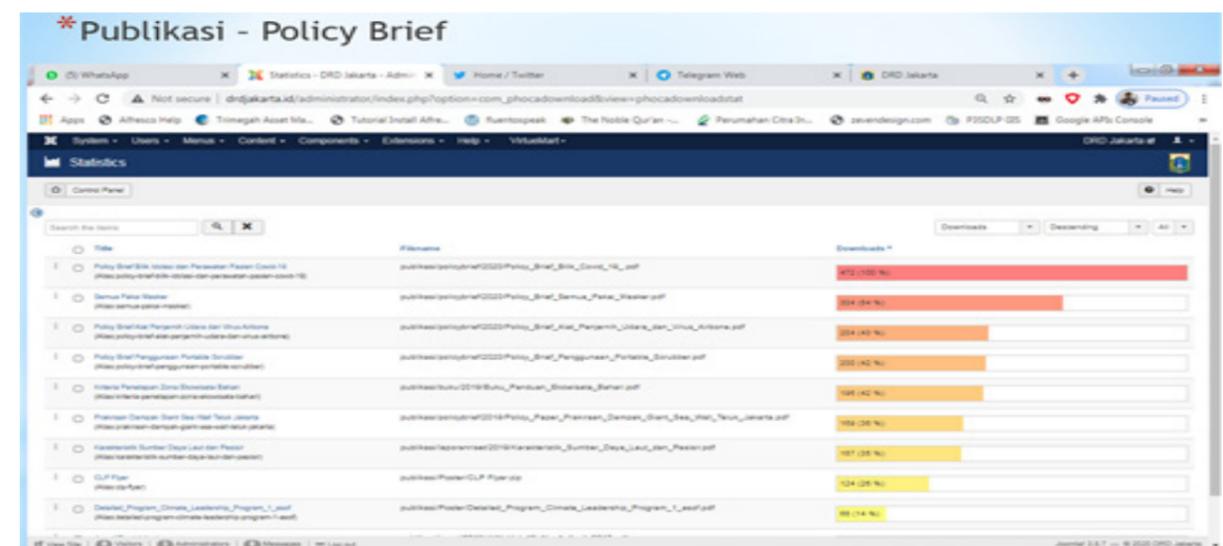
Berdasarkan Twitter analytic tools bisa diketahui bahwa public memberikan respon yang sangat baik terhadap materi yang di-Twitt-kan oleh DRD DKI Jakarta. Hal ini dapat direpresentasikan dari statistic 4 bulan terakhir, dimana pada September didapatkan 638 impressions dalam 30 hari, Oktober mendapatkan 505 impressions dalam 31 hari, November mendapatkan 626 impressions dalam 30 hari, dan Desember mendapatkan 736 impressions hanya dalam 28 hari, lihat Gambar 3.



Gambar 3. Lima berita terfavorit tercatat pada 28 Desember 2020

IV. STATISTIK TERUNDUHNYA IKHTISAR KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

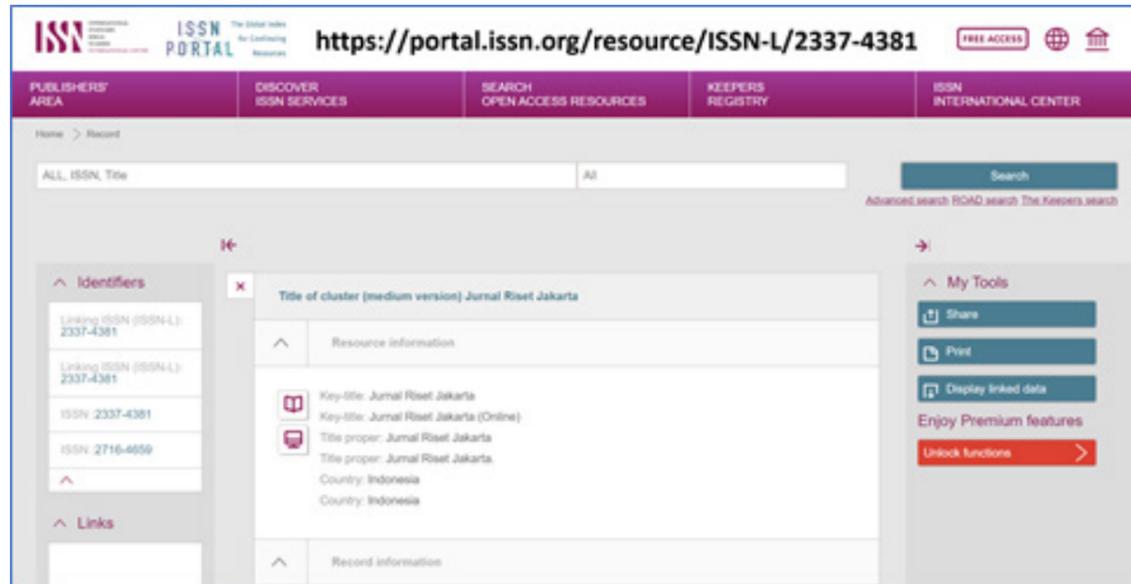
Ikhtisar kebijakan (policy brief) yang dihasilkan oleh DRD DKI Jakarta ternyata mendapatkan perhatian masyarakat. Empat policy brief terbanyak diunduh oleh publik adalah: Policy Brief Bilik Covid-19 yang diunduh oleh publik sebanyak 472 kali, Policy Brief Semua pakai masker telah diunduh public sebanyak 304 kali, Policy Brief Alat penjernih udara dan virus airborne telah diunduh public sebanyak 204 kali, dan Policy Brief Penggunaan portable scrubber telah diunduh public sebanyak 200 kali, lihat Gambar 4.



Gambar 4. Statistik Policy Brief terunduh oleh publik terbanyak, status pada 28 Desember 2020

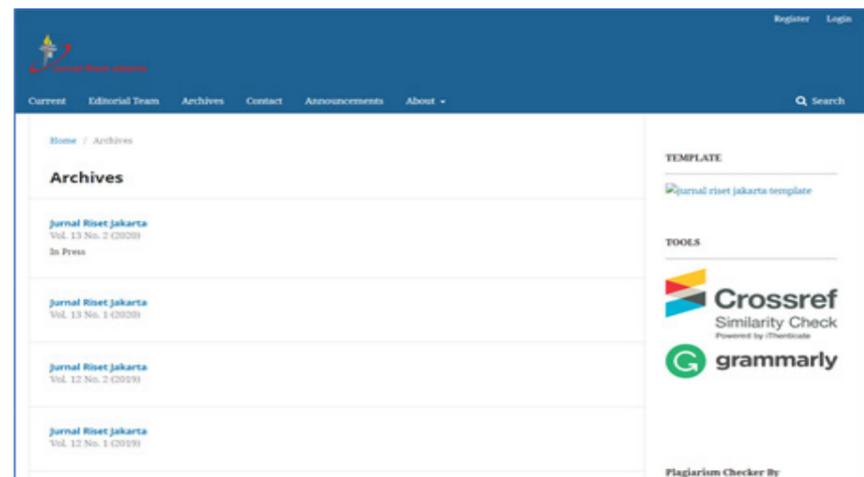
V. JURNAL RISET JAKARTA (JRJ)

JURNAL RISET JAKARTA (JRJ), p-ISSN: 2337-4381, e-ISSN: 2716-4659, merupakan Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, lihat Gambar 5. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian orisinal, konseptual ide, dan kajian ilmiah terkini seputar isu Jakarta terkait: pemerintahan; kesejahteraan; perekonomian dan keuangan; kesejahteraan rakyat; pembangunan dan lingkungan hidup. Artikel ilmiah dapat ditulis perorangan maupun tim baik yang berafiliasi pada lembaga di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan provinsi daerah, perguruan tinggi, Lembaga mitra, dan masyarakat umum.



Gambar 5. ISSN untuk Open Journal System (OJS) Jurnal Riset Jakarta.

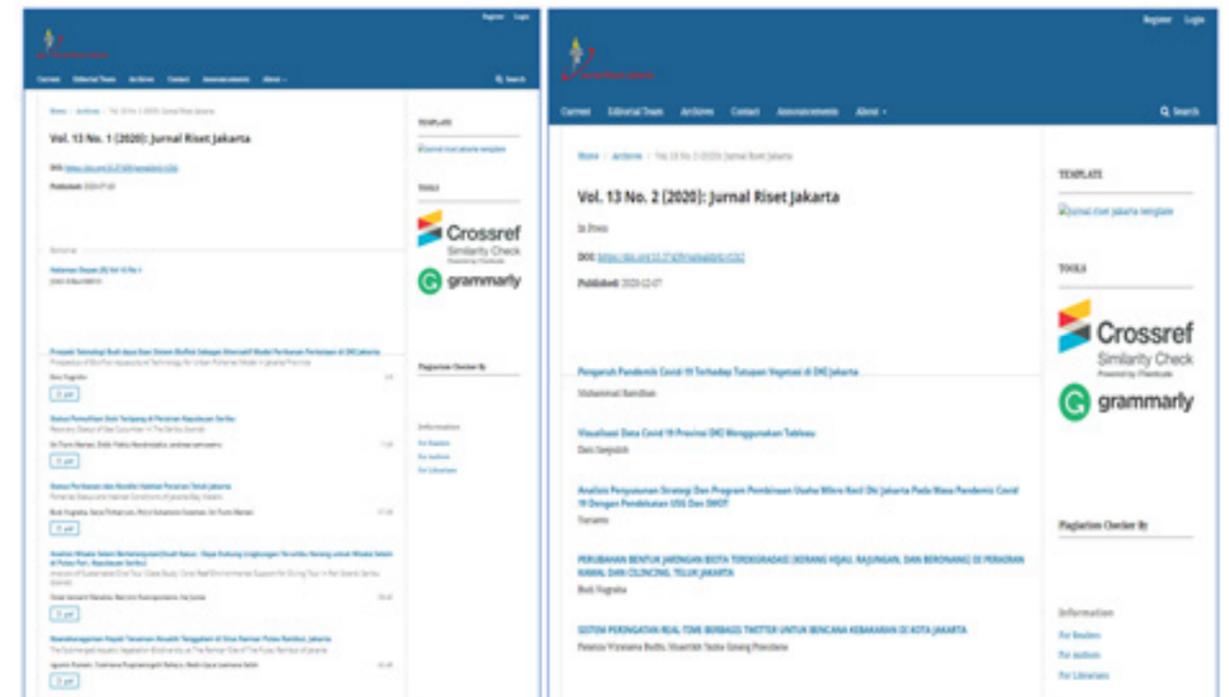
Frekuensi dari terbitan Jurnal Riset Jakarta adalah 2 (dua) kali setahun. Dimana Volume adalah Tahun, sedangkan Nomer terbitan, dimana nomer 1 adalah terbit pada bulan Juli, dan nomer 2 terbit pada bulan November pada setiap tahunnya. Setiap nomer terbitan berisi 5 (lima) artikel ilmiah. Satu artikel berisi 7 – 10 halaman. Jurnal Riset Jakarta volume 1 hingga 11 berupa cetak, yang dikelola oleh DRD DKI periode sebelum tahun 2018. DRD DKI Jakarta periode 2018-2022 memulai versi Open Journal System (OJS) atau lebih dikenal sebagai Jurnal Online (e-journal) pada volume 12 No. 1 Juli 2019, lihat Gambar 6.



Gambar 6. OJS Jurnal Riset Jakarta sejak Vol 12 No 1/2019 s/d Vol 13 No 2/2020.

Jurnal Riset Jakarta (JRJ) Volume 13 nomer 1 Tahun 2020, kelima artikelnya membahas tentang lingkungan dan sumber daya laut dan pesisir di wilayah ekoregion laut DKI Jakarta, yang meliputi Teluk Jakarta dan Perairan Kepulauan Seribu, dan juga ada artikel yang membahas kemungkinan teknologi budidaya ikan menggunakan sistem pakan bioflok yang cocok untuk perkotaan seperti Jakarta, lihat Gambar 7 kiri.

Jurnal Riset Jakarta (JRJ) Volume 13 nomer 2 Tahun 2020, lebih beragam artikelnya. Dua artikel membahas tentang Covid-19, 1 (satu) artikel membahas strategi ekonomi mikro untuk adaptasi terhadap Covid-19, 1 (satu) artikel membahas kemungkinan adanya mutase bentuk organisme laut di Teluk Jakarta akibat pencemaran, dan 1 (satu) artikel membahas tentang konseptual desain sistem peringatan dini bencana kebakaran untuk kota Jakarta dengan memanfaatkan Twitter, lihat Gambar 7 kanan.

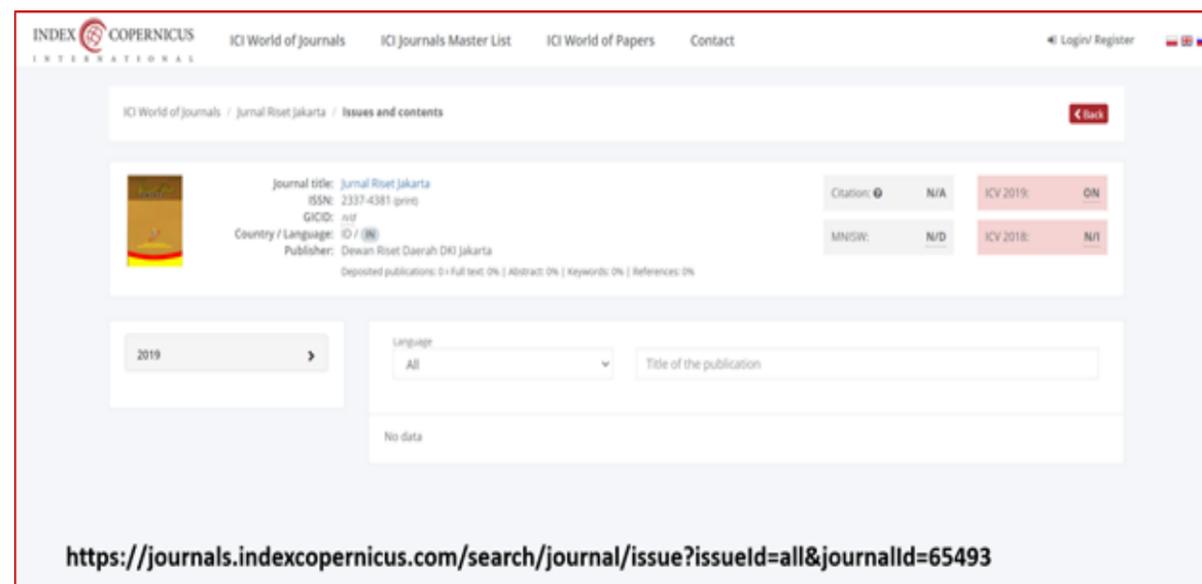


Gambar 7. Daftar artikel Jurnal Riset Jakarta Vol 13 No.1/2020 (kiri) & Vol 13 No.2/2020 (kanan).

Jurnal Riset Jakarta (JRJ) telah terdaftar di Garba Rujukan Digital (Garuda) Nasional yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek-BRIN) yang artinya sudah diakui sebagai salah satu jurnal ilmiah nasional, lihat Gambar 8. JRJ walaupun belum berbahasa Inggris, namun telah terdaftar di Lembaga indeks global internasional yakni Index Copernicus International, lihat Gambar 9. Hal ini untuk pengembangan JRJ di masa depan agar bisa menjadi jurnal berbahasa Inggris.



Gambar 8. Profil Jurnal Riset Jakarta (JRJ) di Garba Rujukan Digital (Garuda) Nasional



Gambar 9. Profil Jurnal Riset Jakarta (JRJ) di Index Copernicus International

Pada tahun 2021, direncanakan Jurnal Riset Jakarta (JRJ) akan diusulkan untuk diakreditasi di Sistem Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA) Ristek-BRIN, selain kegiatan penerbitan reguler volume 14 untuk nomer 1 (Juli) dan nomer 2 (November).

Dalam rangka untuk mendiseminasikan dan mempromosikan artikel-artikel pada Jurnal Riset Jakarta (JRJ) agar komunitas ilmiah semakin mengenalnya, dan dalam rangka agar artikel-artikel dari JRJ dibaca dan disitasi/dirujuk oleh komunitas ilmiah maka JRJ telah memiliki profil di ResearchGate, lihat Gambar 10.



Gambar 10. Profil Jurnal Riset Jakarta (JRJ) di sosial media komunitas ilmiah ResearchGate

Dampak positif dari telah dimilikinya profil di Garuda, Index Copernicus International dan juga di ResearchGate, maka Jurnal Riset Jakarta (JRJ) mendapatkan kunjungan dari 25 negara selain Indonesia. Adapun 3 (tiga) negara di luar Indonesia yang frekuentif mengunjungi JRJ adalah China, United States dan Singapura, lihat Gambar 11.



Gambar 11. Hingga 31 Desember 2020 Jurnal Riset Jakarta (JRJ) mendapatkan kunjungan dari 25 negara di luar Indonesia.

VI. PENERBITAN BUKU GRHA SEHAT MANDIRI COVID-19

DRD DKI Jakarta membentuk Task Force Mitigasi Covid-19 yang salah satu kegiatannya adalah melakukan kajian perencanaan dan perancangan Model Grha Sehat Mandiri Covid-19 yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang memiliki ISBN: 978-62-39451-70-7 versi cetak dan ISBN: 978-62-39451-71-4 versi elektronik, lihat Gambar 13.



Gambar 13. Cover dan Katalog Dalam Terbitan Buku Grha Sehat Mandiri COVID-19.

VII. DISEMINASI ILMIAH MELALUI SEMINAR ONLINE

Para anggota DRD DKI Jakarta aktif sebagai pembicara dalam beberapa seminar online. Contohnya seminar online yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Universitas Atma Jaya, membahas tentang Stop Kekerasan dalam Berpacaran di Kalangan Milenial, dengan menghadirkan Dr. Ir. Susy Y.R. Sanie, M.Si anggota Komisi 2 DRD DKI Jakarta sebagai salah satu narasumber, lihat Gambar 14 kiri. Contoh lainnya adalah seminar online yang diselenggarakan oleh Thamrin School dan IESR, mengupas Perpres 60/2020 untuk menggali peluang dan tantangan keberlanjutan Jabodetabek, menghadirkan Dr. Aisa Tobing sekretaris DRD DKI Jakarta sebagai salah satu narasumber, lihat Gambar 14



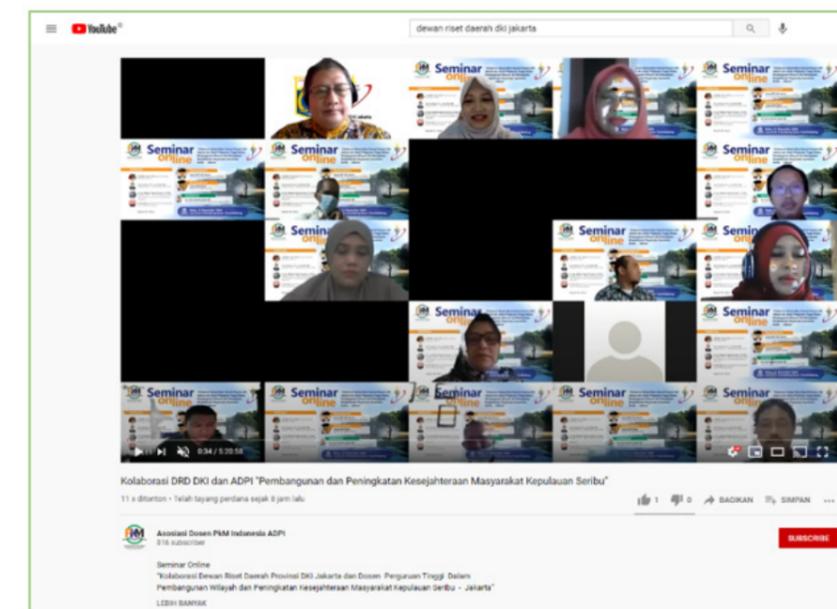
Gambar 14. Flyers acara seminar online yang menghadirkan anggota DRD DKI Jakarta.

Selain itu DRD DKI Jakarta juga secara resmi menyelenggarakan seminar online. Contohnya adalah DRD DKI Jakarta bekerjasama dengan Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia menyelenggarakan seminar tentang mewujudkan lansia yang sehat di perkotaan pada era kenormalan baru, lihat Gambar 15 kiri. Contoh lainnya adalah seminar online tentang pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu yang diselenggarakan oleh DRD DKI Jakarta bersama Asosiasi Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat (ADPI), lihat Gambar 15 kanan.



Gambar 15. Flyers seminar online DRD DKI Jakarta bekerjasama dengan UI (kiri), dan ADPI (kanan).

Dalam rangka meningkatkan outcome positif dari suatu seminar online yang diselenggarakan oleh DRD DKI Jakarta, maka dilakukan unggahan seminar online di youtube channel, lihat Gambar 16.



Gambar 16. Seminar online DRD DKI Jakarta bekerjasama dengan ADPI via Youtube Channel.



Masukan

Masukan terhadap Revisi RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017 - 2022 16

Masukan terhadap Raperda RDTR & PZ 17

Outline Agenda Riset Daerah DKI Jakarta 2021 - 2024 18

16

Masukan terhadap Revisi RPJMD DKI Jakarta 2017 - 2022

Oleh: Badan Pekerja DRD DKI Jakarta



**DEWAN RISET DAERAH (DRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**
Sekretariat :
Gd. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Lt.8
Jl. Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Telp:021-22038313 email: drd_jakarta@yahoo.co.id

Nomor : 082/DRD-DKI/VII/20 Jakarta, 31 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 3 Dokumen
Hal : Masukan DRD terhadap Revisi
RPJMD 2017-2022.

Kepada Yth :
Bapak. Dr. Ir. Nasruddin Djoko Surjono, M.Si, MBA
Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Menindak lanjuti hasil pertemuan DRD dengan Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, tanggal 08 Juli 2020 dan pembahasan Konsep Perubahan RPJMD tanggal 14 July 2020 bersama Bappeda dan dilanjutkan dengan pembahasan Komisi dan antar Komisi di DRD, maka bersama ini disampaikan masukan muatan materi terhadap Konsep perubahan dimaksud, sebagai mana tercantum dalam lampiran-lampiran berikut:

- Lampiran 1: Matriks Masukan DRD terhadap Perubahan RPJMD 2018-2022 sesuai Strategi, Target dan Klaster KSD
- Lampiran 2 : Masukan DRD terhadap Materi Presentasi Konsep Perubahan Perubahan RPJMD
- Lampiran 3 : Pokok-pokok Masukan DRD terhadap Perubahan RPJMD 2018-20

Adapun dasar Pembahasan yang dilakukan untuk merumuskan masukan ini adalah:

1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 143 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018 – 2022 2.
2. Pedoman Prosedur dan Tata Tertib DRD Periode 2018-2022;
3. Materi Presentasi Konsep Perubahan RPJMD 2017-2020 Bappeda kepada Gubernur Juni 2020 tentang Konsep Perubahan RPJMD 2017-2022, serta
4. **Memperhatikan 6 Strategi Pembangunan** dalam Mendukung upaya pemulihan pasca pandemic dan **Strategi Pencapaian Target Janji Kerja yang terdiri dari 5 klaster KSD**, yaitu: 1).Pembangunan Manusia, 2).Ekonomi Dan Infrastruktur, 3).Integritas Aparatur, 4).Kota Lestari dan 5).Simpul Kemajuan (masukan DRD dapat dilihat pada Lampiran 1: Matriks Usulan Perubahan RPJMD).
5. Capaian Kinerja Sasaran (Target) dan Capaian Kinerja Program diperkirakan akan sulit tercapai dalam kondisi dampak Pandemic saat ini atau mengalami kendala dalam pencapaiannya. Oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah dalam 2 pilihan yaitu dengan menyesuaikan target atau merubah strategi. Hal ini membutuhkan pendekatan kreatif (out of the box) untuk menstimulus prognosis capaian target kinerja

Workshop dimana DRD sesuai pembedangannya menjadi Nara Sumber ataupun DRD dapat dilibatkan dalam Tim Perumus.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua,

Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D

I. POKOK-POKOK BAHASAN USULAN PERUBAHAN RPJMD

Berdasarkan Konsep Perubahan RPJMD 2017-2022 yang diberikan oleh Bappeda, ada beberapa aspek yang menjadi dasar dari pokok bahasan DRD yaitu:

1. Evaluasi RPJMD dalam melihat Capaian Kinerja Sasaran (Target) dan Capaian Kinerja Program diperkirakan akan sulit tercapai dalam kondisi dampak Pandemic saat ini atau mengalami kendala dalam pencapaiannya. Oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah dalam 2 pilihan yaitu dengan menyesuaikan target atau merubah strategi. Hal ini membutuhkan pendekatan kreatif (out of the box) untuk menstimulus prognosis capaian target
2. Dari 5 aspek usulan perubahan, ada 4 aspek yang menjadi lingkup pembahasan oleh DRD DKI Jakarta yaitu 1) Konsep Kenormalan Baru, 2) Makroekonomi dan Proyeksi APBD, 3) Evaluasi dan Prognosis serta 4) Revisi Target Janji Kerja, yang Keterkaitannya dengan muatan RPJMD ada di dalam Bab III, Bab VI, Bab VII, Bab VIII dan Bab IX
3. Pada konsep kenormalan baru (New Normal) yang arahnya menuju Future Normal berdasarkan norma Microcentric, Digital-Oriented Development and Resilient Basic Services harus dilengkapi dengan Perda dan Pergub yang berbasis protokol Kesehatan, digital/smart city dan kolaborasi aktif untuk mencapai Jakarta sebagai kota yang Safe (Sehat), Smart and Resilient
4. Berdasarkan 6 Strategi Pembangunan Pasca Pandemi akan menjadi pokok bahasan DRD (Dijelaskan dalam Lampiran 2) Mendukung upaya pemulihan pasca pandemic Meningkatkan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, Masyarakat sebagai bentuk jaring pengaman sosial, Mengembangkan pola-pola kerjasama, pendanaan alternatif, dan kolaborasi sosial berskala besar, Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan prinsip kota berketahanan, Meningkatkan akses, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi digital, Sejalan dengan janji kerja Gubernur dan memiliki multiplier effect terbesar
5. Dalam road map tahun yang tersisa, yaitu 2020, 2021, 2022, perlu ditekankan kepada Faktor utama pendorong pemulihan pertumbuhan yang meliputi:
 - a. Kesehatan masyarakat dan kepatuhan protokol Covid-19
 - b. Pemulihan ekonomi dan pembangunan
 - c. Peningkatan efisiensi dan kualitas Pelayanan yang berorientasi pada Digital Oriented Development
 - d. Prakiraan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan proyeksi APBD Jakarta, kiranya perlu disesuaikan berdasarkan pendapat dan pandangan para ahli dibidangnya, baik terhadap kondisi perekonomian Jakarta, regional maupun global. Selanjutnya Berdasarkan Realisasi dan target koreksi makro ekonomi serta proyeksi APBD maka muatan-muatan APBD perlu dialihkan untuk kegiatan yang lebih diprioritaskan.
 - e. Kerangka Pendanaan Pembangunan untuk tahun 2020 (termasuk adanya pinjaman anggaran Rp.4,5 Trilyun kepada pemerintah pusat), kiranya dapat disesuaikan berdasarkan target visi 2020: "Memacu Pertumbuhan Berkualitas". Sekalipun tahun 2020 tidak mengindikasikan adanya pembangunan fisik, kiranya anggaran pengelolaan masing-masing SKPD dapat diarahkan guna memenuhi visi tersebut, periksa Lampiran Rekomendasi Usulan Perubahan Target KSD;
6. Kerangka Pendanaan Pembangunan hingga tahun 2022, kiranya lebih difokuskan kepada kondisi dan kemampuan APBD untuk penyangga agar siklus perekonomian Jakarta dapat terkendali guna memenuhi visi Perubahan RPJMD 2022 yaitu: Pemantapan Stabilitas Melalui Pemerataan Dan Pertumbuhan Berkualitas;
7. Target dan dan revisi target yang dicantumkan pada dokumen cenderung bersifat kuantitatif semata. Padahal target utama pembangunan pada umumnya adalah peningkatan sumberdaya manusia, karenanya target juga dirumuskan dalam pernyataan yang bersifat kualitatif.

II. PENDEKATAN TERHADAP PENYESUAIAN STRATEGI CAPAIAN

1. Multiplier Effect Program Rumah Susun Swadaya Masyarakat

Melalui Kolaborasi & Relaksasi Kebijakan Terhadap RDTR dan Peraturan Zonasi dan pemberian izin pembangunan Rusun Swadaya Masyarakat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, akan menghasilkan Multiplier Effect signifikan terhadap pertumbuhan Roda Perekonomian Jakarta.

- Menciptakan lapangan pekerjaan secara masif bagi arsitek, desainer interior, pekerja bangunan, mekanik, dan pekerja instalasi listrik. Lapangan pekerjaan yang tercipta secara masif menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan.
- Apabila Pembangunan Rumah Susun Swadaya Masyarakat direalisasikan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan bertambah signifikan dan dapat membantu pencapaian target RTH RPJMD tanpa perlu menambah anggaran untuk pengadaan lahan baru.
- Pembiayaan Perumahan Didukung oleh Swadaya Masyarakat & Lembaga Keuangan. Perputaran dana ini dapat merangsang laju ekonomi.
- Pembangunan Rumah Susun Swadaya Masyarakat menggerakkan ekonomi riil, seperti Industri bahan bangunan, Toko Material, Furnitur, Perabot, usaha Kelontong, Pasar, Warung Makan, Kedai Kopi & Minuman, serta Pedagang Kaki Lima.



2. Smart City

Program Smart City perlu diberikan peran yang lebih besar sebagai back-bone Digital Oriented Development. Program-program yang akan mendapat manfaat dari program Smart City antara lain:

- Pengembangan platform digital Pemprov DKI untuk mengembangkan market place bagi UMKM agar dapat mengefektifkan pembinaan, mempermudah marketing, akses kemitraan dengan pengusaha besar dan akses ke perbankan; atau menyiapkan integration platform
- Digitalisasi ketenagakerjaan dan pelatihan/Pendidikan khususnya SMK
- Mempercepat pembangunan infrastruktur digital dengan menyesuaikan platform digital yang ada di masyarakat, mengundang swasta u investasi infrastruktur di fasilitas pemprov, fasilitas publik seluas luasnya dan sebersar besarnya
- Adopsi digitalisasi pada dunia usaha khususnya UMKM, pelatihan Jakpreneur Ok-Oce yang siap memfasilitasi ini, termasuk Modifikasi dan modernisasi program Lokbin UMKM (lebih tematik produk) dan pemanfaatan platform digital dalam mengembangkan dan mempromosikan Lokbin UMKM ini, Optimalisasi platform JAKI dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dn lebih khusus lagi dalam mendukung pengembangan UMKM di Jakarta; Integrasi program Jakpreneur dengan pengembangan database dan formalisasi UMKM (melalui pendaftaran, bukan perizinan) dan promosi berbasis digital (integrasi dalam aplikasi JAKI)
- Shared platform digital untuk tata kelola UMKM berupa sistem pengelolaan keuangan, SDM, inventory, berbasis SaaS, sebagaimana di beberapa negara lainnya.
- Skenario network congestion sbg risiko naiknya traffic internet yang perlu di improve logistic & fulfillmentnya

3. Peningkatan Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah antara lain dapat dilakukan antara lain melalui:

- Pajak Kendaraan Bermotor dengan menggairahkan kembali pasar kendaraan bermotor dengan menciptakan industri yang dapat menarik minat masyarakat menengah ke atas, misalnya untuk membeli mobil listrik.
- Menghidupkan lagi industri hotel dan restoran dengan membangun trust
- Peningkatan penerimaan daerah dengan menggunakan strategi Land Value Capture dari pembangunan infrastruktur yang meningkatkan nilai tambah Kawasan termasuk pada Kawasan TOD

4. Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia menjadi salah satu simpul kemajuanantara lain melalui:

- Program pengenalan adaptasi kebiasaan baru yang dapat mengubah pola hidup sehat. Program ini tidak hanya sebagai instruksi pemerintah semata, melainkan dapat terinternalisasi ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Jakarta. Karenanya perlu pelibatan berbagai komponen masyarakat dalam sosialisasi adaptasi kebiasaan baru ini.
- Penurunan target dari 100% warga yang memiliki jaminan kesehatan UHC menjadi 98% tidak perlu dilakukan. Justru yang perlu dilakukan adalah perlu inovasi bagaimana angka 100% tetap menjadi target dengan memperhatikan updating data warga miskin di Jakarta yang belum memiliki KJS Plus. Analisis adanya warga pendatang akibat migrasi dan urbanisasi justru menguatkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah warga yang ber-KTP Jakarta. Sementara warga pendatang sebenarnya bukanlah tanggung jawab dari Pemda DKI Jakarta.
- Program Pemuliaan Perempuan hendaknya tidak hanya ditargetkan dalam bentuk jumlah pelayanan terpadu/RPTRA dan sejenisnya. Melainkan lebih kepada mencari akar permasalahan kekerasan perempuan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Program pemberdayaan perempuan pada aspek ekonomi, hukum dan sosial lebih diutamakan sebagai solusi jangka panjang dalam penanganan kekerasan perempuan.
- Pembangunan stadion olah raga bertaraf internasional hendaknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan membangkitkan kegiatan ekonomi baru, seperti bertumbuh-kembangnya UMKM pada masyarakat sekitar yang dapat menopang kegiatan olah raga di stadion tersebut. Pembangunan stadion ini juga dapat menjadi pemicu peningkatan konsep Healthy City, dimana munculnya perkampungan di sekitar stadion dapat memberikan penataan lingkungan permukiman yang sehat. Pembangunan stadion juga perlu dilakukan analisis dampak sosial budaya untuk mencegah terjadinya masyarakat sekitar yang tereksklusi.
- Dinamika kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi Jakarta bergerak sangat cepat, sehingga upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan target utama pembangunan Jakarta;
- Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Jakarta era Pandemi Covid-19, cenderung naik, sehingga memerlukan penanganan secara khusus;

Lampiran 1: MATRIKS USULAN REVISI RPJMD 2017-2022

| PROGRAM | TARGET | ANALISA | USULAN REVISI BAPPEDA | USULAN REVISI / TAMBAHAN DRD |
|----------------------------|--|--|--|---|
| PEMBANGUNAN MANUSIA | | | | |
| KJP PLUS | <ul style="list-style-type: none"> • APM SD/MI dari 96,15% menjadi 98,1% • APM SMP/MTs dari 84,79% menjadi 94,5% • APM SMA/SMK/MA dari 71,87% menjadi 85,75% | <p>Penyaluran KJP Plus yang penerimanya hampir mencapai 1 juta peserta didik per tahunnya, ternyata tidak berbanding lurus dengan pencapaian target indikator APM yang tiap tahun cenderung menurun untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs, sehingga target kondisi akhir dapat disesuaikan. Kenaikan APM hanya pada tingkat SMA/SMK/MA, sehingga pada tingkat ini target dapat dipertahankan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • APM SD/MI 95% • APM SMP/MTs 91% • APM SMA/SMK/MA 85,75% | <p>Pencapaian target tetap dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan</p> |
| PENDIDIKAN VOKASI | <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi kompetensi peserta didik sebanyak 80% 75 Lembaga Sertifikasi Profesi - P1 • 42 Unit Sekolah Baru 75 Ruang Kelas Baru • 90% SMKN memiliki ruang praktik terstandar sesuai dengan dunia usaha dan industri | <ul style="list-style-type: none"> • Saat ini Dinas Pendidikan sudah memiliki kemampuan untuk mensertifikasi lebih dari 80% dan sudah memiliki 84 Lembaga Sertifikasi Profesi - P1, sehingga target yang ada sudah tercapai. Sampai tahun 2020, sudah terbangun 9 Unit Sekolah Baru dan 27 Ruang Kelas Baru, penambahan lainnya dapat ditunda. • Standar ruang praktik diperbaiki menjadi sesuai dengan peraturan agar lebih terukur | <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi kompetensi peserta didik sebanyak 90-100% 84 Lembaga Sertifikasi Profesi - P1 • 10 Unit Sekolah Baru 27 Ruang Kelas Baru • 50% SMKN memiliki ruang praktik terstandar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 Tahun 2008 | <p>Pencapaian target tetap dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan</p> |
| KJS PLUS | 100% Warga memiliki jaminan kesehatan / | UHC di Jakarta tidak memungkinkan untuk tercapai sampai dengan 100%, mengingat Jakarta merupakan kota terbuka, ibukota | 98% Warga memiliki jaminan kesehatan | 1. Perlu inovasi agar target 100% tetap tercapai, dengan cara |

| PROGRAM | TARGET | ANALISA | USULAN REVISI BAPPEDA | USULAN REVISI / TAMBAHAN DRD |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN MANUSIA | | | | |
| | <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> | negara, dan pusat perekonomian dimana banyak migrasi dan urbanisasi antar kota. Kondisi eksisting saat ini yaitu 98%. | | update data masyarakat miskin yang belum memiliki KJS Plus. 2. Analisa data warga pendatang Jakarta agar dapat lebih menguatkan data warga berKTP DKI Jakarta |
| PERMULIAAN PEREMPUAN | Layanan Permuliaan Perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu di 44 Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> Saat ini Jakarta sudah memiliki 19 Pos Pengaduan di RPTRA, 8 Pusat Pelayanan Terpadu di RSUD, call center pengaduan terintegrasi 112, 4 unit rumah aman, dan kerjasama dengan RS Nasional, Polda, Kejaksaan, dan Lembaga Bantuan Hukum. Target permuliaan perempuan dan perlindungan anak di DKI Jakarta sudah tercapai dengan baik, yang perlu diperbaiki adalah nomenklatur target karena terkesan diperlukan pusat pelayanan terpadu di dalam Kantor Kecamatan. | Layanan Permuliaan Perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu di 6 wilayah Kota dan Kabupaten di Jakarta | <ol style="list-style-type: none"> Perlu pencarian akar permasalahan kekerasan perempuan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Program Pemberdayaan Perempuan pada aspek ekonomi, hukum dan sosial lebih diutamakan sebagai solusi jangka panjang dalam penanganan kekerasan perempuan. |
| STADION OLAHRAGA | Terbangunnya 1 stadion bertaraf internasional dengan menggunakan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | Stadion tidak memungkinkan dibangun dengan skema KPBU karena tidak <i>feasible</i> secara ekonomi. Pergub 14 Tahun 2019 telah mengamanatkan untuk mengubah skema pendanaan pembangunan stadion bertaraf internasional menjadi penugasan kepada BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo. | Terbangunnya 1 stadion bertaraf internasional dengan menggunakan skema penugasan kepada BUMD | Pembangunan Stadion Olahraga agar tidak dipaksakan melainkan disesuaikan dengan kemampuan realistis APBD 2020 |

| PROGRAM | TARGET | ANALISA | USULAN REVISI BAPPEDA | USULAN REVISI / TAMBAHAN DRD |
|----------------------------------|---|---|---|--|
| EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR | | | | |
| KEWIRAUSAHAAN TERPADU | <ul style="list-style-type: none"> • Pos Pengembangan Kewirausahaan di 44 Kecamatan • 200.000 wirausaha dan lapangan kerja baru • Revitalisasi 54 Lokasi Sementara (Loksem) • Revitalisasi 6 Lokasi Binaan (Lokbin) | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah wirausaha baru yang sudah terdaftar sampai dengan akhir 2019 adalah 89.149 orang; selain itu terdapat 41 Loksem dan 5 Lokbin yang sudah direvitalisasi. • Mayoritas wirausaha baru merupakan UMKM yang perlu digerakkan untuk mendukung pemulihan pasca pandemi, sehingga target tetap dipertahankan. | <ul style="list-style-type: none"> • 200.000 wirausaha baru • Revitalisasi 54 Lokasi Sementara (Loksem) • Revitalisasi 6 Lokasi Binaan (Lokbin) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Target tetap dipertahankan 2. Selain revitalisasi, perlu penambahan Loksem & Lokbin di 5 wilayah Jakarta, guna menampung lebih banyak UMK-M 3. Mendorong Kemitraan UMK-M dengan Perusahaan besar melalui pola Inti Plasma |
| KETAHANAN PANGAN | <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi pangan untuk 3,2 juta orang dalam 5 tahun • Pemantauan ketersediaan pangan untuk 11 komoditi • Kerja sama penyediaan pangan dengan 12 daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2019 Program Pangan Murah dianggarkan sebesar Rp 1,078 triliun untuk 1.100.894 orang; jumlah ini meningkat dari tahun 2018, sebesar Rp 885 miliar untuk 840.630 orang, sehingga target saat ini masih on track untuk tercapai. • Sedangkan, target ketersediaan pangan untuk 11 komoditi • Kerjasama penyediaan pangan telah tercapai. | <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi pangan untuk 3,2 juta orang dalam 5 tahun • Pemantauan ketersediaan pangan untuk 11 komoditi • Kerjasama penyediaan pangan dengan 12 daerah | Perlu dikaji lebih jauh tentang kemampuan BUMD untuk mengembangkan sistem pengadaan, penyimpanan dan sistem distribusi yang lebih baik guna dapat mengendalikan harga pangan yang lebih kompetitif dengan swasta |
| PERUMAHAN RAKYAT | <ul style="list-style-type: none"> • 14.564 unit rumah susun • Fasilitasi 250.000 warga yang memenuhi kriteria/persyaratan untuk memiliki rumah sendiri diantaranya melalui skema DP Nol | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rumah susun yang telah terbangun sebanyak 7.563 unit. • Sampai akhir tahun 2022, jika alokasi anggaran tersedia, direncanakan pembangunan tambahan sebanyak 6.238 unit. • Target fasilitasi warga untuk memiliki rumah sendiri sangat sulit untuk dicapai. Kondisi saat ini baru 200 unit | <ul style="list-style-type: none"> • 13.801 unit rumah susun • Fasilitasi 1500 warga yang memenuhi kriteria/persyaratan untuk memiliki rumah sendiri diantaranya melalui skema DP nol rupiah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rusun DP nol perlu dihentikan terlebih dahulu untuk dievaluasi 2. Perlu dikembangkan Insentif, rumah-rumah substandar dan program pembangunan Rumah Susun Swadaya Masyarakat melalui Relaksasi KLB & Tinggi Bangunan/Jumlah lantai |

EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| | | <p>rumah susun dengan skema DP Nol yang dihuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain itu pembangunan rumah susun melalui skema pasar juga belum berjalan, sehingga target akhir dapat direvisi. | |
| TRANSPORTASI TERPADU | <ul style="list-style-type: none"> Operasional MRT fase 1 dan pembangunan MRT fase 2 Operasional LRT fase 1 dan pembangunan LRT fase 2a dan 2b Penambahan dan Peremajaan Armada BRT Pembangunan BRT koridor 14 dan 15 Integrasi Antamoda | <ul style="list-style-type: none"> MRT fase 1 sudah beroperasi dari April 2019 dan MRT fase 2 pembangunannya sudah dimulai. LRT fase 1 sudah beroperasi, namun pembangunan LRT fase 2 belum dimulai. Armada Transjakarta sudah berkembang dari 800-an unit menjadi 3.500-an unit, termasuk mikrolet yang bergabung di dalam konsep JakLingko. Integrasi antar moda sudah dilaksanakan antara MRT, LRT, dan BRT. Belum ada arahan untuk pembangunan koridor 14 dan 15. | Menghilangkan target pembangunan BRT koridor 14 dan 15, sedangkan target lainnya dapat dipertahankan |
| JALAN & TROTOAR | <ul style="list-style-type: none"> 146.400 m² Jalur Pedestrian per tahun 12 Simpang Tak Sebidang (STS) - Flyover dan Underpass 20 unit JPO/ TPO/ skywalk 98% Kondisi Jalan Mantap | <ul style="list-style-type: none"> Total realisasi luas jalur pejalan kaki sampai saat ini yaitu 578.143 m². Pembangunan 6 STS telah dilaksanakan melalui kontrak <i>multiyears</i> (2019-2021), untuk 6 lokasi lainnya dapat ditinjau kembali kebutuhannya. JPO/TPO/skywalk yang sudah terbangun sebanyak 7 unit dan saat ini hanya direncanakan 4 unit tambahan, | <ul style="list-style-type: none"> Total 650.000 m² Jalur Pedestrian 6 Simpang Tak Sebidang (STS) - Flyover dan Underpass 11 unit JPO/ TPO/ skywalk 97% Kondisi Jalan Mantap |

| EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | | sehingga target dapat direvisi. Kondisi jalan mantap saat ini yaitu 96.6%. | | |
| SUMBER DAYA AIR DAN SAMPAH | <ul style="list-style-type: none"> Tanggul Muara Sungai sepanjang 3.338 meter 3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat / JSS 4 unit <i>Intermediate Treatment Facility</i> / ITF | <ul style="list-style-type: none"> Tersisa 400 m tanggul muara sungai yang belum terbangun, yaitu 300 m pada Aliran Barat dan 100 m pada Aliran Timur, namun ada penambahan target NCICD sepanjang 22 km. JSS yang akan dibangun yaitu zona 1, 2, 5, 6, dan 8. Sampai akhir 2022, baru direncanakan pembangunan 2 dari 4 lokasi ITF | <ul style="list-style-type: none"> Tanggul Muara Sungai sepanjang 3.338 meter 22 km Tanggul Laut NCICD 3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat / JSS 2 unit <i>Intermediate Treatment Facility</i> / ITF | Pembangunan Tanggul Laut dan 2ITF dapat dilanjutkan dan untuk JSS ditunda sampai dengan APBDnya memadai. |
| INTEGRITAS APARATUR | | | | |
| AKUNTABILITAS KINERJA | <ul style="list-style-type: none"> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) AA Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Hasil evaluasi SAKIP DKI Jakarta pada 2 tahun terakhir yaitu BB. Upaya perbaikan yang saat ini telah dilaksanakan yaitu penerapan sistem e-SAKIP, namun demikian target AA dinilai terlalu optimis, karena sampai saat ini belum ada Pemerintah Daerah yang mencapai nilai AA. Opini Laporan Keuangan Daerah DKI Jakarta pada 3 tahun terakhir mendapatkan WTP sehingga target ini dapat dipertahankan. | <ul style="list-style-type: none"> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | <ol style="list-style-type: none"> Target SAKIP AA & Predikat WTP diupayakan tetap, tidak perlu direvisi Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP & Aparat Kecamatan/Kelurahan ditingkatkan guna mendorong investasi baru dan mempermudah izin usaha, khususnya kepada UMK-M Penyederhanaan "Eselonisasi" disesuaikan dengan Pola kebijakan Pemerintah Pusat |
| SMART CITY | Pengembangan Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) | Sampai saat ini telah dilaksanakan kerjasama dengan perusahaan digital untuk pemanfaatan aplikasi dalam rangka pengembangan kota cerdas. Selain itu telah | Target disempurnakan menjadi pengembangan Citizen Relation Management (CRM) dan aplikasi layanan terintegrasi | <ol style="list-style-type: none"> Sensus pendataan UMK-M melalui platform digital Dibutuhkan Digital Marketplace untuk menunjang perluasan |

| INTEGRITAS APARATUR | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|
| PENATAAN PERMUKIMAN | Peningkatan kualitas permukiman kumuh sebanyak 200 RW | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas permukiman kumuh dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu, Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). • Sampai saat ini sudah terlaksana CAP di 147 RW dan CIP di 66 RW. Masih tersisa CAP di 53 RW dan CIP di 134 RW. • Apabila anggaran tidak tersedia maka target dapat disesuaikan dan memaksimalkan implementasi dari CAP yang sudah tersusun sampai ke tahapan CIP | Peningkatan permukiman kumuh kualitas sebanyak 150 RW | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa CAP di 53 RW & CIP di 134 RW tetap dilaksanakan hingga tahun 2022. 2. Nomenklatur CAP dan CIP (istilah asing) tidak sesuai untuk Program Penataan Permukiman Kumuh 3. Nomenklatur CAP diganti menjadi "Tri Bina Terencana" disingkat "TBT" 4. Nomenklatur CIP diganti menjadi "Kolaborasi Implementasi Terencana" disingkat "KIT" 5. Mohon DRD diberikan data hasil pelaksanaan 147 CAP & 66 CIP untuk bahan kajian. |
| RUANG TERBUKA HIJAU | <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan RTH 0.2 persen dari total luas daratan • 86 Taman Maju Bersama • 175 Taman Pintar | Sampai saat ini capaian penambahan RTH sebesar 0.1 persen atau setengah dari target, namun sisa target akan sulit tercapai tanpa anggaran untuk pengadaan lahan. Taman Maju Bersama yang sudah terbangun sebanyak 55 lokasi. | <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan RTH 0.15 persen dari total luas daratan • 86 Taman Maju Bersama • 175 Taman Pintar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan lahan baru untuk RTH saat ini sebaiknya ditunda terlebih dahulu. 2. Taman Maju Bersama dan Taman Pintar juga sebaiknya ditunda pembangunannya. 3. Pemanfaatan RTH Eksisting untuk penanggulangan banjir |

| INTEGRITAS APARATUR | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | <p>dengan membangun sumur resapan</p> <p>4. Memanfaatkan lahan milik Pemprov yang masih ada untuk Pemakaman Umum</p> |
| SIMPUL KEMAJUAN | | | | |
| KEANEKARAGAMAN BUDAYA | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Taman Benyamin Suaeb Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin Pagelaran Seni Sepanjang Tahun | <p>Pembangunan Taman Benyamin Suaeb direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dimulai pada tahun 2019, namun proses DED tidak dilanjutkan karena tidak tersedianya anggaran. Revitalisasi PDS HB Jassin sudah dilaksanakan dan kini asetnya dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pagelaran seni sepanjang tahun sudah terlaksana.</p> | <p>Target dapat dipertahankan, dengan opsi pendanaan alternatif untuk keberlanjutannya</p> | <p>Tidak disarankan menggunakan pendanaan alternatif untuk pembangunan fisik, jika tidak ada dana dari APBD maka ditunda saja pelaksanaannya</p> |
| KSPN KEPULAUAN SERIBU | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Pusat Konservasi Ekologi Pengembangan Pasar Terpadu Revitalisasi Pelabuhan di 10 Pulau Peningkatan daya listrik menjadi 15 MW Pembangunan IPAL di setiap pulau permukiman | <p>Pada RPJMN 2020-2024 Kepulauan Seribu tidak lagi menjadi 10 destinasi pariwisata prioritas sehingga nomenklatur kebijakan perlu disesuaikan. Pembangunan Pusat Konservasi Ekologi direncanakan pada tahun 2022. Sudah dilaksanakan pembangunan Jakgrosir di Pulau Tidung Kecil. Belum ada pelabuhan di pulau yang direvitalisasi, namun sudah tersedia DED untuk 3 Pelabuhan. Sudah dilaksanakan pengadaan kabel laut dan pembangunan PLTS oleh PT PLN dengan pekerjaan fisik saat ini sebesar 40% dan target selesai di tahun 2021. Pekerjaan IPAL sudah terlaksana di 2 pulau dan DED baru tersedia untuk 2 pulau lainnya.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Pusat Konservasi Ekologi Pengembangan Pasar Terpadu Revitalisasi Pelabuhan di 3 Pulau Peningkatan daya listrik menjadi 15 MW Pembangunan IPAL di 4 pulau permukiman | <ol style="list-style-type: none"> Dikembangkan "Fish Shelter" Pembangunan Permukiman penduduk yang layak huni. |

17

Masukan terhadap Raperda RDTR & PZ

Oleh: Badan Pekerja DRD DKI Jakarta

I. DASAR RUJUKAN :

1. Undang-undang (UU) RI, No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-undang (UU) RI, No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI;
3. Undang-undang (UU) RI, No. 11/2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission);
6. Peraturan Presiden (PERPRES), No. 60/2020 tentang Penataan Ruang Kawasan JABODETABEK-PUNJUR;
7. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR BPN), No. 6/2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
8. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR BPN), No. 8/2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah RTRW dan Rencana Tata Ruang Kab/Kota;
9. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR BPN), No. 16/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang & Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030;
11. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) & Peraturan Zonasi (PZ);
12. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5/2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DKI Jakarta, No. 1/2018 tentang RPJMD DKI Jakarta 2018-2022;
14. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi DKI Jakarta, No. 268/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 131/2014, tanggal 31 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah;
15. Keputusan Gubernur (KEPGUB) Provinsi DKI Jakarta, No. 143/2019 tentang Penetapan Anggota Dewan Riset Daerah Periode 2018 – 2022.

II. PERMASALAHAN UTAMA :

1. Berdasarkan Konsideran RTRW Jakarta 2030, PERDA No. 1/2012, alinea c: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Dengan demikian selayaknya substansi RDTRPZ merupakan penjabaran Struktur Ruang & Pola Ruang RTRW 2030 dengan peta skala 1:5.000;
2. Berdasarkan konsideran RDTRPZ, sesuai PERDA, No. 1/2014 bahwa pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang terjaga keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut belum terjabarkan secara tersistem dalam Penataan Ruang secara jelas & terukur;
3. Berdasarkan PERDA, No. 1/2014, Pasal 651, ayat (2), huruf c tentang peran masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ, dapat berbentuk pemberian tanggapan terhadap rancangan (Peninjauan Kembali) RDTR dan PZ. Dalam hal ini DRD sebagai lembaga Riset yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dilibatkan secara konkrit sebagai nara sumber, peserta pembahasan maupun untuk memberi masukan substansi PK-RDTRPZ;
4. Berdasarkan PERGUB No.131/2014, Pasal 7, ayat (2) huruf b, bahwa DRD secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut merupakan tugas dan fungsi DRD yang perlu diimplementasikan dalam PK-RDTRPZ;
5. Bahwa dalam proses pembahasan PK-RDTRPZ, sejak awal hingga pembahasan substansinya di Bapemperda DPRD DKI Jakarta (Desember 2020), DRD baru diberitahu oleh anggota DPRD dalam Rencana Dengar Pendapat (RDP) pembahasan substansi tersebut;
6. Dalam proses mendengar masukan dari masyarakat tentang mekanisme pelayanan perizinan PENATAAN RUANG, bahwa peraturan yang terdapat pada RDTRPZ, masih ditemui adanya kesulitan warga masyarakat pada umumnya dalam memahami perencanaan ruang yang substansinya sangat banyak dan sangat detail (672 Pasal), sehingga sangat kaku dan kurang implementatif dalam penjabaran kebijakan Gubernur dalam mengimplementasikan target-target RPJMD 2020 dan pelayanan perizinan sesuai dinamika yang berkembang sangat cepat.

III. TINJAUAN KONDISI AKTUAL :

1. Berdasarkan PP No. 15/2010, karena Provinsi DKI Jakarta merupakan otonomi tunggal dan berdasarkan kompleksitas permasalahan Jakarta sebagai Kota Induk dalam system Kota Metropolitan, selayaknya Peraturan Zonasi (PZ) dapat dipisahkan dengan dokumen RDTR agar implementasi PENATAAN RUANG (Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota) dapat di elaborasi dalam kebijakan Pemerintah Daerah agar lebih mudah dipahami dan mudah diterapkan oleh para pihak.

2. Berdasarkan permasalahan yang berkembang terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang di DKI Jakarta, banyak hal yang dapat dicatat, antara lain :
 - a. Substansi RDTR tersebut sangat gemuk, kurang efektif (672 Pasal) dan belum dapat membenarkan arahan yang lebih baik pada pelaksanaan pembangunan kota, antara lain : a). pelayanan publik belum baik, b). penyediaan ruang dan fasilitas kota belum ramah terhadap pejalan kaki, apalagi penyandang disabilitas & tunanetra, c). penyediaan fasilitas transportasi belum terintegrasi & tidak memadai, d). waktu perjalanan rata-rata lebih lambat 2-3 x lipatnya & angkutan umum hanya : 17%, e). pemenuhan rumah MBR belum memadai - backlog : 260.000 unit atau 17.000 unit/thn, f). perbaikan permukiman kumuh belum memadai - 416 RW Kumuh (data RPJMD 2013-2017, terakhir 223 RW ?) belum tertangani dgn baik, g). penyediaan Fasum Fasos dipermukiman belum memadai, h). penyediaan lapangan kerja belum memadai - 27% penduduk bekerja informal, i). masih terdapat banjir/rob dikawasan tertentu, dan lain-lain;
 - b. Karena substansi RDTR (rencana arahan pemanfaatan ruang, peta skala 1:5.000) & PZ (aturan kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat operasional, peta skala 1:1.000) digabungkan dalam PERDA (padahal beda kedalaman substansinya), sehingga cukup banyak permohonan perizinan bidang tata ruang yang tidak dapat dilayani dengan baik dan berpotensi menimbulkan masalah, contoh : a). untuk Wisma, mengatur 11 jenis peruntukan (R1-R11), padahal jenisnya hanya 3 : Wisma Biasa/Tapak, Wisma Taman & Wisma Susun, b). PZ mengatur kegiatan, Wisma : 14 kegiatan, Keagamaan : 6 kegiatan, Perdagangan : 11 kegiatan, Jasa : 20 kegiatan, dst, padahal kegiatan kota terus berkembang, c). banyak pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak dapat dieksekusi karena bisa beda pengertian & pemahaman dan d). pengendalian pemanfaatan ruang semakin rumit, periksa contoh lampiran.
 - c. Karena RDTRPZ ditetapkan dalam satu PERDA, maka permasalahan tata ruang semakin “complicated”: a). beberapa rencana tata ruang tidak sejalan dengan implementasinya, b). beberapa rencana pemanfaatan ruang tidak sejalan dengan rencana pembangunan daerah, c). rencana pembebasan lahan terkendala sistemnya, d). pelaksanaan pembangunan kota kurang sejalan dengan rencana tata ruang, e). pola insentif & disinsentif belum memenuhi VISI RTRW 2030. Akibatnya banyak permohonan yang tersendat di DPMPTSP yang perlu penyelesaian dan penyesuaian secara komprehensif.
 - d. Bentuk Format dan Substansi RDTRPZ seperti tersebut diatas, pada implementasinya dapat menghambat penerapan kebijakan pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan serta dapat menghambat percepatan investasi menuju perbaikan kota yang sejalan dengan VISI yang sejajar dengan kota-kota modern.
 - e. Build up area Jakarta 2019: >95% dan berdasarkan penggunaan tanah untuk perumahan & permukiman, telah mencapai : 51% (Landed : 91% & Rusun/RSS : 9%), sedangkan penggunaan tanah : 48,4%. Sehingga sekitar : 3,6% pemanfaatan rumah tinggal berada pada peruntukan tanah selain WISMA. Dengan demikian Program Peremajaan Lingkungan terutama untuk pembangunan RSS pada kawasan padat penduduk (termasuk Resettlement) perlu mendapat prioritas pembangunan dan berkesinambungan.
3. Berdasarkan pengamatan, bahwa daya dukung & daya tampung Jakarta telah melampaui kapasitasnya (penduduk malam 2019 : 10,57 juta jiwa, penduduk siang + komuter: 3 juta jiwa). Dengan demikian jumlah penduduk siang Jakarta telah melampaui target penduduk RTRW Jakarta tahun 2030, yaitu: 12,5 juta jiwa. Artinya daya dukung & daya tampung Jakarta sudah tidak memadai sebagai bagian dari kota global.
4. Bahwa ketepatan dan kecepatan sosialisasi substansi RTRW dan RDTRPZ serta pelayanan perijinan masih menjadi kendala bagi upaya percepatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan antara lain penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet serta implementasi pelayanan satu pintu belum optimal, tertinggal dan kurang inovatif (periksa ketentuan tentang “OSS”).

IV. Lampiran Substansi:

PP 24/2018 ttg Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi - Ketentuan Umum: Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;

Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha; b. pelaksanaan Perizinan Berusaha; c. reformasi Perizinan Berusaha sektor; d. sistem OSS; e. Lembaga OSS; f. pendanaan OSS; g. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS; h. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan i. Sanksi; VISI DAN MISI RTRW Jakarta 2030, Pasal 3: Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Misi, Pasal 4 Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, misi pembangunan Daerah sebagai berikut: a. membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi; b. mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia; c. mengembangkan budaya perkotaan; d. mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana; e. menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; dan f. menyasrakan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup;

Konsideran PERDA No. 1/2012 ttg RTRW 2030: alinea c: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;

Ketentuan Umum RDTRPZ: Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Dan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;

Pasal 2, Ruang lingkup Peraturan Daerah RDTRPZ, meliputi: a. asas, tujuan, fungsi, dan manfaat; b. kedudukan dan jangka waktu; c. wewenang dan tanggung jawab; d. pola pengembangan kawasan dan sifat lingkungan; e. rencana detail tata ruang kecamatan; f. peraturan zonasi; g. perizinan dan rekomendasi; h. insentif dan disinsentif; i. data dan informasi; j. kerjasama; k. pengendalian pemanfaatan ruang; l. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan m. pembinaan dan pengawasan (Peruntukan Tanah RDTRPZ dengan skala 1 : 5.000 berfungsi sebagai peta arahan, sedangkan untuk operasional/perizinan masih diperlukan Peta Rencana Terinci (Blad Rencana Kota) skala 1 : 1.000)

18

Outline Agenda Riset Daerah DRD DKI Jakarta 2021 - 2024

Oleh: Badan Pekerja DRD DKI Jakarta



AGENDA RISET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2020-2025

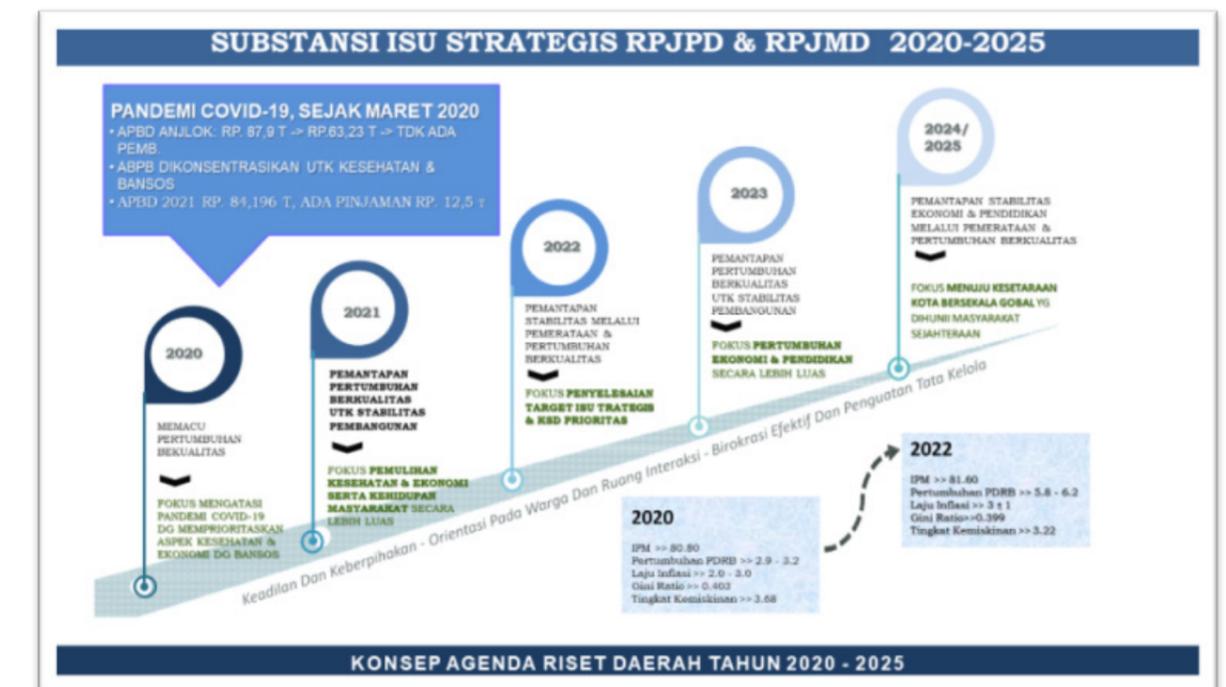
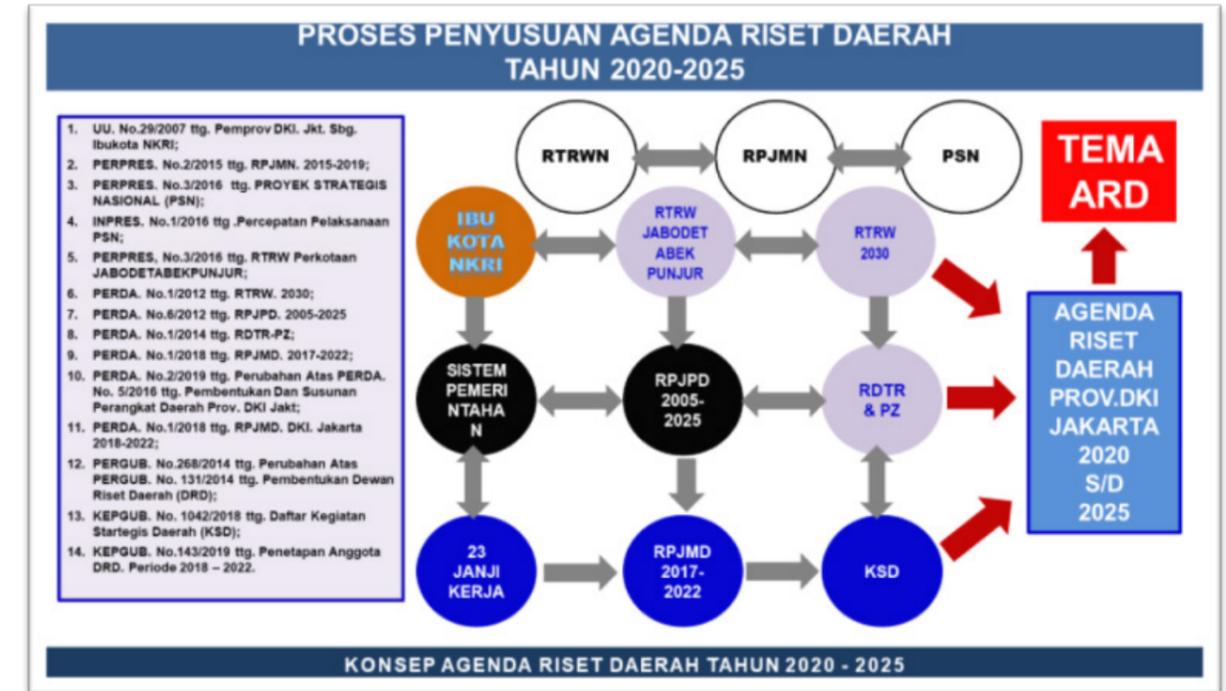
Dipresentasikan oleh
POKJA ARD Dewan Riset Daerah Prov. DKI Jakarta
15 Januari 2021

DEWAN RISET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA | OKTOBER 2020

MAKSUD & TUJUAN PENYUSUNAN AGENDA RISET DAERAH 2020-2025

| | |
|--|---|
| <p>1 Untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD/UKPD/Lembaga terkait untuk memenuhi "VISI RPJPD 2020-2025"</p> | <p>Jakarta: "Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"</p> |
| <p>2 Untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD/UKPD/Lembaga terkait untuk memenuhi "VISI RPJMD 2017-2022"</p> | <p>Jakarta "Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua" yang sejalan dengan Penataan Ruang, 23 Janji Kerja & 73 Kegiatan Strategis Daerah.</p> |
| <p>3 Untuk menyepakati Agenda Riset Daerah dari SKPD/UKPD/Lembaga terkait berdasarkan RTRW JAKARTA 2030, RPJPD 2005-2025, 23 Janji Kerja, RPJMD 2017-2022, RDTR-PZ & 73 KSD</p> | <p>Yang sejalan dengan tugas & fungsi, kualitas & kuantitas SDM serta APBD tahun berjalan, terutama pada pembenahan sistem pemerintahan / birokrasi, sistem pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas ruang kota serta pengurangan terhadap permasalahan kota yang menahun secara terstruktur.</p> |

KONSEP AGENDA RISET DAERAH TAHUN 2020 - 2025





- ### TEMA POKOK AGENDA RISET DAERAH Tahun 2020 - 2025 02
- 3. MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL & BUDAYA, melalui :**

 1. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan budaya secara seimbang;
 2. Terwujudnya penanganan terhadap 26 jenis penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan antara lain: melalui pendidikan vokasi pada kelompok tertentu, menyediakan Rumah Singgah, pendampingan dan lain-lain yang terprogram;
 3. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui bimbingan, pelatihan, penyediaan lapangan kerja yang melibatkan semua pihak secara terprogram;
 4. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak melalui 3 pilar: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan & Anak, dan Pemenuhan Hak Anak secara terprogram dan berkelanjutan serta menyentuh akar masalahnya;
 5. Terwujudnya pembangunan manusia berakhlak mulia melalui berbagai upaya yang mendasar terutama pada kelompok masyarakat tertentu melalui dialog, pengembangan program Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE), dan lain-lain yang lebih intens;
 6. Terwujudnya peningkatan TRANTIBUM melalui penegakan hukum yang lebih persuasif, tegas & tuntas;
 7. Terwujudnya pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur secara menyeluruh melalui berbagai media yang lebih mudah dan tepat sasaran.
 8. Tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya yang berkualitas menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara terprogram dan berkesinambungan;
 9. Terwujudnya pemberdayaan dan peran serta warga RT/RW yang mendorong kearifan lokal sesuai dengan karakteristik lingkungannya.

4. MEWUJUDKAN PENINGKATAN DAYA DUKUNG, DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN & EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM, melalui:

 - 1) Terwujudnya perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan mampu menjangkau masa depan sesuai dengan VISI & MISInya;
 - 2) Tersedianya RTH yang memenuhi standar lingkungan yang memenuhi kuantitas dan kualitas secara bertahap;
 - 3) Terwujudnya penanganan kebakaran dan banjir serta mampu meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang lebih terencana dan terukur;
 - 4) Terwujudnya pengurangan emisi karbon melalui berbagai regulasi dan perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang konsisten;
 - 5) Terwujudnya kesiapan menghadapi bencana dan pencegahan penurunan muka air tanah melalui berbagai regulasi, penataan ruang, perencanaan pembangunan dan anggaran yang memadai;
 - 6) Terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memenuhi penataan ruang, kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang terukur, terkendali dan berkesinambungan untuk memenuhi kondisi Jakarta sebagai kota global.
- KONSEP AGENDA RISET DAERAH TAHUN 2020 - 2025**

- ### TEMA POKOK AGENDA RISET DAERAH Tahun 2020 - 2025 01
- Berdasarkan substansi pokok sebagaimana substansi RPJPD 2005-2025, tersebut diatas, maka Tema Agenda Riset Daerah 2020-2025, 23 Janji Kerja, Kegiatan Strategis Daerah (KSD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022, adalah sebagai berikut:
- 1. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS SARANAS PRASARANA WILAYAH, melalui:**

Tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang mendukung integrasi moda transportasi untuk memenuhi rasio 60% angkutan umum & 40% kendaraan pribadi;

 - 1) Terwujudnya sistem tata air yang terinterasi mulai dari saluran lokal, saluran penghubung, saluran makro yg memenuhi kapasitas lingkungan dan bebas dari lumpur & sampah;
 - 2) Terwujudnya program Jakarta Bersih melalui pengurangan sampah dari sumbernya, tersedianya Bank Sampah & ITF serta perubahan perilaku membuang sampah;
 - 3) Tersedianya pengolahan limbah sesuai Zona Pengolahan Air Limbah dan adanya septiktank komunal;
 - 4) Tersedianya sarana dan prasarana energi & tenaga-listrikan yang memenuhi kapasitas kebutuhan Jakarta sebagai Kota Global yang ramah lingkungan;
 - 5) Tersedianya air bersih yang memenuhi kualitas dan cakupan pelayanan air bersih yang dapat mengurangi penggunaan air dalam;
 - 6) Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, nyaman dan hijau yang dilengkapi dengan Fasum Fasos sesuai standar pelayanan minimal untuk RUSUN dan Rumah Bertingkat (3 lantai) pada kawasan permukiman antara lain untuk memenuhi Program "Kota Tanpa Kumuh" (KOTAKU);
 - 7) Tersedianya sistem informasi, komunikasi dan multimedia yang memenuhi kebutuhan Jakarta sebagai kota global;
 - 8) Tersedianya sarana sosial dan ekonomi yang memenuhi standar lingkungan dan memenuhi kebutuhan usaha masyarakat secara bertahap..

2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN YANG KUAT DAN BERKUALITAS, melalui:

 - 1) Terwujudnya struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota memadai, sistem transportasi & distribusi yang semakin maju;
 - 2) Tersedianya kualitas ketenagakerjaan yang memenuhi kebutuhan perkembangan kota;
 - 3) Terwujudnya perizinan usaha yang efektif & efisien yang semakin cepat, tepat dan terjangkau;
 - 4) Terwujudnya laju inflasi yang terkendali (kurang dari 3%) dan mampu mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha untuk mendukung peningkatan PDRB yang signifikan;
 - 5) Terwujudnya pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Jakarta diatas 6% yang dapat mendorong masyarakat golongan menengah bawah secara yang mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Jakarta yang semakin besar diatas 16% terhadap PDRB Nasional.
- KONSEP AGENDA RISET DAERAH TAHUN 2020 - 2025**

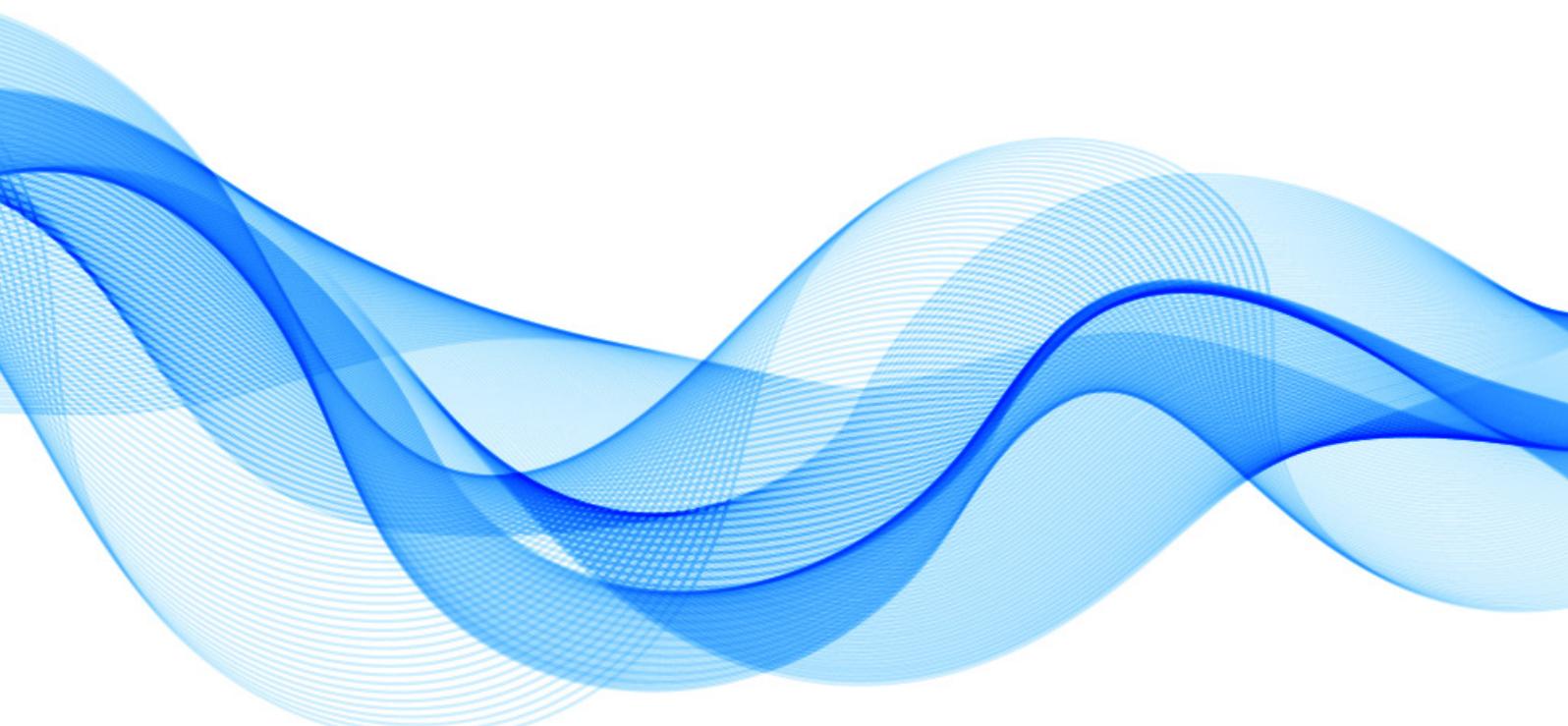
- ### TEMA POKOK AGENDA RISET DAERAH Tahun 2020 - 2025 03
- 5. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PEMERINTAHAN, melalui :**

 - 1) Terwujudnya Penataan Kelembagaan, Kewenangan dan Sumber Daya Aparatur;
 - 2) Terwujudnya Pengembangan Tata Kelola dan Tata Laksana Manajemen Pemerintahan;
 - 3) Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 - 4) Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan didaerah;
 - 5) Terwujudnya Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Internasional;
 - 6) Terwujudnya perizinan usaha yang efektif dan efisien yang semakin cepat, tepat dan terjangkau.

6. MEWUJUDKAN PERKUATAN INOVASI DAN KREATIVITAS DAERAH, melalui :

 - 1) Terwujudnya kondisi Kota Jakarta Yang Produktif, yang mampu menaikkan PRBD, Income percapita yang memenuhi kriteria kota modern dan lebih menyeluruh;
 - 2) Terwujudnya Pengembangan Kualitas Ketenagakerjaan dan Kemampuan Inovasi yang berdaya saing global yang diisi oleh tenaga kerja yang berkualitas dalam kuantitas yang memadai;
 - 3) Terwujudnya sistem perkuatan Inovasi dan Kreativitas Daerah yang lebih berdaya saing global.
- Penjabaran Tema Pokok ARD 2020-2025**


- KONSEP AGENDA RISET DAERAH TAHUN 2020 - 2025**



Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta
drdjakarta.id
Ged. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Lt. 8
Jl. Taman Jatibaru No. 1
Jakarta Pusat 10150 Indonesia